

Abd Rahim Razzaq



PANDORA



M E N G E N A L
WAJAH BARU
PENDIDIKAN
ISLAM

**MENGENAL WAJAH BARU
PENDIDIKAN ISLAM**





MENGENAL WAJAH BARU PENDIDIKAN ISLAMI

Abd Rahim Razzaq

MENGENAL WAJAH BARU PENDIDIKAN ISLAM

Abd Rahim Razzaq

©Abd. Rahim Razzaq, Pandora, 2019

All rights reserved

Editor: Mohammad Zaini

Desain Sampul: Ats HuruH

Lay out/tata letak Isi: Tim Redaksi

Cetakan pertama: 2019

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Abd Rahim Razzaq/Mengenal Wajah Baru Pendidikan Islam/Pandora/2019

xii + 156 halaman; 14,5 x 21 cm

ISBN: 978-623-7148-58-6

Penerbit:

Pandora (Kelompok Penerbit CV. Bildung Nusantara)

Jl. Raya Pleret KM 2

Banguntapan Bantul Yogyakarta 55791

Telpn: +6281227475754 (HP/WA)

Email: bildungpustakautama@gmail.com

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan.



PENGANTAR PENULIS



Segala puji bagi Allah SWT. Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. Atas limpahan taufik, hidayah dan inayah-Nya, melalui perjalanan panjang, akhirnya penulisan buku ini dapat diselesaikan walaupun dengan segenap keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Shalawat serta salam dihaturkan kepada Rosulallah SAW, sebagai suritauladan dan pembimbing umat era pencerahan intelektual dan spritual.

Membincangkan aktivitas dunia pendidikan seakan tidak akan pernah usang dimakan masa atau lupuk diterpa waktu. Aktivitas pendidikan yang selalu bergumul dengan cakrawala intelektual dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut selalu dinamis dan progresif terhadap berbagai kemajuan dan pengetahuan yang berkembang di masyarakat.

Oleh sebab itu, bagi para pemikir dan pemerhati pendidikan, membincangkan kembali objek kajian dunia

pendidikan laksana menatap samudra yang sulit dicari tepinya. Hal ini tidak lepas dari peranan pendidikan sendiri yaitu sebagai pengampu sumber daya umat manusia untuk mampu mempertahankan hidupnya. Dengan demikian, perubahan pola pikir, kebutuhan dan tuntunan hidup umat manusia secara otomatis menuntut pula perubahan dan perkembangan sistem dan aktivitas pendidikan. Bahkan jika kita melihat pendapat Ali bin Abi Tholib, pendidikan yang sekarang digalakkan itu justru sebagai bekal untuk kehidupan yang akan datang.

Artinya pendidikan semestinya memberikan bekal pengalaman dan pengetahuan mendahului dari berbagai permasalahan yang akan dihadapi umat manusia. Sehingga, ketika permasalahan itu muncul maka umat tidak merasa kaget, gugup, bingung ataupun stres dan bahkan sampai gila. Oleh sebab itu, wajar jika setiap saat hadir ide-ide segar dalam dunia pendidikan sebagai upaya memenuhi dan menjadi solusi terhadap permasalahan umat.

Memikirkan aktifitas dunia pendidikan berarti mencoba mencari formula-formula baru dalam berbagai aktivitas pendidikan, tanpa harus ada pengecualian. Oleh sebab itu aktivitas dunia pendidikan Islam sendiri sebagai salah satu dari kesatuan aktivitas pendidikan kiranya perlu diperhatikan dan mendapatkan pupuk-pupuk pemikiran segar, sehingga keberadaannya tidak dapat di pandang sebelah mata.

Eksistensi pendidikan Islam juga semestinya dapat memberikan solusi terhadap berbagai perkembangan



permasalahan dan kebutuhan umat. Dengan demikian, mencari format-format baru dalam dinamika pendidikan Islam adalah suatu keniscayaan untuk membantu umat manusia.

Satu anggapan yang kurang arif jika ada suatu pernyataan bahwa aktivitas pendidikan Islam hanya untuk kepentingan akhirat saja. Pernyataan tersebut selain merupakan suatu pengkredilan terhadap dunia Islam, juga sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam baik yang bersumber dari al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah saw. Peran pendidikan Islam pada dasarnya adalah berusaha memberikan capaian kebahagiaan umat baik di dunia maupun di akhirat.

Atas dasar itu pula melalui tulisan pemikiran yang terbatas ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pendidikan Islam di Indonesia, ataupun mudah-mudahan tidak terlalu berlebihan untuk dapat memberikan manfaat bagi aktivitas pendidikan Islam di dunia.

Melalui eksplorasi terhadap perkembangan dunia pendidikan sekarang ini, penulis ingin turut serta memberikan sumbangan pemikiran untuk suatu format baru pendidikan Islam. Oleh sebab itu buku ini dengan judul "*Mengenal Wajah Baru Pendidikan Islam*"

Dengan demikian, walaupun dengan berbagai keterbatasannya kiranya buku ini layak dibaca oleh para guru, pengelola madrasah/sekolah, dan pengambil kebijakan. Tak terkecuali buku ini layak dibaca oleh

kalangan mahasiswa serta oleh siapapun yang memiliki daya tarik atau suatu perhatian terhadap dunia pendidikan.

Dalam penulisan ini, penulis merasa banyak berutang budi kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini, untuk itu disampaikan terimakasih kepada mereka semua. Ungkapan secara khusus penulis sampaikan kepada kedua orangtua beserta teman-teman tercinta.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya.



DAFTAR ISI

Pengantar Penulis	v
Daftar Isi	ix
BAB I PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM DI ERA KONTEMPORER	1
A. Problematika Pendidikan Islam	3
B. Kesadaran Paradigmatik membangun pendidikan Islam Holistik-Integralistik	15
BAB II DEMOKRASI PENDIDIKAN	23
A. Pendahuluan	23
B. Makna Demokrasi	25
C. Mengembangkan kebijakan pendidikan yang demokratis	31
D. Pendidikan demokrasi dalam rangka integrasi bangsa	34
E. Pendidikan Islami sebagai praktik pembebasan	38
F. Demokratisasi dan Liberalisasi pendidikan Islam: balajar dari Paulo Freire	44

BAB III LIBERALISASI PENDIDIKAN	51
A. Ideologi Liberalisasi Pendidikan	51
1. Liberalisme Pendidikan	51
2. Liberasionisme Pendidikan	54
3. Anarkisme Pendidikan	55
B. Tujuan Pendidikan dalam Ideologi Liberalisme Pendidikan	55
C. Peranan Sekolah dalam Ideologi Liberalisme Pendidikan	59
D. Anak Didik dan Pendidik	61
E. Metode Pengajaran dan Penilaian Hasil Belajar	65
BAB IV DIKOTOMI DAN DUALISME DALAM SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA	71
A. Pengertian Dikotomi dan Dualisme Pendidikan	72
1. Dikotomi Pendidikan	72
2. Pengertian Dualisme Pendidikan	73
B. Pandangan Islam mengenai dikotomi dan dualisme pendidikan	75
C. Sejarah timbulnya dikotomi dan dualisme pendidikan di Indonesia	87
D. Dampak akibat dari dikotomi dan dualisme pendidikan di Indonesia	95
E. Solusi dalam menangani dikotomi dan dualisme pendidikan di Indonesia	104
BAB V WACANA ISLAMISASI PENGETAHUAN	113
A. Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Tinjauan Historis	114
B. Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan	119



C. Islamisasi Pengetahuan antara Pro dan Kontra	127
D. Pengembangan Islamisasi Pengetahuan	130
E. Implikasi terhadap pengembangan ilmu pendidikan Islam	136
1. Aspek kelembagaan	139
2. Aspek Kurikulum	141
3. Aspek Pendidik	142
Daftar Pustaka	145
Biodata Penulis	155



BAB I

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM DI ERA KONTEMPORER

Banyak pakar pendidikan yang telah berusaha untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam menyelesaikan problematika yang ada dalam sistem pendidikan Islam. Saat ini telah banyak dilakukan upaya yang definitif maupun preventif untuk menyelesaikan problematika pendidikan Islam. Baik melalui seminar pendidikan, forum diskusi dan lain-lain yang bisa digunakan sebagai media untuk memberikan solusi terhadap krisis pendidikan Islam yang terjadi.¹

Meskipun segala upaya yang dilakukan oleh para pakar pendidikan Islam untuk mengatasi kelemahan dalam sistem pendidikan, tampaknya pendidikan Islam belum mampu bangkit dan bisa menjawab berbagai macam tantangan yang dihadapinya, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Pada tataran ini, banyak kalangan yang mengasumsikan atau bahkan mengklaim bahwa pendidikan Islam telah mati. Ini artinya bahwa pendidikan Islam sudah tidak “mampu bertahan” dengan perubahan realitas zaman yang menciptakan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.²

¹ Umiharso dan Haris Fathoni Makmur, *Pendidikan Islam dan Krisis Moralisme Masyarakat Modern* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2010), 207.

² Ibid.

Problematika tersebut semakin urgen dan menarik dalam diskursus pendidikan Islam yang secara substansial mengarah pada akses filosofis ontos-metafisisnya. Dan ketika melihat pendidikan Islam dalam prespektif ontologi merupakan pendidikan yang mengupayakan pemanusiaan manusia (humanisasi) dengan cara yang manusiawi untuk mencapai nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi.³ Akan tetapi, konstruksi ideal tersebut tidak mampu diwujudkan, bahkan dalam “Gagalnya Pendidikan Islam”. Lebih lanjut menurut Haidar Baqir di harian Kompas pada tanggal 28 Februari 2003 mengungkapkan bahwa kegetirannya tentang pendidikan agama di sekolah-sekolah Indonesia yang secara general telah dianggap telah gagal.⁴

Hal ini merupakan keabsahan universal karena secara historis dinamika pendidikan Islam tidak berada dalam konteks realitas yang vakum. Pendidikan Islam akan terus berada dalam konteks tertentu yang dinamis dan akan terus berada dalam konteks tertentu yang dinamis dan akan terus akan mengalami dinamika. Dan ketika dinamika perubahan yang begitu cepat itu akan berimbas pada pendidikan Islam, maka secepat itu pula pendidikan Islam akan mengalami upaya-upaya dekonstruksi bahkan akan berlanjut pada upaya rekonstruksi. Lebih dari itu, ketika rekonstruksi telah menjadi consensus, maka pendidikan Islam secara otomatis menjelma menjadi konstruksi yang kedua dan akan terjadi lagi langkah-langkah dekonstruksi dan rekonstruksi dan begitu siklus normatif seterusnya.

³ M. Sukudi, *Pendidikan dalam Prespektif al-Qur'an* (Yogyakarta: Mikraj, 2005), 104.

⁴ Haidar Baqir, *Gagalnya Pendidikan Agama, Kompas*, 28 Februari 2003



Pada tataran ini, pendidikan Islam dapat diklaim dalam kondisi memprihatinkan, sebab pendidikan Islam mengalami keterpurukan jauh tertinggal dengan pendidikan Barat. Jauh sebelum era modern ada, pendidikan Islam pada zaman keemasan berada pada puncak akademis, yang mampu menciptakan pendidikan Islam sebagai pusat peradaban dunia, baik dibidang budaya, seni ataupun pendidikan. Akan tetapi, pada saat ini yang terjadi justru sebaliknya, pendidikan Islam mengekor pada pendidikan Barat.⁵

Pertanyaanya adalah mengapa pendidikan Islam dalam kondisi seperti yang memprihatinkan ini? Hal ini tidak lepas dari persoalan-persoalan yang melingkari pendidikan Islam sendiri. Oleh sebab itu, dalam prespektif Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), wacana pendidikan Islam selalu aktual dan mengalami proses transformasi dari waktu ke waktu. Sehingga banyak argumen yang mengemukakan bahwa pendidikan Islam selalu bersentuhan dengan persoalan umat beragama⁶ dan umat itu sendiri. Serta persoalan yang menyangkut persoalan Pendidikan Islam sendiri.

A. Problematika Pendidikan Islam

Alam pikiran posmodernis mengajarkan untuk meninjau ulang konsep-konsep yang selama ini sudah tertanam untuk dikaji ulang, secara kritis. Begitu juga dengan konsep pendidikan yang selama ini dianggap baku perlu ada penelaahan kritis. Salah satunya adalah apakah sudah cukup manusia dalam proses pendidikan hanya ditekankan untuk memiliki kecerdasan intelektual. Dari beberapa kajian

⁵ Umiharso dan Haris Fathoni Makmur, *Pendidikan Islam*, 208-209.

⁶ Abdul Halim Soebahar, *Matriks Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2009), 9.

empirik, telah banyak ditemukan ragam kecerdasan yang justru lebih dianggap penting bagi kehidupan. Dan manusia bisa dianggap lebih krusial jika memiliki beberapa macam kecerdasan, yang diantaranya terdiri IQ (*Intelligence Quotient*), EQ (*Emosional Quotient*), SE (*Spiritual Quotient*) dan kecerdasan lainnya.⁷

Dari beberapa kecerdasan diatas, maka memperoleh kemampuan untuk mengenali perasaan, membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran, memahami perasaan dan maknanya, serta mengendalikan perasaan secara mendalam sehingga membantu perkembangan emosi dan intelektualnya. Dengan kata lain, kecerdasan tersebut akan membantu peserta didik menyatu dalam profesionalismenya sehari-hari.⁸ Intelektual dan emosi yang menyatu dengan dilandasi oleh kesadaran ketuhanan (SQ) akan membantu terbentuknya manusia yang mempunyai kepekaan diri, sosial dan kebutuhannya.⁹

Akan tetapi, persoalannya sekarang adalah konseptual-teoritis dalam pendidikan Islam yang dilandasi dengan adanya paradigma dikotomi dalam dunia pendidikan Islam antara agama dengan bukan agama, wahyu dengan akal serta dunia dengan akhirat. Terjadinya *dikotomi islamic knowledge*

⁷ Ibid., 71. Dan di sisi yang lain ada yang mensinyalir bahwa salah satu realitas pendidikan Islam cenderung bersifat normatif sehingga kini dapat dengan mudah ditemukan. Mulai dari formulasi tujuan sampai pada sisi yang bersifat "melangit", dalam pengertian, formulasi-formulasi dari pendidikan Islam cenderung bersifat teoritis dan abstrak. Lebih detailnya lihat dalam Nurul Huda, *Cakrawala Pembebasan: Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 157.

⁸ Steven J. Stein dan Howard E. Book, *Ledakan EQ 15 Prinsip dasar Kecerdasan Emosi Meraih Sukses* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2004), 30.

⁹ Umiharso dan Haris Fathoni Makmur, *Pendidikan Islam*, 211.



dan *non islamic knowledge* mengakibatkan ilmu-ilmu aqliyah yang menjadi pilar bagi sains dan teknologi menjadi pudar, bahkan lenyap dari tradisi keilmuan dan pendidikan Islam. Pada saat yang sama, ilmu-ilmu *aqliyah* mengalami transmisi ke dunia Barat. Akhirnya, umat Islam pun menjadi terpengaruh dengan *supermance knowledge* yang dikuasai Barat dengan mengalami ketergantungan kepada mereka dalam semua aspek kehidupan.

Maka kebangkitan peradaban manusia melalui pendidikan bukan hanya memadukan yang *aqliyah* (*intransendental*) dengan *naqliyah* (*transcendental*), melalui juga mengorientasikan ilmu bagi upaya pengabdian pada penciptaannya, teknologi yang teistik.¹⁰ Lingkup keseimbangan (*balance*) antara aspek yang horizontal dan vertikal merupakan ranah operasional-aplikatif dan juga merupakan prinsip dasar pendidikan Islam.¹¹

Dengan demikian pendidikan Islam dengan berbagai upaya untuk membenahi metode dan strateginya untuk menumbuhkan kembali dan menyatukan antara ilmu dan iman. Iman adalah unsur-unsur yang terkait dengan spiritual, sementara amal (*action*) adalah yang berkaitan dengan yang material, akan tetapi dalam prespektif Tuhan dua entitas tersebut merupakan satu keterkaitan. Artinya bahwa aspek vertikal dan aspek horizontal merupakan dua entitas yang integral dalam satu kesatuan dan merupakan penyempurna kesempurnaan kemanusiaan manusia. Dalam pandangan

¹⁰ Soebahar, *Matriks Pendidikan*, 70.

¹¹ Ibid., 75. Bahkan tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan dalam kurikulum pendidikan Islam prinsip keseimbangan juga ditekankan. Lihat Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, Terj. Hasan Lnggulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 520.

pendidikan agama Islam hal tersebut dikenal dengan prinsip integralistik, artinya manusia dan segala sesuatu yang ada padanya harus dikembangkan pada satu muara, yakni kebajikan dalam rangka pengabdian kepada Tuhan.¹²

Kalau ditarik ke luar sejarah, terjadinya pemisahan agama dari ilmu pengetahuan terjadi pada abad pertengahan, yakni pada saat umat Islam kurang memperhatikan atau meninggalkan IPTEK. Pada masa itu yang berpengaruh di masyarakat Islam adalah ulama terkait dan ulama fiqih. Keduanya menakan paham *taklid* dan membatasi kajian agama hanya pada bidang yang sampai sekarang masih dikenal dengan ilmu-ilmu agama seperti tafsir, fiqih dan tauhid. Ilmu tersebut memiliki pendekatan yang normatif dan tarekat, tarekat hanyut dalam wirid dan zikir dalam rangka mensucikan jiwa dan mendekati diri kepada Allah swt dengan menjauhkan kehidupan duniawi.¹³

Sedangkan ulama tidak tertarik mempelajari alam dan kehidupan manusia secara objektif. Bahkan ada yang mengharamkan untuk mempelajari filsafat, padahal dari filsafatlah IPTEK bisa berkembang pesat. Keadaan ini mengalami perubahan pada akhir abad-19, yakni sejak ide-ide pembaharuan diterima dan didukung oleh sebagian umat. Mereka mengkritik pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang dipisahkan dari ajaran agama, seperti dikemukakan oleh Muhammad Naquib al-Attas dan Ismail Razi al-Faruqi dengan tujuan agar ilmu pengetahuan dapat membawa kepada kesejahteraan bagi umat manusia. Menurut para ilmuwan dan cendekiawan muslim tersebut,

¹² Soebahar, *Matriks Pendidikan*, 74.

¹³ Umiharso dan Haris Fathoni Makmur, *Pendidikan Islam*, 212.



pengembangan IPTEK perlu dikembangkan pada kerangka dan prespektif ajaran Islam. Oleh sebab itu, Ismail Razil al-Faruqi menyerukan perlunya dilaksanakan Islamisasi. Dan sejak itulah gagasan Islamisasi digulirkan dan kajian mengenai Islam dalam hubungannya dengan pengembangan IPTEK mulai digali dan diperkenalkan.¹⁴

Dewasa ini, dunia pendidikan tinggi Islam sebagian besar masih mengikuti platform keilmuan klasik yang didominasi ulama al-syar'i.¹⁵ Memasuki priode modern, tradisi itu mengalami kesenjangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tegnologi yang telah sangat kuat mempengaruhi peradaban manusia dewasa ini. Kesenjangan itu telah menghadapkan dunia pendidikan tinggi Islam dalam tiga situasi yang buruk, pertama, dikotomi yang berkepanjangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Kedua, keterasingan pengajaran ilmu-ilmu keagamaan dari realitas kemoderenan dan ketiga menjauhnya kemajuan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama.¹⁶

¹⁴ Ibid., 213.

¹⁵ Sedangkan Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam melihat pendidikan tinggi Islam sangat menuklik. Lebih lanjut mengatakan bahwa sistem pendidikan tinggi modern yang kini berkembang di seluruh dunia lebih merupakan pabrik doktor yang kemudian menjadi tukang-tukang tingkat tinggi, bukan melahirkan homo sapiens. Bangsa-bangsa muslim pun terjebak dan terpasung dalam arus sekuler ini dan menyelenggarakan pendidikan tinggi. Kita belum mampu menampilkan corak pendidikan alternatif terhadap arus besar high learning yang dominan dalam peradaban sekuler sekarang ini. Prinsip ekonomi yang menjadi pasar sebagai agama baru masih sedang berada diatas angin. Manusia modern sangat tunduk pada agama baru ini. Lihat Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Pengembangan Pendidikan Tinggi Post Graduate Studi Islam melalui Paradigma Baru yang lebih Efektif*, makalah seminar, 1997, 7-8.

¹⁶ Husni Rahim, *Horizon Baru Pengembangan Pendidikan Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2004), 51.

Persoalan internal pendidikan Islam tersebut diatas, diperparah lagi dengan terjadinya proses imrealisme epistemologi Barat terhadap pemikiran Islam. Dunia Barat pada saat ini telah mencaai kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan tersebut mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Tidak dipungkiri, bahwa Barat memberikan sumbangan yang besar terhadap sains dan teknologi modern. Rahasia kemajuan Barat terletak pada pendekatan sains dan epistemologinya. Epistemologi yang dikuasai oleh ilmuan-ilmuan Barat digunakan untuk mewujudkan temuan-temuan baru dalam sains dan teknologi. Epistemologi yang dikembangkan oleh ilmuan-ilmuan Barat itu selanjutnya mempengaruhi pemikiran para ilmuan di seluruh dunia seiring dengan pengenalan dan sosialisasi sains dan teknologi mereka. Epistemologi itu dijadikan acuan dalam mengembangkan pemikiran para ilmuan di masing-masing negara, akhirnya secara praktis mereka terbaratkan pola pikirnya, pijakan berfikirnya, metode berfikirnya, cara mempersepsi terhadap pengetahuan dan sebagainya. Secara sadar atau tidak sadar mereka telah terbelenggu oleh pengaruh Barat. Padahal epistemologi yang sesungguhnya dijadikan sarana penalaran yang bisa mewujudkan dinamika pemikiran, berubah menjadi penyeragaman cara-cara berfikir. Seolah-olah hanya ada satu model berfikir yang mesti diikuti. Kondisi yang semacam ini semakin membuktikan bahwa sesungguhnya telah terjadi proses imrealisme epistemologi Barat terhadap pemikiran masyarakat dunia termasuk Islam.¹⁷

¹⁷ Mujamil Qomar, *Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik* (Jakarta: Erlangga, 2005), 43.



Proses imprealisme Barat terhadap dunia Islam berjalan sangat lambat. Situasi ini merupakan proses penyeleksian ketat dunia Islam dalam mengadopsi akar filosofis epistemologi Barat. Dimana kemajuan epistemologi Barat didasarkan pada paradigma perceraian sains modern (Barat) dan nilai-nilai teologis ini memberikan implikasi negatif. *Pertama*, dalam aplikasinya, sains modern (Barat) melihat alam beserta polanya, termasuk manusia sendiri, hanya secara material dan insidental yang eksis tanpa intervensi Allah. Oleh karena itu manusia bisa memperkosa dan mengeksploitir kekayaan dan tanpa terhitung. *Kedua* secara metodologis, sains modern tidak terkecuali ilmu-ilmu sosial, tidak bisa diterapkan untuk memahami realitas sosial masyarakat muslim yang mempunyai pandangan hidup berbeda dari Barat. Sementara itu keilmuan Islam sendiri yang dianggap bersentuhan dengan nilai-nilai teologis, terlalu berorientasi pada religius dan spiritualitas tanpa memperdulikan betapa pentingnya ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kealaman yang dianggap “sekuler” tersebut.¹⁸

Dengan dalih tersebut diatas serta menjaga identitas keislaman dalam liberalisasi budaya global, para ulama dan ilmuan Muslim bersikap definitif dengan mengambil posisi konservatif-statis, yakni dengan melarang segala bentuk inovasi dan mengedepankan ketaatan fanatik terhadap syari’ah (fiqih produk abad pertengahan). Mereka menganggap bahwa syari’ah (fiqih) adalah karya yang *fixed* dan paripurna, sehingga perubahan dan pembaharuan adalah merupakan bentuk penyimpangan dan setiap penyimpangan adalah terkutuk, sesat dan bid’ah. Mereka merupakan

¹⁸ Umiharso dan Haris Fathoni Makmur; *Pendidikan Islam*, 215.

sumber utama kreativitas yakni ijtihad, bahkan mencanangkan ketertutupannya.¹⁹

Mengapa hal tersebut terjadi? Hal ini tidak lepas dari akar filosofis ke dua dunia tersebut. Jika dipetakan ranah epistemologi masing-masing dunia tersebut adalah dalam epistemologi sekuler hanya didasarkan pada kekuatan akal (rasional) dan empiris semata, sedangkan dalam epistemologi pendidikan Islam pengetahuan tidak hanya didasari oleh dua fakta tersebut, tetapi juga bersumber pada wahyu yang berasal dari al-Qur'an dan as sunnah. Wahyu harus menjadi kualitas tertinggi dari ilmu pengetahuan dasar. Wahyu melindungi akal dari kesalahan dan menyediakan informasi tentang segala sesuatu hal yang tidak bisa dirasa oleh kasat mata mengikat akal tidak bisa memahami secara penuh dunia yang empiris tanpa bantuan, sekaligus wahyu berperan sebagai iman bagi akal. Wahyu yang membimbing, mengarahkan, mengontrol dan memberikan inspirasi terhadap epistemologi. Selain itu, pengetahuan manusia dalam disiplin ilmu juga sangat terbatas, sehingga wahyu diperlukan bagi manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. akal manusia bisa diberdaya dan kecerdasannya pun terbatas dalam menginterpretasikan beragam persepsi. Di sisi lain, manusia tidak bisa mengetahui hal yang tak kasat mata, dimana masa lalu dan masa depan diyakini tidak dapat diketahui.²⁰

Peta akar filosofis yang disebut akhirnya berada pada dua sisi yang saling konfrontatif. Disatu sisi, epistemologi Barat menemukan peradabanya, sedangkan sisi yang lain

¹⁹ A. Khudhori Sholeh, "Mencari Gagasan Islamisasi Ilmu al-Faruqi" dalam *el-Harakah* Vol 57 tahun XXIII, (Desember 2001-Februari 2002), 7.

²⁰ Umiharso dan Haris Fathoni Makmur, *Pendidikan Islam*, 216.



masih mencari titik luncurnya, walaupun titik luncurnya telah terbuka lebar untuk dikaji secara kritis yaitu al-Qur'an dan hadist. Dengan keadaan tersebut, peradaban Barat terus melakukan perubahan dan pembaharuan peradabannya menuju peradaban yang multikompleks dengan sains dan teknologinya, sedangkan umat Islam masih berkuat pada teks normatif bukan pada bagaimana teks itu menjadi peradaban yang multikompleks pula.²¹

Sehingga bisa kita asumsikan bahwa saat ini, pendidikan Islam berada pada posisi determinisme historis dan realisme. Dalam artian bahwa, suatu sisi umat Islam berada pada *romantisme historis* dimana mereka bangga karena pernah memiliki para pemikir-pemikir dan ilmuwan-ilmuan besar dan mempunyai kontribusi yang besar pula bagi pengembangan peradaban dan ilmu pengetahuan dunia serta menjadi transmisi bagi khazanah Yunani, namun disisi lain mereka menghadapi sebuah kenyataan, bahwa pendidikan Islam kini tidak berdaya dihadapkan pada realitas masyarakat industri dan teknologi modern. Hal ini pun didukung dengan pandangan sebagian umat Islam yang kurang meminati ilmu-ilmu umum dan bahkan sampai pada tingkat "diharamkan". Hal ini berdampak pada pembelajaran dan sistem pembelajaran yang masih berkuat atau dalam bahasa Amin Abdullah disebut dengan *hadharah an-nash* (budaya agama yang semata-mata mengacu pada teks), dimana pendidikan hanya bergelut dengan setumpuk teks-teks keagamaan yang sebagian besar berbicara permasalahan fikih saja.²²

²¹ Ibid.

²² Ibid., 217.

Keadaan ini merupakan keadaan tidak harmonisnya antara akal dan wahyu. Umat islam masih banyak yang memandang bahwa akhirat adalah segala-galanya. Sehingga mereka hanya terkesan asyik berkutat pada persoalan-persoalan yang ada kaitanya dengannya. Belajar Logika, filsafat, matematika, kimia, biologi dan sains lainnya hukumnya haram. Sementara belajar fiqih, ushul fiqih, tafsir, ilmu-ilmu agama lainnya wajib dan mulia, disertai keyakinan bahwa hal itu bisa menghantarkan kesurga. Prespektif deskriminatif seperti ini harus segera direformasi, jika umat Islam ingin bangkit dari keterbelakangan dan kebodohan. Masalah ini dapat terselesaikan dengan cara ,engintegrasikan akal dan wahyu menjadi satu kesatuan fungsional dalam proses pendidikan Islam.²³ Sehingga perubahan dan pembaharuan dalam pendidikan Islam akan terus bergulir artinya perubahan merupakan dua sisi yang tidak mungkin dihindari oleh kaum muslimin.²⁴ Dua sisi tersebut akan menjadi bagian integral dari kaum muslimin khususnya pendidikan Islam.²⁵

Oleh karena itu, dalam menghadapi perubahan dan tantangan masyarakat global ada beberapa persoalan mendasar intelektual pendidikan Islam yang harus

²³ Syamsul Ma'arif, *Revitalisasi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 33.

²⁴ Dalam kehidupan masyarakat, sistem pendidikan Islam memiliki fungsi dan peran nyata yang besar. Setiap sistem pendidikan akan selalu dihadapkan dan berada diantara tekanan-tekanan konflik seperti pengaruh tradisi dan tuntunan perubahan terhadap tatanan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini khususnya disebabkan kompleksitas sistem pendidikan. Pendidikan Islam secara fungsional dianut juga untuk dapat menjadi lembaga perubahan sistem sosial, buday dan kemsyarakatan disamping sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan hal inilah yang menyebabkan perubahan pemikiran sistem pendidikan Islam secara bergulir.

²⁵ Umiharso dan Haris Fathoni Makmur, *Pendidikan Islam*, 217.



diselesaikan terlebih dahulu secara tuntas. *Pertama*, harus mengkikis habis warisan sejarah pendidikan Islam yang tidak sesuai dengan gagasan yang dibawa oleh al-Qur'an, berupa persoalan dikotomik pendidikan Islam yang merupakan persoalan pokok dari perkembangan pendidikan Islam selama ini. Pendidikan Islam harus dijauhkan dari dikotomik menuju pada integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga tidak melahirkan jurang pemisah antara agama dan bukan agama. Integrasi tersebut dengan menciptakan seperangkat lunak yaitu kerangka filosofis yang jelas dan baku. Ahmad Syafi'i Ma'arif menyatakan bahwa pendidikan Islam harus dijauhkan dari buaian *hellenisme* yang diberi jubah Islam dan kriteria harus berada pada Muhammad saw. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang pertama kali harus dimiliki adalah kemandirian dalam segala aspek. Dengan kemandirian tersebut, akan melindungi proses pengembangan pendidikan Islam dari berbagai intervensi yang akan menghambat proses pengembangan pendidikan Islam untuk tetap bersiteguh berdiri pada konsep yang murni yaitu dari al-Qur'an dan al-Hadis untuk memperdayakan bangsa yang mayoritas penduduknya muslim.²⁶

Kedua, perlu pemikiran kembali tujuan dan fungsi lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya berorientasi atau memenuhi kebutuhan keinginan kepentingan akhirat saja dengan mengajarkan keterampilan beribadah saja. Hal itupun, masih dirasakan apabila pendidikan Islam "dipandang dari dimensi ritual masih jauh dalam memberikan pengayaan

²⁶ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Pendidikan Islam dan Proses Pemberdayaan Industrialisasi* (Yogyakarta: Aditya Media dan Fakultas Tarbiyah UII, 1997), 67.

spiritual etika dan moral.²⁷ *Ilahiyah*, memang diakui bahwa peserta didik secara verbal kognitif dapat memahami ajaran Islam dan keterampilan dalam melaksanakannya (psikomotorik), tetapi kurang menghayati (efektif) kedalam maknanya. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus menjadikan pendidikannya tersebut sebagai tempat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama (*spiritual ilahiyah*), ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan atau kemahiran, seni dan budaya serta etika dan moral *ilahiyah*.²⁸

Selain persoalan tersebut, pendidikan Islam sekarang ini juga diharapkan pada persoalan-persoalan yang cukup kompleks, yakni persoalan reformasi dan globalisasi menuju masyarakat Indonesia baru. Tantangan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana upaya untuk membangun paradigma baru pendidikan Islam, visi, misi dan tujuan yang didukung dengan sistem kurikulum atau materi pendidikan, manajemen dan organisasi, metode pembelajaran untuk dapat mempersiapkan manusia yang berkualitas, bermoral tinggi dalam menghadapi perubahan masyarakat global yang begitu cepat, sehingga produk pendidikan Islam tidak hanya melayani dunia modern, tetapi mempunyai pasar baru atau mampu bersaing secara kompetitif dalam dunia masyarakat modern, global dan informasi. Perubahan yang perlu dilakukan dalam pendidikan Islam yaitu.

1. Membangun sistem pendidikan Islam yang mampu mengembangkan sumber daya yang berkualitas agar mampu mengantisipasi kemajuan IPTEK untuk

²⁷ A. Malik Fadjar, *Reformasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), 52.

²⁸ Umiharso dan Haris Fathoni Makmur, *Pendidikan Islam*, 219.



menghadapi tantangan dunia global menuju masyarakat Indonesia yang dilandasi dengan nilai-nilai *ilahiyyah*, kemanusiaan (*insaniyyah*), dan masyarakat serta budaya.

2. Menata manajemen pendidikan Islam dengan berorientasi pada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) agar mampu menyerap aspirasi masyarakat, dapat mendayagunakan potensi masyarakat, dan daerah (otonomi daerah) dalam rangka menyelenggarakan pendidikan Islam yang berkualitas.
3. Meningkatkan demokratisasi penyelenggaraan pendidikan Islam secara berkelanjutan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat menggali serta mendayadunakan potensi masyarakat.²⁹

B. Kesadaran Paradigmatik membangun pendidikan Islam Holistik-Integralistik

Pendidikan merupakan term terpenting dan menentukan dalam perubahan masyarakat. bahkan Islam sendiri menempatkan pendidikan dalam posisi vital. Bukan sebuah kebutuhan jiwa dalam lima ayat pertama dimulai dengan perintah membaca. Tak heran jika dalam syair yang dikembangkan nabi Muhammad dilakukan dengan pendekatan pendidikan.³⁰

Gagasan utama pendidikan, termasuk pendidikan Islam terletak pada pandangan bahwa setiap manusia mempunyai nilai positif tentang kecerdasan, daya kreatif dan keseluruhan budi. Namun, fokusnya bukan semata kemampuan ritual dan keyakinan tauhid tetapi juga akhlak sosial dan kemanusiaan.

²⁹ Ibid., 220.

³⁰ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 2001), 4-5.

Kualitas akhlak pun tak bisa dicapai hanya dengan doktrin halal-haram, tetapi usaha budaya dirumah, masyarakat dan kelas.³¹

Tuhan yang meruakan fokus tertinggi dari kehidupan beragama tetap dipahami menjadi basic dalam segala bentuk kehidupan. Ia semestinya dimaknai sebagai bagian universal yang bersifat transenden. Ia merupakan titik esoteris (batiniyah) yang dimiliki masing-masing agama, biarpun dalam sisi eksoteris Tuhan memberikan pesan-pesan untuk kelompok-kelompok yang berbeda. Namun perlu dipahami pula, bahwa pesan-pesan Tuhan yang disampaikan dalam perbedaan dimensi ruang dan waktu tersebut mempunyai kesamaan dalam term besar, iman kepada sesuatu yang transenden (Tuhan) dan menjada sisi-sisi kemanusiaan sebagai bagian dari urusan agama.

Sementara itu realitas menunjukkan keadaan masyarakat yang ditentukan oleh paradigma-paradigma dalam kehidupan mereka, ada tig aparadigma yang berpengaruh dalam dunia pendidikan. *Pertama*, paradigma konservatif. Pemahaman yang dipai dalam paradigma ini menganut pada satu ketentuan searah. Fenomena dipahami sebagai satu keharusan yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam bentuknya yang klasik terdapat keyakinan bahwa masyarakat tidak bisa merencanakan perubahan atau mempengaruhi perubahan sosial, hanya Tuhan yang dapat melakukan menentukan perubahan. Namun pada masa selanjutnya, paradigma ini lebih menekankan pada pelestarian taradisi

³¹ Abdul Munir Mulkhan, "Humanisasi Pendidikan Islam" dalam *Hamami* Zada., dkk jurnal Tashwirul Afkar Edisi No. 11 Tahun 2001, 17.



serta kebudayaan yang ada, tanpa mengurangi, mengkritik, memperbaiki apalagi merubahnya.³²

Kedua, paradigma liberal. Di tingkat ini, pemahaman tentang fenomena sosial termasuk perubahan yang ada di dalamnya lebih dikarenakan usaha-usaha yang dilakukan manusia. Secara individu yang kemudian akan menciptakan suatu tatanan baru yang penuh kompetisi sehingga dinamis dalam masyarakat. karenanya dalam aliran liberalisme ini, *structural fungsionalism*, pendidikan lebih diutamakan sebagai penstabilan norma dan nilai masyarakat. namun pendidikan ditingkat ini masih dianggap sebagai a-politis. Artinya, pendidikan tidak digunakan sebagai upaya untuk membangun suatu tatanan masyarakat secara struktur global. Dalam pandangannya Excellence (keunggulan) adalah hal utama dalam pendidikan bukan yang lain. Sehingga tidak heran, jika dalam dimensi ini prestasi individu untuk mengangkat derajat material (material oriented dalam pendidikan). Maka, jika nanti ada suatu orang atau kelompok yang merasa terdeskriminasi atau kalah bersaing, dipandang merupakan kesalahannya sendiri.³³

Ketiga, paradigma kritis. Pendidikan dalam paradigma ini dipahami sebagai arena perjuangan politik. Artinya, struktur masyarakat dalam sebuah negara dapat diukur dan diubah melalui pendidikan. Atau dengan kata lain, pendidikan adalah sebagai alat politik. Tujuan yang hendak dicapai oleh aliran ini adalah menghendai adanya ruang kritis secara bebas terhadap struktur sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. dalam perspektif kritis, pendidikan diarahkan

³² Umiharso dan Haris Fathoni Makmur, *Pendidikan Islam*, 221-222.

³³ *Ibid.*, 222.

untuk mengurus tindakan kritis terhadap the dominant ideology, menuju transformasi sosial.³⁴

Penggunaan paradigma inilah yang menjadi pijakan dasar dalam melakukan perubahan. Kesadaran bahwa realitas sosial tidak terbentuk secara tiba-tiba akan tetapi akibat dari sebuah skenario dari penguasa. Kebijakan-kebijakan yang dibuat lembaga negara sebagai manifestasi penguasa wilayah seringkali dibuat demi kepentingan penguasa bukan diorientasikan pada rakyat.

Di sisi lain, peran negara pun tidak serta merta muncul tanpa ada peran pihak lain. Ada peran modal/pasar yang mempunyai kepentingan ekonomi dan kebijakan dan skenario itu. Sementara ia butuh perluasan pasar, negara membutuhkan modal untuk melaksanakan kebijakan dan melenggangkan kekuasaan. Sehingga pada tahap selanjutnya terjadi persenggaman modal dan kekuasaan.³⁵ Manifestasi dari persenggaman ini adalah paradigma pendidikan liberal seperti pemaparan diatas. Individualisme, konsumerisme, kompetisi telah meniscayakan sukses sendiri dalam masyarakat. sikap eksklusif dengan membesar-besarkan perbedaan lebih ditonjolkan dalam interaksi sosial. Tak heran jika kerap terjadi kerusuhan dan konflik dalam masyarakat, sementara pihak

³⁴ Ibid., 222-223.

³⁵ Relasi pasar dan negara ini tak selamanya seiring sejalan. Diera liberalisme, dengan tokohnya Adam Smith, negara dianggap kurang accountable dalam mengurus ekonomi, sehingga peran negara pada saat ini dikurangi dan di titik beratkan pada swasta. Sedangkan pada era sesudahnya, terjadi krisis sehingga peran kapitalis hancur, sementara praktek eksploitasi ekonomi tetap berlangsung dan perannya diganti oleh kaum feodal. Pada sekitar penghujung tahun 70-an, muncul gerakan neo-modernisme yang hampir sama dengan liberalisme, membentuk relasi pasar-negara. Lihat Mustafied., dkk. *Pendidikan Kritis Transformatif* (Jakarta: PB PMII, 2001), 39-40.



lain mengambil kesempatan untuk menuai hasil. Pendidikan Islam, pada posisi demikian ini semestinya diarahkan untuk membangun keterlibatan aktif dengan kelompok lain untuk bertoleransi, memahami serta membangun dan memperkaya keragaman dalam komunitas global adalah pengertian pluralisme yang lebih mendalam.³⁶

Dalam perkembangannya, pendidikan pluralisme (atau sebagaimana orang menyebutnya pendidikan multikultural) inipun tidak seluruhnya bersifat netral. Pendidikan pluralisme, menurut Nur Kholik Ridwan, bisa jadi hanya menjadi dalih dominasi kelompok untuk membangun lanskap netralis nilai dan membawa publik pada pencerapan kolektif hidup berdampingan yang tidak diperjelas persoalan-persoalan dasarnya. Moralitas yang dibangun hanya menjadi upaya pembungkaman oleh kelompok dominan (*borjois*) untuk melakukan penindasan.³⁷

Untuk itu Ainurrofiq Dawam memberikan kerangka orientasi pendidikan pluralisme atau pendidikan multikultural agar pendidikan tersebut tidak kehilangan arah dan bangunan berdasarkan orientasi nilai dasar multikulturalisme.³⁸ Yaitu, *pertama*, orientasi kemanusiaan. Kemanusiaan atau humanisme merupakan sebuah nilai kodrati yang menjadi landasan sekaligus tujuan pendidikan. Kemanusiaan bersifat universal, global, diatas semua suku, aliran, ras, golongan

³⁶ Muhammad Ali, *Teologi-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalinkan Kebersamaan* (Jakarta: Buku Kompas, 2003), 36.

³⁷ Nur Khalik Ridwan. *Detik-Detik Pembongkaran Agama* (Yogyakarta: CV. Aruuz Book, 2003), 268.

³⁸ Ainurrafiq Dawam, *Emoh Sekolah: Menolak Komersialisme Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual Menuju Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Inspeal Ahimasakarya Press, 2003), 104-105.

dan agama. Dengan demikian institusi pendidikan yang dibangun pun tidak bersifat eksploratif, dominasi, kompetisi sebeb-asbebnya. Orientasi yang demikian menunculkan manusia yang humanis tanpa kehilangan jati diri.³⁹

Kedua, orientasi kebersamaan. Kebersamaan kooperatif merupakan sebuah silai yang sangat mulia dalam masyarakat yang plural dan homogen. Kebersamaan yang dibangun adalah kebersamaan yang sama sekali lepas dari unsur kolusif maupun korusif. Kebersamaan yang dibangun adalah kebersamaan yang tidak merugikan diri sendiri, orang lain, lingkungan, negara, bahkan Tuhannya. Dengan demikian harapkan muncul manusia yang aktif, kreatif, toleran, tenggang rasa yang mendalam dan terbuka.

Ketiga, oreintasi keajahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud disini adalah kondisi sosial yang menjadi harapan semua orang. Konsistensi terhadap kesejahteraan harus dibuktikan dengan perilaku menuju terciptanya kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud bukan terjebak dalam pemenuhan kebutuhan materi yang berlebih dan sama banyak oleh semua orang. Melainkan yang menjadi orientasi adalah masyarakat secara sadar dan tidak dipaksa mengatakan bahwa dirinya telah sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar, dihargai dan diakui oleh orang lain. Konsekwensi yang kemudian terjadi adalah adanya kedamaian dimana semua orang merasa aman, dihargai, diakui dan diperlakukan sebagai manusia oleh semua pihak yang berinteraksi secara langsung atau tidak langsung.

³⁹ Umiharso dan Haris Fathoni Makmur, *Pendidikan Islam*, 224.



Keempat, orientasi proposional. Proposional merupakan sebuah nilai yang dipandang dari aspek apapun adalah sangat tepat. Tepat landasan, tepat proses, tepat pelaku, tepat ruang, tepat waktu, tepat anggaran, tepat kualitatif dan tepat kuantitatif serta tepat pada tujuan. Ketetapan disini tidak diartikan sebagai ketetapan yang bersifat rigid dalam arti bahwa hanya menggunakan salah satu pertimbangan, misalnya pertimbangan kualitas intelektual atau kuantitasnya, melainkan ketetapan yang dituju dari semua sudut pandang, khususnya yang bersifat langsung dengan nilai proposional. Orientasi pendidikan inilah yang diharapkan menjadi pilar pendidikan multikultural.

Kelima, orientasi yang mengakui pluralitas dan heterogenitas. Pluralitas dan heterogenitas merupakan sebuah kenyataan yang tidak mungkin ditindas secara fasih dengan memunculkan sikap fanatisme terhadap sebuah kebenaran yang diyakini oleh semua orang.

Keenam, orientasi anti hegemoni dan anti dominasi. Dominasi dan hegemoni adalah dua istilah yang sangat populer bagi kaum tertindas. Istilah ini dihindari jauh-jauh oleh para pengikut paham liberalis, kapitalis, globalis dan neoliberalis. Hegemoni yang dimaksud adalah hegemoni dalam segala bidang kehidupan.⁴⁰

Keenam kerangka tersebut akan menjadi bagian krusial dalam membangun pendidikan Islam yang berwawasan global dengan watak pluralis sebagai ciri khas dari masyarakat modern. Akan tetapi, upaya membangun pendidikan Islam berwawasan global bukanlah persoalan mudah, karna pada

40 Ibid., 224-225.

waktu bersamaan pendidikan Islam harus memiliki kewajiban untuk melestarikan, menanamkan nilai ajaran-ajaran Islam dan dipihak lain berusaha untuk menanamkan praktek budaya nasional Indonesia dan budaya global. Namun upaya untuk membangun pendidikan Islam yang berwawasan global dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang terencana dan strategis. Misalnya saja, bangsa Jepang tetap merupakan satu contoh bangsa yang menggelobal dengan tanpa kehilangan karakternya sebagai suatu bangsa yang maju dengan tetap kental dengan nilai-nilai tradisis dan nilai-nilai religius.⁴¹ Dari pandangan ini, tergambarlah bahwa peranan pendidikan sangatlah sentral dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa mengalami pergeseran, sementara “sistem sosial, politik dan ekonomi bangsa selalu menjadi penentu dalam penetapan dan pengembangan peranan pendidikan”.⁴²

⁴¹ Meskipun saat sekarang “konsep *nationalstate* mulai diragukan, dan diganti dengan *nelfare state* bahkan *global state* yang tidak lagi mengenal tanpa batas (*borderless*) karena kemajuan teknologi informasi, tetapi pembinaan karakter nasional tetap relevan dan bahkan hasus dilakukan”. Lihat Fasli Jalal, *Revormasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita, 2001), 18.

⁴² *Ibid.*, 6.



BAB II

DEMOKRASI PENDIDIKAN

A. Pendahuluan

Paradigma pendidikan mestinya menjadi orientasi kepemimpinan sosial nasional, sehingga pendidikan demokrasi dan demokratisasi pendidikan di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan harapan, seperti dikatakan oleh Masdar F. Mus'udi tokoh muda NU, tidak bisa berhenti pada bentuknya yang bersifat *formal-prosedural*, melainkan dilanjutkan ada level *material-substansial*.¹

Pendidikan Islam sebagaimana hasil rumusan para sarjana muslim pada Konferensi Dunia Pertama tentang pendidikan Islam di Mekah pada tahun 1977. Kongres tersebut merumuskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah sebagai berikut.

Merealisasikan cita-cita (Idealisme) Islami yang mencakup pengembangan kepribadian Muslim yang bersifat menyeluruh secara harmonis, berdasarkan potensi psikologis dan fisiologis (jasmaniah) manusia yang mengacu pada keimanan dan sekaligus ilmu pengetahuan secara

¹ Jamil Sahrani, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: CV Afrino Raya, 2011),

berkesinambungan, sehingga terbentuklah manusia Muslim paripurna yang berjiwa tawakal (menyerahkan diri) secara total kepada Allah SWT, sebagaimana firman-Nya: “Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah Tuhan semesta Alam” (QS Al-An’am [6]: 162).²

Di sini dapat dipahami bahwa tujuan akhir dari pendidikan Islam sejatinya adalah Allah, Sang Pendidik Pertama, yang menjadi pusat untuk mendidik, mengontrol dan membimbing manusia. Maka, tema kemerdekaan dan pembebasan dalam konsepsi pendidikan Islam adalah memotivasi semua aspek manusiawi untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan yang berujung pada penyerahan diri secara mutlak kepada Allah. Penyerahan diri tersebut terjadi pada tingkat individu, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya.³ Dengan demikian, seseorang akan mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

Demi mewujudkan hal tersebut, pendidikan seyogyanya memberikan jalan bagi pertumbuhan manusia dalam segala aspek secara spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, linguistik baik secara individual maupun secara kolektif, disamping memotivasi semua aspek tersebut kearah guru-guru agama jangan hanya mengajarkan Islam formal, tetapi semangat bekerja, semangat belajar, dan semangat berusaha untuk mencapai cita-cita serta harapan masa depan, juga dipandang perlu ditanamkan kepada para siswa, agar mereka

² Haryanto Al-Fandi, *Desain Pembelajaran yang Demokratis dan Humanis* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 149.

³ Ibid.



menjadi remaja dan generasi optimis menghadapi tantangan masa depan.

Identitas bangunan pendidikan Islam berdasarkan realitas sosial yang dipraktikkan Rasulullah dengan demokrasi, tidak ada perbedaan, semua memiliki peluang yang sama. Demokratisasi pendidikan mengharuskan dibangunnya fondasi kependidikan melalui rumusan prinsip-prinsip kebebasan individu (*individual freedom*) dan kebebasan akademik (*academic freedom*). Setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran tanpa dibedakan atas sertifikasi sosial, apakah ia berada pada kelas bawah (*under class*), kelas menengah (*middle class*), ataupun kelas atas (*high class*). Setiap individu mempunyai hak otonomi untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya melalui bidang pendidikan.⁴

B. Makna Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos* yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi mengandung arti kebebasan, dan menegakkan kedaulatan rakyat agar dapat mengembangkan potensi di segala aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan, agar dilaksanakan secara optimal. Substansi demokrasi adalah terwujudnya asas kesederajatan dan kebersamaan.

Dalam pandangan para sufi demokrasi dipahami sebagai enciptaan terhadap kebebasan (*tahurriyah*) persamaan hak, kebersamaan dan penekanannya adalah kedamaian umat secara makro sehingga terwujudnya pluralisme diatas multikultural.

⁴ Jamil Sahroni, *Filsafat Pendidikan*, 78.

Demokrasi berpretensi memberikan kebebasan berkehandak, berkeyakinan, dan kebebasan mengeluarkan pendapatnya di ruang publik (*public sphere*). Dengan demikian demokrasi memiliki makna toleran dan mampu membuka ruang seluas-luasnya bagi eksistensi agama-agama.

Demokrasi dalam arti sekuler cenderung menghilangkan sudut pandang moral yang murni, meskipun berprestasi memberikan keseimbangan antara ruang private dan ruang publik, namun dalam praktiknya memiliki wilayah otoritatif yang cenderung sekuler, sehingga demokrasi memandang agama sebagai sesuatu yang berbahaya, tatkala agama ditafsirkan dan dijadikan alat politik untuk mempertahankan status dan zona nyaman sekelompok orang atau negara.

Telah banyak contoh bagaimana kemudian demokrasi tidak mampu menunjukkan wajah otentiknya yang humanis dan egaliter, bahkan Amerika Serikat yang merepresentasikan dirinya sebagai negara demokrasi terbesar malah banyak menimbulkan bala bencana bagi negara-negara dunia ketiga termasuk negara muslim.

Dengan melihat perbedaan makna demokrasi, maka sangat bermoral bila demokrasi dilihat dari segi esetoris atau diterjemahkan dengan makna demokrasi spiritual (*spiritual democracy*). Konsep ini dipahami bahwa spiritualitas dipandang memiliki kesamaan sebagai aspek yang dinamis bagi manusi (*ego*), sehingga demokrasi spiritual atau demokrasi esetoris berprestasi memberikan jaminan bagi semua pihak atau mengembangkan dan menunjukkan eksistensinya sebagai manusia.⁵

⁵ Ibid.



1. Legalitas demokrasi pendidikan

Pada dasarnya setiap individu bangsa memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menuntut pendidikan. Pandangan ini telah mendapat pengakuan dan legalitas amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Dalam hal ini, seluruh komponen bangsa yang mencakup orang tua, masyarakat, dan pemerintah, memiliki kewajiban dan beban tanggung jawab yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses pendidikan.

Mengenai tanggung jawab pemerintah, secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam kerangka mencerdaskan kehidupan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Keharusan pemerintah dalam amanat ini adalah mengupayakan agar hasil pendidikan dapat menciptakan lulusan yang memiliki moral berwibawa spiritual dan kecerdasan jujur berlandaskan keimanan dan ketakwaan.

Terkait dengan persyaratan tersebut, sejak tanggal 8 Juli 2003 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan Undang-Undang No.2 Tahun 1989 yang dianggap sudah tidak memadai lagi. Pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional dilakukan untuk memperbarui visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tersebut secara

tegas memperkuat tentang amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan. Secara teoritis kedua ayat tersebut, telah cukup menggambarkan makna demokrasi dibidang pendidikan yakni adanya peluang bahkan dalam batas tertentu diberikan kebebasan, kepada sluruh komponen bangsa untuk mendapatkan dan menyelenggarakan pendidikan sesuai minat dan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan tuntunan kebutuhan lapangan kerja. Hal ini megisyaratkan kesadaran tentang intervensi berlebihan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan perlu dikurangi atau setidaknya ditinjau kembali pada hal-hal yang tidak relevan.

Berkaitan dengan masyarakat belajar (*learning society*) perlu diberikan kebebasan kepada msyarakat untuk dapat memilih bidang ajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya sejauh tidak bententangan dengan ketentuan undang-undang dan falsafah negara. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan prinsip belajar seumur hidup yang diisyaratkan oleh hadis nabi.⁶

2. Demokrasi pendidikan

Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa secara substansial demokratisasi pendidikan mempunyai makna sebagai hak setiap warga negara atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk menikmati pendidikan. Dimaksudkan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan dalam mengikuti pendidikan tidak didasrkan atas diskriminasi tertentu. Kondisi ini sesuai dengan bunyi pernyataan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2002 pasal 4 Tahun 2003 pasal 4 ayat (1)

⁶ Ibid., 79.



bahwa: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur dan kemajemukan bangsa. Kehidupan demokrasi di bidang pendidikan merupakan tindakan menghargai keberagaman potensi individu yang berbeda dalam kebersamaan".

Demokratisasi pendidikan bukan hanya sekedar prosedur, melainkan nilai-nilai pengakuan dalam kehormatan dan martabat manusia. Melalui upaya demokrasi pendidikan, diharapkan mampu mendorong munculnya individu yang keratif, kritis dan produktif dengan berpijak pada keilmuan akhlak tanpa harus mengorbankan martabat diri.

Pada kenyataan ditemui adanya perbedaan perlakuan terhadap masyarakat atas hak-hak tersebut dalam menikmati pendidikan. Ada dua kenyataan perlakuan kepada masyarakat dalam menyikapi pendidikan, yakni bersifat terbuka berdasarkan kemampuan akademik dan ikhtiar pribadi, sedangkan lainnya bersifat tertutup yaitu bentuk lembaga pendidikan berdasarkan golongan atau keturunan. Dengan adanya demokratisasi pendidikan, maka dengan sendirinya secara prinsip akan lebih memenangkan akan bersifat terbuka, sehingga setiap warga negara dalam menikmati pendidikan tidak lagi didasarkan *ashabiyah* atau kelompok tertentu yang memiliki uang dan atau kekuasaan.

Perkembangan global yang salah satunya ditengarai oleh berkembangnya bagi industrialisasi, perkembangan ekonomi, dan informasi yang demikian cepat memiliki pengaruh besar terhadap munculnya kategori kelompok-kelompok lapisan masyarakat. Era industrialisasi yang dibarengi dengan

gencarnya informasi mendorong kemunculan persepsi *knowlwdge is power*. Kebutuhan terhadap pendidikan juga semakin bervariasi, baik bersifat formal maupun nonformal, dengan penyelenggara yang beraneka ragam. Pusat-pusat informasi, baik melalui media elektronik maupun media cetak dari dalam dan luar negeri dengan mudah dapat diperoleh. Hal ini menjadi sangat penting ketika menyangkut akses, alokasi serta distribusi sumber-sumber informasi bagi masyarakat umum. Masalahnya, terletak bukan pada siapa saja yang mempunyai akses terhadap sumber informasi, melainkan juga adakah mekanisme yang demokratis bagi para anggota masyarakat untuk memiliki akses terhadap sumber informasi. Kebutuhan akan hal ini sangat penting dan mendesak, karena seperti kata Drucker yang mengatakan bahwa kita mengetahui bahwa *knowledge workers* tidak hanya menjadi *leaders* tetapi juga *rules* yang mempengaruhi *the forces of change*.

Mely G. Tan, berpendapat bahwa terbentuknya lapisan masyarakat yang “cukup tahu” berkat akses informasi yang dimilikinya, mengakibatkan munculnya tuntutan-tuntunan menyangkut berbagai kebebasan yang berhubungan dengan kualitas hidup. Termasuk juga tuntutan agar dihapusnya berbagai bentuk monopoli ekonomi yang keterbukaan dalam kehidupan berpolitik. Proses semacam ini menuntut adanya relasi kemasyarakatan yang demokratis.

Secara esensial salah satu tanggung jawab dari pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional dalam transformasi sosial yang tengah berlangsung adalah menanamkan dan mengoperasionalkan etos, nilai, dan moralitas bangsa dalam



menerima dan mengelola informasi yang silih berganti menjadi aset dalam meningkatkan kualitas dirinya. Dalam desain pembelajaran secara eksplisit, membuka peluang secara lebar terhadap penggunaan kemampuan nalar dalam mengelola dan mengambil keputusan terhadap perubahan yang dihadapi yang semuanya tersaji dalam bentuk integralistik dalam pendidikan, sehingga menjadikan *knowledge people have to learn to take responsibility*.⁷

C. Mengembangkan kebijakan pendidikan yang demokratis

Peran negara dalam bidang pendidikan di negara demokrasi seharusnya bersifat akomodatif terhadap kepentingan warga negaranya di bidang pendidikan. Namun, peran negara di bidang pendidikan bisa saja dilaksanakan dalam rangka melegetisasi dan mempertahankan ststus-quo. Upaya ini biasanya dilakukan merasuk dalam sistem pendidikan dalam hidden kurikulum. Atau menurut Michel W. Apple politik kebudayaan suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikan.⁸

Pada era reformasi dan globalisasi dewasa ini, ada kecendrungan kekuasaan negara melemah didesak oleh kekuasaan ekonomi. Indikasinya bisnis pendidikan mulai dirasakan. Maraknya pembukaan program eksistensi atau nonreguler di PTN (Perguruan Tinggi Negeri) ada kecenderungan untuk memperoleh dana ketimbang untuk demokratisasi pendidikan, sehingga pendidikan semakin elitis. Membesarnya pungutanbiaya yang relatif tinggi tampaknya belum diikuti dengan peningkatan mutu

⁷ Ibid., 80.

⁸ Tilaar H.A.R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 145.

pendidikan. Karena, nuansa bisnisnya semakin menguat, maka orang pun mulai mempertanyakan eksistensi lembaga pendidikan sebagai lembaga pelayanan publik.

Fenomena lain berbagai gedung pendidikan beralih menjadi pusat bisnis. Meskipun pemerintah dikritik, bahkan didemo oleh masyarakat yang keberatan, namun pada kenyataannya kebijakan itu tetap berlangsung. Pemerintah dalam hal ini tampak tidak berdaya menghadapi para pemilik modal.

Masalah mahalnya pendidikan antara lain disebabkan kurang adanya komitmen dari pemerintah dari partai politik untuk memprioritaskan bidang pendidikan. Ini terlihat dari anggaran pendidikan yang sangat minim. Negara sebagai penanggungjawab utama pendidikan nasional seharusnya menyediakan fasilitas pendidikan yang realistik dan memadai. Secara normatif dalam sejarah pernah ada kebijakan negara yang mengamanatkan anggaran pendidikan 25% dari APBN (Tap. MPRS No. XXVII/MPRS/1966). Begitu pula pada era reformasi, UUD 1945 mengamatkan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Dalam kenyataan empirik, dana pendidikan dewasa ini diperkirakan hanya 4% dari APBN. Ironisnya DPR sebagai elit wakil rakyat dan partai politik yang dianggap gerbong aspirasi tidak bergerak sedikit pun, bahkan tidak ada yang memperotes akan hal itu.

Pemerintah Indonesia hingga kini belum memiliki *political will* dengan memprioritaskan pendidikan untuk memperbaiki ekonomi dan sumber daya manusia. Pemerintah belum menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan tinggi merupakan kunci terpenting dalam pengembangan ekonomi



secara global. Akumulasi penguasaan pengetahuan dapat terjadi keunggulan kompetitif suatu negara. Dimana negara maju, investasi di bidang penelitian dan pengembangan (litbang) bisa mencapai 85% dari total anggaran litbang seluruh dunia. Di India, Brazil, China dan negara-negara Asia Timur lainnya, mempunyai anggaran litbang mencapai 11% dari total anggaran litbang dunia.

Begitu pula dewasa ini partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan mulai cenderung memiliki orientasi bisnis yang kuat. Tidak mudah mereka yang berada pada level menengah ke bawah bisa menikmati pendidikan di sekolah swasta. Partisipasi masyarakat untuk menuntaskan wajib belajar pun masih memprihatinkan. Misalnya bisa dilihat indikatornya masih banyak usia wajib belajar belum memperoleh pendidikan. Pada tahun 2004 menurut Depdiknas dari 13 juta anak usia 13-15 tahun atau usia SMP yang belum tertampung masih sekitar 2,5 juta anak. Pendidikan alternatif program paket belajar belum mampu mengatasi anak yang belum tertampung. Karena baru sekitar 245.000 yang terlayani melalui 12.871 TKB (Tempat kegiatan Belajar) dibawah naungan 2.870 sekolah. Kondisi ini masih diperparah sekitar 97% pelajar SMP terbuka, tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan faktor ekonomi atau tidak adanya sekolah lanjutan di tempat tinggal mereka.

Mochtar Bukharo salah seorang pakar pendidikan Indonesia menilai “kebijakan” pendidikan kita tidak pernah jelas. Pendidikan kita hanya melanjutkan pendidikan elite dengan kurikulum elits yang hanya bisa ditangkap oleh

30% anak didik, sedangkan 70% lainnya tidak bisa mengikuti. Padahal kondisi daerah Indonesia dilihat dari sisi SDM-nya sangat kompleks. Maka tidak mengherankan apabila banyak terjadi kejangkalan, misalnya daerah yang SDA-nya tinggi tetapi SDM-nya rendah. Papua, Kalimantan Tengah dapat dijadikan contoh pada kasus ini. Kondisi ini semakin mempersulit mewujudkan pendidikan yang egalitarian dan SDM yang semakin merata di berbagai daerah. Kesenjangan diatas, apabila tidak segera dilakukan kebijakan pendidikan yang jelas orientasinya dapat memicu disintegrasi. Orientasi kebijakan pendidikan yang diperkirakan dapat memperkuat integrasi nasional adalah peningkatan mutu SDM dan pemerataannya di daerah. Pengembangan SDM, menjadi kebutuhan mendesak, karena dibandingkan dengan negara tetangga masih rendah.⁹

D. Pendidikan demokrasi dalam rangka integrasi bangsa

John Dewey adalah filosof pendidikan yang melihat hubungan erat antara pendidikan dan demokrasi. Dewey mengatakan bahwa apabila berbicara mengenai demokrasi berarti memasuki wilayah pendidikan. Pendidikan merupakan sarana bagi tumbuh dan berkembangnya sikap demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan negara yang demokratis.¹⁰

Pendidikan demokratis sebagai upaya sadar untuk membentuk kemampuan warga negara berpartisipasi serta bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting. Kemampuan partisipasi politik

⁹ Jamil Sahroni, *Filsafat Pendidikan*, 82.

¹⁰ Tilaar H.A.R. *Paradigma*, 145.



warga negara diperlukan agar demokrasi bisa berkembang secara maksimal. Sebab jika hanya mempercayakan kepada para pelaku dalam sistem politik dirasa kurang efektif. Lebih-lebih dewasa ini ada kecenderungan melemahnya moralitas publik di kalangan pejabat publik (politisi). Melemahnya moralitas publik ditandai dengan merebaknya “demokratisasi korupsi”¹¹

Menurut Zamroni, pendidikan demokrasi sangat menekankan pengembangan keterampilan intelektual (*intellectual skill*), keterampilan pribadi dan sosial (*personal and social skill*). Keterampilan intelektual menekankan pengembangan kritis pada siswa. Selama ini tampak ditekankan pada kegiatan mengakumulasi atau menabung pengetahuan sebanyak mungkin kepada siswa (*knowledge deposit*).

Pada masa lalu, pendidikan demokrasi di negara kita dianggap tidak berkembang. Hal ini dicontohkan pada kasus PPKn/PKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau Pendidikan Kewarganegaraan). PPKn (versi *Civic Education* Indonesia) dikembangkan secara indoktrinasi, mengakumulasi pengetahuan yang kurang bermakna, bersifat hegemoni dan sering dikritik anti realitas. Nilai-nilai pluralisme yang seharusnya menjadi peran dalam PPKn diabaikan. PKn yang seharusnya dikembangkan sebagai materi pendidikan untuk membentuk karakter bangsa terlupakan. Sebagai pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter bangsa, seharusnya PKn menerapkan pendekatan pendidikan multikultural (proses transformasi cara hidup menghormati, toleran terhadap keanekaragaman

¹¹ Jamil Sahroni, *Filsafat Pendidikan*, 82.

budaya yang hidup dalam masyarakat yang plural), tetapi pada praktiknya juga dikesampingkan.

Lebih-lebih dewasa ini dengan dikembangkannya otonomi daerah di bidang pendidikan, maka peran PKn seharusnya menjadi sangat strategis. Karena otonomi daerah di bidang pendidikan berarti “Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab daerah tetapi juga merupakan refleksi dari identitas daerah atau budaya daerah dalam rangka pembinaan kesatuan atau persatuan nasional”.¹²

Ketika Indonesia menjadi negara merdeka, proses menjadi bangsa Indonesia terus berlangsung (masih dalam proses pembentukan). Penduduk Indonesia baru merupakan sejumlah kelompok etnis dan ras tertentu, sehingga tidak mengherankan dalam perjalanannya sebagai negara merdeka, NKRI sering dihadapkan pada terjadinya konflik sosial dan gerakan seperatis yang sangat potensial menimbulkan disintegrasi bangsa. Pada kondisi negara yang demikian “Bangsa itu tidak akan terbentuk ketika telah ada kesepakatan bentuk partisipasi politik dengan rezim politik (konstitusi) yang hendak dikembangkan”.¹³ Kesepakatan ini mulai menemukan bentuknya pada era reformasi ini. Pengembangan PKn ke depan sebagai pendidikan demokrasi (seperti tampak pada kurikulum 2004), tidak hanya sebatas mengembangkan warga negara yang demokratis, tetapi juga hendak mengembangkan pemberdayaan warga negara (*citizen empowerment*), memfungsikan pendidikan multikultural, memperkokoh nasionalisme dengan memperkenalkan pendekatan *political nation* untuk melengkapi pendekatan

¹² Tilaar H.A.R. *Paradigma*, 182-183

¹³ Jamil Sahroni, *Filsafat Pendidikan*, 83.



lama yakni *cultural nation*, pendidikan demokratis melalui PKn difokuskan pada peletakan dasar yang kokoh bagi perkembangannya *civil society* sebagai basis negara demokrasi.

Berbagai kasus korupsi di kalangan pejabat publik, baik dipusat maupun di daerah, mencerminkan lemahnya moralitas publik. Padahal moralitas publik merupakan prekat bangsa. Karena pada moralitas publik, kewenangan membuat dan melaksanakan kebijakan, kewenangan mengalokasikan anggaran, proyek, jabatan, pelayanan publik, pengadaan dan penggunaan aset pemerintah harus diperuntukkan bagi kepentingan publik, untuk semua warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam kondisi berpolitik tersebut, maka pendidikan demokrasi telah kehilangan referensi bagaimana berpolitik dan berorientasi idealisme dan bermoral. Oleh karena itu, dikalangan masyarakat dewasa ini seperti tampak dalam pemilihan presiden dan fenomena melemahnya politik aliran dan menguatnya mesianisme (memilih karena figur pemimpin yang dianggap mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan atau ratu adil). Namun jika dikaji lebih lanjut, baik pemilih yang masih berkuat pertimbangan domain politik aliran maupun mereka yang berharap pada mesianisme semata-mata masih dalam tataran memilih emosional. Pemilih rasional masih sangat nampak belum berkembang. Fenomena ini merupakan tantangan bagi pendidikan demokrasi yang berkehendak mengembangkan berpolitik dengan berbekal memilih secara rasional. Berpolitik rasional inilah yang diharapkan dapat memecahkan berbagai perilaku politik yang mengarah pada konflik sosial. Dengan demikian berpolitik rasional yang dibarengi dengan komitmen moral

yang tinggi merupakan unsur penting bagi pengembangan rasa kebangsaan yang kuat.¹⁴

Pada sisi lain budaya umum bersifat horizontal yang penting bagi pendidikan demokrasi masih belum berkembang. Kultur feodalistik-lah yang berkembang. Hal ini terlihat hubungan patron-klien masih sangat kuat. Penguasa yang semestinya menjadi pelayan publik justru minta dilayani oleh masyarakat, egaliterisme tidak berkembang. Budaya politik demokrasi atau budaya politik kewarganegaraan yang merupakan budaya campuran dari budaya politik partisipan, subjek dan parokial tidak berkembang secara proporsional. Budaya politik subjek yang ditandai oleh kepatuhan tanpa sikap kritis terhadap penguasa berkembang melampaui dua budaya politik yang lain. Hal ini disebabkan antara lain kuatnya obsesi elit pada masa Orde Lama dan Orde Baru.¹⁵

E. Pendidikan Islami sebagai praktik pembebasan

Setiap nabi yang diturunkan ke dunia seluruhnya membawa misi pembebasan. Nabi Ibrahim misalnya, hadir ke dunia sebagai prioner pembebasan manusia dari ketundukan kepada berhala-berhala yang berada di bawah kuasa Raja Namrud. Nabi Musa a.s adalah pembela Bani Israil yang berada di bawah keserakahan Raja Fir'aun. Dan Nabi Muhammad saw adalah revolusioner sejati dengan misi merekonstruksi dan bahkan mendekonstruksi seluruh watak dan perilaku umat ke arah yang diridai Tuhan. Nabi Muhammad hadir ke dunia sebagai proklamator kebebasan atas hak dan martabat manusia, pembebasan dari perbudakan, eksploitasi,

¹⁴ Ibid., 84

¹⁵ Ibid.



diskriminasi, pemingatan hak-hak wanita dan ketidakadilan. Nabi Muhammad saw adalah berasal dari bangsa Quraisy, dengan meruntuhkan kelompok-kelompok kepentingan yang dominan. Contoh faktual adalah pembebasan sahabat Bilal ibn Rabah, seorang budak dari Abesinia dan beberapa orang yang kehilangan haknya mengikuti seruan Nabi, karena melihat kemungkinan pembebasan mereka lewat beliau.¹⁶

Keberhasilan ini diakui oleh Will Durant dan Thomas Carlyle sebagaimana dalam Jalaludin Rahmat yang menyatakan bahwa "Jika kita mengukur kebebasan dengan pengaruh, dia seorang raksasa sejarah. Ia berjuang meningkatkan tahap rohaniah dan moral suatu bangsa yang tenggelam dalam kebiadaban karena panas dan kegersangan gurun. Dia berhasil lebih sempurna dari pembaru manapun belum pernah ada orang yang begitu berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya seperti dia tulis Will Darant".¹⁷

Ali Syari'ati mendeskripsikan bahwa nabi dan rasul adalah seorang yang lahir dari tengah-tengah massa, lalu memperoleh tingkat kesadaran (hikmah) yang sanggup "mengubah seatu masyarakat yang korup dan beku menjadi kekuatan yang bergejolak dan kreatif, yang pada gilirannya melahirkankebedaban, kebudayaan dan kepahlawanan."¹⁸

¹⁶ Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 16-18.

¹⁷ Bahkan juga menutip tulisan Thomas Crleyle dalam *On Heroes and Hero Worship*, melukiskan keberhasilan Nabi Muhammad, "dia datang seperti sepercik sinar dari langit, jatuh kepadang pasir yang tandus, kemudian meledakkan butir-butir debu menjadi mesiu yang membakar angkasa sejak Delhi ke Granda". Jalaludin Rakhmat, *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1991), 201.

¹⁸ Menurut Ali Syari'ati juga para nabi ibarat bunga api yang dipijarkan oleh benturan batu. Mereka menyadarkan pikiran yang tumpul, membangkitkan semangat bagi kehendak dan *gerakan* pada abad yang mati. Mereka

Nabi Muhammad dengan tauhid sebagai kunci pokok ajaran yang dibawahnya adalah agama yang revolusioner. Yaitu, agama dengan misi membebaskan manusia dari ikatan-ikatan palsu. Kensepsi tauhid menunjukkan tidak ada penghambaan dan penyembahan kecuali kepada Tuhan, bebas dari belenggu kebendaan dan kerohanian. Ketika seorang tekah mengikarkan dirinya masuk Islam dengan kalimat syahadat berarti ia telah menafikan diri dari ikatan dan subordinasi apapun. Tauhid merupakan paradigma pembebasan dan kebebasan manusia, baik secara lahir maupun secara batin, kecuali kepada Tuhan. Karenanya sebagaimana diuraikan diawal, pendidikan Islam diacu kearah pembebasan, krisis terhadap hal yang dan melarang taklid. tragedi dalam sejarah Islam (1250-1800)¹⁹ telah membawa kemunduran. Pikiran kritis (*ijtihad*) yang bercorak filosofis, sebagai energi kemajuan dan kejayaan umat Islam, dikebiri kearah sesuatu yang diharamkan karena menyesatkan. Tak pelak yang berkembang hanya kodifikasi, elaborasi (*syarah*) dan elaborasi atas elaborasi (*hasyiyah*), sehingga akhirnya sampai dewasa ini umat Islam hanya puas menjadi "Konsumen" produk-prodeuk intelktual pihak lain dan jatuh pada meminjam bahasa Paulo Freire, yaitu "kesadaran intransitif" yaitu kesadaran dibawah kendali orang lain.²⁰

memacu getar, hidup dan darah pada urat-urat orang yang lembam, dan pikiran, agama dan ritus mereka... para nabi datang dari rakyat jelata untuk membenarkan, membebaskan dan menolong mereka. Ali Ayari'ati, *Sosiologi Islam* (Yogyakarta: Ananda, 1984), 120-121.

¹⁹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 13-14.

²⁰ Paulo Freire menurut Azyumardi Azra dalam tulisannya tentang pendidikan Islam dan pembebasan manusia dari ketertindasan struktural dan kultural sedikit banyak menilhami pengembangan konsepsi dan pemikiran pendidikan Islam yang lebih dinamis dan fungsional dalam menjawab tantangan-tantangan dunia pendidikan umumnya dewasa ini dan abad



Kesadaran semi intransitif adalah sebuah kesadaran, dimana kesadaran kritis dibangun oleh mitos-mitos pengembangan dan stabilitas kesatuan atau mereduksi ideologi kelas dominan (penguasa/pemerintah yang berkuasa). Konsekuensi dari kesadaran demikian jelas aspek kemanusiaan menjadi terabaikan, dan sebaliknya proses dehumanisasi yang berjalan dengan berbagai legitimasi yang sengaja dibuat.

Adalah tugas pendidikan Islam untuk menrekonstruksi dan mendekonstruksi sistem pendidikan yang mengarah pada dehumanisasi dan diskriminasi. Sistem pendidikan Islam harus menjadi alternatif ke arah humanisasi pendidikan, karena cita-cita ideal Islam adalah tercapainya bentuk-bentuk dan aspek-aspek kemanusiaan secara menyeluruh, baik lahir maupun batin.²¹ Islam sebagai abstract noun dari kata *aslama-yuslimu-islaman*, dalam konteks pendidikan, berarti proses kontinuitas keislaman dan keendidikan dengan mengekspresikan secara positif dan kritis terhadap perkembangan dan kebutuhan zaman. Sehingga dengan begitu, Islam sebagai agama yang sesuai dengan situasi dan kondisi al-Islam shalih li kulli zaman wa makan tidak menjadi kering karena penetralisasi global yang terus berkembang. Bahkan, meminjam bahasa Ali bin Abi Thalib “*didiklah anak-anakmu, bukan seperti kamu dididik dulu, karena anak-anakmu diciptakan untuk zamanya yang jelas berbeda dengan zamanmu*”.²²

ke-21. Lebih jelas baca Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Ciptau: PT Logos Wacana Ilmu, 203), 93.

²¹ Omar Moh. Al-Toumy al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 416-418.

²² Jamil Sahroni, *Filsafat Pendidikan*, 86-87.

Ada beberapa hal yang bisa diidentifikasi melalui bahasan ini dari ajarn Islam bagi bangunan sistem pendidikan Islam ke arah pembebasan dan humanisasi. *Pertama*, konsep musyawarah dan dialogika (*munazhrah*). Sebuah kisah metaforik di dalam al-Qur'an dikatakan bahwa ketika Nabi Yakub, memerintahkan anak-anaknya mencari Nabi Yusuf. Di istana peninggalan Fir'auan, dia berkata, sebagaimana di ceritakan dalam QS Yusuf ayat 67 sebagai berikut.

وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ
 مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَحْكَمُ إِلَّا
 اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

Artinya: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri". (QS. Yusuf: 67).²³

Logikanya jika masuk dari satu pintu, sulit Yusuf ditemukan. Lebih baik berpencar, meski tetap harus ada persetujuan bersama bahwa siapa pun yang menemukan mau membagi dengan yang lain. Sebab, betapa pun penemuan itu adalah penemuan bersama, bukan monopoli pribadi atau kelompok.

²³ QS., 12: 67.



Salah satu ajaran yang bisa diambil dari kisah diatas adalah pembangunan sistem kependidikan harus didasarkan aspek musyawarah, dialog dan kebersamaan kepemilikan. Semua sivitas akademika dan bahkan masyarakat secara luas harus dilibatkan dalam membangun kependidikan. Selain itu program sepesialisasi secara profesional di dalam pendidikan merupakan pokok kisah diatas. Masing-masing komponen pendidikan sebagaimana diperankan secara bersama-sama sesuai kopetensi yang dimiliki. Kemampuan mengakses informasi dan kesempatan memperoleh pendidikan juga berbagi dengan yang lain.²⁴

Konsep musyawarah dan dialogika ini sebagi kritik terhadap sistem pendidikan *naratif* (hubungan searah) dan meminjam bahasa Paulo Freire pendidikan “gaya bank”. Pendidikan model ini menganggap peserta didik laksana bejana-bejana kosong yang perlu diisi oleh guru, semakin penuh semaikn baik. Peserta didik tak lebih sebagai manusi mandul yang perlu dikasihani dan “diusapi” berbagai pengetahuan sesuai selera guru tanpa ada hak untuk menolak. Implikasinya, sistem pendidikan demikian hanya bertumpu pada penguasaan materi dan aspek hafalan, bukan pada kemampuan analisis. Akibatnya, pendidikan cenderung kurang harmonis, tidak kritis dan tidak membebaskan serta hanya menjadikan peserta didik sebagai penonton setia gejala situasi zaman.²⁵

Sementara pendidikan dengan sistem musyawarah dan sialogika berusaha menghantarkan peserta didik secara humanis pada kesejatian dirinya sebagai manusia potensial,

²⁴ Jamil Sahroni, *Filsafat Pendidikan*, 87.

²⁵ Ibid.

aspiratif, dinamis, progresif, evolutif dan komunikatif. Dialogika pun akan tercipta bila pemikiran kritis dilibatkan sebagai cara pandang realitas objektif sebagai adanya perubahan dan perbedaan dalam pendidikan. Dehumanisasi keadaan kurang dari manusia atau tidak lagi manusia bukan lagi menandai mereka kemanusiaanya telah dirampas, melainkan (dalam cara yang berlainan) menandai pihak yang telah dirampas kemanusiaan itu, dan merupakan pembengkokan cita-cita untuk menjadi manusia yang utuh.²⁶

F. Demokratisasi dan Liberalisasi pendidikan Islam: balajar dari Paulo Freire²⁷

Ada ungkapan yang menarik untuk direnungkan.

... apa guna kita memiliki

sekian ratus ribu alumni seolah

yang cerdas, tetapi masa rakyatnya dibiarkan

bodoh? Segeralah kaum sekolah itu pasti

akan menjadi penjajah rakyat

dengan modal kepintaran mereka (YB. Mangun Wijaya)

²⁶ Ibid., 88.

²⁷ Paling tidak ada tiga hal utama untuk mengetahui Paulo Freire begitu menarik perhatian masyarakat dunia secara luas. Pertama, pemikiran dan metode pendidikannya yang autentik dan radikal. Kedua, apa yang dikonsepsikan dilakoninya dalam praktik nyata pendidikan secara konsisten. Ketiga, pengaruh gerakannya begitu luar biasa menggema hampir ke seluruh pelosok penjuru dunia. Lihat Paulo Freire, *Pendidikan sebagai Praktik Pembebasan*, terj Alois A. Nugroho (Jakarta: LP3ES, 1984), 34.



Atau tulisan Hadi Purwanto yang dikutip pengantar redaksi “Problematika Pendidikan Islam Kontemporer”, kita menyebut proplem pendidikan agama sasih bersifat doktrinal.

Guru bicara, murid menulis

Guru tagu segalanya, murid tidak tahu apa-apa

Guru mengatur, murid diatur

Guru menghukum, murid dihukum

Dosen membaca mahasiswa mencatat

Dosen bertanya tentang bacaanya, mahasiswa menjawab dengan catatannya.

Dosen diam, mahasiswa tidur

Dosen absen. mahasiswa pulang

Dosen pulang, mahasiswa berkelahi dengan aparat, mabuk, aborsi lalu ekstasi.²⁸

Sipa diantara para akademisi dan intelktual yang tidak akan “tersinggung” dengan pernyataan diatas? Namun, bukan masalah “tersinggung” atau tidak, melainkan mengapa ungkapan seperti itu muncul? Apa yang terjadi dengan kebijakan dan praktik pendidikan kita? Tentunya, bagaimanapun pula “seharusnya” kita selalu memperhatikan

²⁸ Jamadi Sahrodi dkk, *Membedah Nalar Pendidikan Islam Pengantar ke arah Ilmu Pendidikan Islam* (Cirebon: STAIN Cirebon Press dan Pustaka Rihlah Group, 2005), v-vii.

dan praktisi pendidikan menyikapi persoalan-persoalan kependidikan yang memunculkan kekecewaan yang demikian?

Dalam bahasa Paulo Freire²⁹, dunia pendidikan memerlukan kepemimpinan yang revolusioner, metodenya bukan hanya “propaganda libertarian” yang tidak hanya sekedar “menanam’ melainkan dengan dialog. Kepemimpinan revolusioner mesti mempraktikkan pendidikan ko-inetrnasioanal. Artinya, para guru dan murid sama-sama bertindak dalam dan bertindak terhadap kenyataan, supaya mengetahuinya secara kritis, namun juga dalam tugas menciptakan kembali pengetahuan tadi.

Dalam tulisan ini, beliau juga menyebutkan bahwa perlunya pengajaran selalu diisolasi dengan “pembacaan kritis” terhadap realitas. Dengan mengajarkan itu, guru mengajar bagaimana cara berfikir. Kita tidak dapat mengajarkan bahan pelajaran semata-mata seolah konteks sekolah dimana bahan pelajaran tersebut disampaikan bisa direduksi menjadi sebuah ruang netral yang terbebas dari konflik-konflik sosial. Latihan “berfikir benar” juga tidak dapat dipisahkan dari pengajaran suatu bahan pelajaran.³⁰ Ini mestinya dilaksanakan dalam pengajaran dunia pendidikan kita.

Dunia pendidikan kita sejak era kolonial kemerdekaan dan bahkan sampai era reformasi ini masih menyisakan

²⁹ Paulo Freire, *Pendidikan yang Membebaskan, Pendidikan yang Memanusiakan dalam Menggugat Pendidikan Fundamental, Konservatif, Liberal, Anarki*. terj Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 457.

³⁰ Paulo Freire, *Pendidikan Masyarakat Kota*, Terj Agung Prihantono (Yogyakarta: LkiS, 2003), 14.



banyak persoalan yang tidak pernah bisa diselesaikan. Sistem pendidikan lebih banyak dibangun di atas dekrit-kebijakan yang mereduksi ideologi penguasa kaum burjois, bukan lahir dari “rahim” kesadaran pembangunan masyarakat baru secara “revolusioner” dan “visioner”. Cita-cita pembangunan masyarakat baru kiranya belum dielaborasi ke dalam visi, misi dan orientasi sistem pendidikan. Strategi perubahan “revolusioner”, sebagai peran yang harus dimainkan oleh pendidikan, belum jelas atau bahkan sengaja tidak diperjelas. Sehingga eksistensi sekolah sebagai pemasok utama masyarakat berpendidikan hanya menjadi media reproduksi ideologi pemerintah. Ini perlu dimaklumi, “karena negara ini tidak pernah di/melahirkan pemimpin yang akomodatif terhadap pendidikan maju, sehingga pertanggungjawaban secara akademis/ intelektual di akhir jabatan pun bukan sesuatu yang utama”.

Hal yang cukup relevan dengan dunia pendidikan kita adalah kenyataan bahwa kurangnya pengalaman kita dalam berdemokrasi, termasuk lemahnya demokrasi di lembaga-lembaga pendidikan kita. Kelemahan itu sangat tampak pada lemahnya penegakan nilai-nilai fundamental kemanusiaan, seperti keadilan (*‘adalah*), persamaan (*musawwah*) dan kemerdekaan (*hurriyah*).

UNESCO³¹ menyatakan bahwa demokrasi ditandai oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Anggota masyarakat menghormati hukum dan tatanan. Artinya, demokrasi menghargai pendapat orang lain

³¹ Learning to Live, Together in Peace and Harmony dapat ditelusuri di <http://www.unesco.org>. Pada tanggal 6 Mei 2014 pukul 14.04 WIB.

yang berbeda. Antara orang-orang yang disertai untuk memimpin data yang dipimpin harus ada saling percaya dan saling menghormati.

2. Kebebasan yang disertai tanggung jawab dalam kebebasan mengeluarkan pendapat ada pengakuan dan hal-hak warga lain dan hak pribadi pihak lain.
3. Disiplin diri sendiri yang diwujudkan dalam tata krama berinteraksi antara sesama, dan apabila ada konflik penyelesaian diambil tanpa menggunakan kekerasan.
4. Menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab meliputi kesiapan untuk menjadi sukarelawan, dan berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang sadar akan kewajibansebagai warga negara yang baik.
5. Keterbukaan akan kebenaran ilmiah dan kebenaran universal, dan kesediaan untuk berdialog, berkonsultasi serta bernegosiasi.
6. Perfikir kritis dalam mencari kebenaran yaitu menggunakan pikiran yang kritis dan jernih dan melakukan keputusan berdasarkan informasi yang cukup dan sah bukan atas prasangka.
7. Solidaritas menggarisbawahi kerja sama yang baik dalam tim, pengambilan keputusan bersama serta mencari penyelesaian masalah secara damai.

Demokratisasi pendidikan tidak hanya berlangsung di Perguruan Tinggi, tetapi merupakan proses sepanjang hayat. Bermula dari pendidikan keluarga, masyarakat, sekolah dasar hingga sekolah menengah, dijadikan sebagai pola hidup dalam berkarya. Pendidikan demokrasi hanya



dapat berlangsung dengan lancar apabila kondisi lingkungan juga demokratis. Artinya orang tua, masyarakat, guru, karyawan, kepala sekolah juga memiliki pola hidup yang demokratis. Disamping itu mudah-mudahan tidak hanya mimpi sebuah sekolah harus demokratis, yang berpihak pada kepentingan anak-anak yang serba kekurangan dan yang secepat mungkin, akan menghilangkan masalah-masalah di 'rahim' sekolah yang melestari "pengusiran" anak-anak dari kelompok bawah. Sekolah juga diarahkan agar mampu melahirkan kesenangan, keseriusan, bahkan bekerja keras yang melelahkan dalam proses belajar mengajar, tidak boleh mengubah tugas tersebut menjadi suatu yang menyedihkan.

Walhasil meminjam bahasa Muhaimin bahwa "tantangan dunia pendidikan pada umumnya bukanlah permasalahan yang berdiri sendiri, melainkan terkait langsung atau tidak dengan perkembangan IPTEK dan kehidupan aspek lainnya, ekonomi, politik serta sosial budaya".³² Bahkan pemikir asal Pakistan Abu al-Hasan al-Maududi sebagaimana yang dikutip oleh Quraisy Shihab menilai bahwa hampir semua lembaga pendidikan Islam, tidak mengajarkan Islam secara benar, bahkan justru jadi adalah menjauhkan para pelajar dari ajaran Islam. Lebih jauh lagi ia mengkritisi terhadap lembaga lembaga pendidikan Islam, *pertama*, kekaburan identitas, ini terjadi pada kegiatan keseharian civitas akademika bahkan pada kegiatan keilmuannya. *Kedua*, despiritualisasi ilmu, dalam dunia pendidikan sering kali ditemukan upaya-upaya untuk hanya berorientasi pada hal yang bersifat empiris atau matrealis tanpa memperhitungkan hal-hal yang bersifat

³² Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 83-93.

metafisik. *Ketiga*, penolakan terhadap kritik. Padahal Islam tidak pernah takut menghadapi kritik atau sikap ragu kepada siapa pun. Bahkan al-Qur'an dipenuhi oleh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penentang dan peragu ajarannya, semua dilayani dan dipatahkan argumentasinya. *Keempat* kurikulum dan silabus kita seperti baju yang kita pakai, yakni ukuran dan modelnya sesuai dengan selera dan kebutuhan kita. Kita tidak boleh meminjam dari orang lain. Betapapun indahnyanya kita lihat atau betapa pun berukuran sama, namun jika tidak dibuat seluai selera dan kebutuhan riil kita, maka ia tidak nyaman untuk dipakai. Berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan agama sebagai bagian dari proses pendidikan bangsa. Jika dunia pendidikan di Indonesia memerlukan berbagai inovasi agar tetap berfungsi optimal di tengah arus perubahan, maka pendidikan agama yang memerlukan berbagai upaya inovasi agar eksistensinya tetap bermakna bagi kehidupan bangsa.³³

³³ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 114-112.



BAB III

LIBERALISASI PENDIDIKAN

A. Ideologi Liberalisasi Pendidikan

Dalam sudut pandang pendidikan liberal terdapat tiga ungkapan yang menjadi konsep terbentuknya liberalisasi pendidikan yaitu liberalisme pendidikan, liberasionisme pendidikan dan anarkisme pendidikan.¹ Penjelasan ketiga istilah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Liberalisme Pendidikan

Secara etimologi liberalisme pendidikan terdiri dari dua suku kata yaitu liberalisme dan pendidikan. Kedua kata tersebut memiliki definisi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mislanya, terdapat banyak pernyataan atau istilah yang mendefinisikan kata liberalisme dan pendidikan. Ensiklopedi Indonesia mendefinisikan libelarisme, yakni usaha perjuangan untuk menuju kebebasan.²

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry mendefinisikan liberalisme sebagai “suatu paham yang menekankan

¹ Soleh Subagja, *Gagasan Liberalisasi Pendidikan Islam* (Malang: Madani, 2010), 29.

² Ibid.

kebebasan individu atau partikelir, filsafat sosial politik dan ekonomi yang menekankan atau mengutamakan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian, produksi, konsumsi, tukar-menukar dan bersaing serta hak milik partikelir (swasta) terhadap semua macam barang".³

Lain halnya dengan ensiklopedi Nasional Indonesia yang mendefinisikan liberalisme sebagai suatu aliran pemikiran yang mengharapakan kemajuan dalam berbagai kebebasan individu yang dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya sebebass mungkin.⁴ Pemakaian istilah liberalisme berlangsung sejak abad ke-19, yang pada mulanya berasal dari penyebutan kaum pemberontak Sepanyol yang menamakan dirinya "*Liberales*". Pada tahap permulaan, istilah liberalisme berkembang dalam tataran politik dan ekonomi. Oleh sebab itu, hal yang mendasari munculnya istilah liberalisme pendidikan pun tidak terlepas dari landasan ideologi liberal mengenai tiori-teori politik dan ekonomi, termasuk tradisi-tradisi sekuler dan religius yang mempengaruhinya.⁵

Adapun pendidikan, kalau ditinjau dari universal menurut Hasan lazimnya akan dfinisikan menjadi dua bentuk pengertian. *Pertama*, pendidikan merupakan proses pewarisan, penerusan dan inkulturasi dan sosialisasi prilaku sosial dan individu yang telah menjadi model aturan masyarakat secara baku. *Kedua*, pendidikan merupakan suatu upaya fasilitas yang memungkinkan terciptanya situasai atau

³ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 409-410

⁴ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), 736

⁵ Soleh Subagja, *Gagasan*, 50.



lingkungan diimana potensi-potensi dasar anak dapat berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan zaman dimana mereka harus *survive*.⁶

Dari kedua definisi tersebut, masing-masing memiliki implikasi operasional yang beraneka ragam. Pada definisi pertama pendidikan akan mengkonstruksi anak sesuai keinginan lembaga, kurikulum atau gurunya yang ingin menjadikan dirinya sebagai model idola untuk anak didiknya yang wajib diikuti atau dicontoh baik kapabilitas ataupun prilakunya. Adapun pada definisi yang kedua terkesan memberi kebebasan terhadap anak didiknya untuk menentukan profilnya sendiri.⁷

Dengan kedua istilah tersebut maka terbetuklah istilah gabungan kata baru yaitu liberalisme pendidikan yang terkandung pandangan sebagai gerakan pendidikan kontemporer, pendidikan baru atau pendidikan progresif, hadir diparuh pertama abad ke 20-an. Liberalisme pendidikan adalah kumpulan yang jelas dari berbagai gerakan pendidikan yang berbeda-beda intisarinya dan terkadang menuju ke arah yang berlainan pula.⁸

Menurut 'berpendapat bahwa liberalisme pendidikan cenderung menjadi keluaran tradisi empiris dalam filosofi, yang mengikuti keyakinan akan adanya sebuah sistem kebenaran yang terbuka. Tradisi ini tidak menekankan jawaban-jawaban begitu saja, melainkan jawaban-jawaban yang didapat melalui tatacara rasional-eksperimental. Mengajukan pembaharuan yang bertahab, bersekala kecil,

⁶ Khozin, *Jejak-Jejak Pendidikan Islam* (Malang: UMM, 2001), 6.

⁷ Ibid.

⁸ Soleh Subagja, *Gagasan*, 52.

di dalam kerangka kerja sistem politik yang ada, demi memajukan kebebasan individual secara memaksimalkan perwujudan potensi-potensi manusia sepenuhnya.⁹

2. Liberasionisme Pendidikan

Dalam pandangan kaum liberasionis, sasaran puncak pendidikan adalah berupa penanaman pembangunan kembali masyarakat mengikuti alur yang benar-benar berkemanusiaan (humanistik). Sepenuhnya menekankan pada potensi-potensi khas setiap orang sebagai makhluk manusia.¹⁰ Kaum kiberasionalisme pendidikan selalu berusaha untuk melakukan perubahan dan perombakan segera dalam ruang lingkup besar atas taatnan politis yang ada, sebagai jalan menuju perluasan kebebasan individual serta untuk memposisikan perwujudan potensi-potensi personal sepenuhnya.¹¹ Oneil berpendapat, terdapat tiga corak dalam liberasionalisme pendidikan yaitu liberasionalisme reformis, liberasionalisme radikal dan liberasionalisme revolusioner.¹² *Pertama*, aliran liberasionalisme reformis relatif konservatif dan merupakan gerakan yang menuntut keadilan (hak-hak setara dan peran serta) dan sistem yang ada. Tercermin dalam gerakan-gerakan yang menuntut hak-hak warga negara di Amerika pada pertengahan era 1960-an. Misalnya, gerakan pembebasan masyarakat kulit hitam (Afro-Amerika), gerakan pembebasan perempuan, gerakan pembebasan kaum Hispanik-Amerika dan lain-lain.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ali Maksum dan Luluk Yunan, *Paradigma Pendidikan Universitas di Era Modern dan Post-Modern: Mencari "Visi Baru" atas "Realitas Baru" Pendidikan Kita* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004), 466

¹¹ Ibid., 534.

¹² Ibid., 468



Sedangkan liberasionalisme radikal menggunakan sekolah untuk mengkritik dan membangun kembali dasar-dasar kebudayaan. Berusaha secara radikal memperbaiki lembaga-lembaga tertentu yang paling fundamental dalam menyangga masyarakat. tokoh-tokoh yang paling terkenal seperti Johan Dewey hingga tokoh kontemporer semisal Paulo Freire sang pendidik dari Brazil.¹³

3. Anarkisme Pendidikan

Kaum anarkisme pendidikan, sebagaimana kaum liberalis dan liberasionalis, pada umumnya menaati sebuah seitem penyelidikan eksperimental yang terbuka (pembuktian pengetahuan secara ilmiah-rasional) atau pikiran-pikiran yang dianggap sesuai dengan sistem penyelidikan semacam itu.¹⁴

B. Tujuan Pendidikan dalam Ideologi Liberalisme Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan dimana pun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, disamping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik.

Menurut Soetopo, agar dapat mencapai target tersebut bukan merupakan tugas ringan, tetapi perlu rancangan dan arah yang jelas dari proses pendidikan itu sendiri. Oleh

¹³ Ibid., 470

¹⁴ Soleh Subagja, *Gagasan*, 60.

karena itu, tidak salah kalau setiap proses pendidikan dari awal telah memiliki atau menentukan tujuan agar target yang diharapkan dapat terwujud. Namun, walaupun demikian bukan berarti setiap pendidikan yang lain memiliki tujuan yang sama. Melainkan, tergantung orientasi dari masing-masing jenis pendidikan yang semuanya dapat dipengaruhi baik oleh zaman, budaya dan pandangan hidup.¹⁵

Misalnya, M. Sobry Sutikno mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUSPN Pasal 4 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan pendidikan Indonesia tentu tidak terlepas dari pengaruh zaman, budaya, dan pandangan hidup negara Indonesia sendiri.

Selain itu, ada juga ahli didik yang menitik beratkan kepada ketuhanan atau agama. Semua pendidikan diarahkan agar dapat membawa anak didik selalu berbakti kepada Tuhanya, selalu hidup menuruti dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agamanya. Anak didik bukan untuk hidup di dunia ini dan sekarang, melainkan dengan pendidikan itu mereka hendak mempersiapkan anak untuk hidup di akhirat nanti.

¹⁵ Hendayat Soetopo, *Pendidikan dan Pembelajaran: Teori, Permasalahan dan Praktek* (Malang: UMM Press, 2005), 44.



Sebaliknya, menurut Suetopo, banyak pula orang yang lebih mengutamakan keduniawian dan bukan keakhiratan dalam pendidikannya. Mereka mendidik anak-anak untuk dapat dan sanggup hidup di dunia ini yang penuh dengan rintangan dan kesukaran yang harus diatasinya untuk dapat mencapai kebahagiaan hidupnya.¹⁶

Sedangkan Langeveld seperti dikutip Hendayat Soetopo mengatakan macam-macam tujuan pendidikan sebagai berikut.¹⁷

- a. Tujuan umum (tujuan sempurna, tujuan akhir dan tujuan bulat), yaitu tujuan di dalam pendidikan yang seharusnya menjadi tujuan orang tua atau pendidik lain. Ditetakan oleh pendidik dan selalu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terdapat pada anak didik yang dihubungkan dengan syarat-syarat dan alat-alat untuk mencapai tujuaj tersebut. Tujuan tidak akan dan tidak dapat selalu diingat oleh si pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu tujuan umum selalu dilakukan dalam bentuk-bentuk yang khusus, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terdapat pada anak didik dan lingkungannya sendiri.
- b. Tujuan-tujuan tak sempurna, yaitu tujuan mengenai segi-segi kepribadian manusia yang tertentu dan hendak dicapai dengan pendidikan, yaitu segi-segi yang berhubungan dengan nilai-nilai hidup yang tertentu, seperti keindahan, kesulitan, keagamaan, kemasyarakatan, seksual, kecerdasan dan sosial.

¹⁶ Soetopo, *Pendidikan*, 45.

¹⁷ *Ibid.*, 40-44.

- c. Tujuan-tujuan sementara, merupakan tempat penghenti sementara pada jalan yang menuju tujuan umum. Seperti, anak-anak dilatih belajar kebersihan, belajar berbicara, belajar berbelanja, belajar bermain bersama teman-teman.
- d. Tujuan perantara, yaitu tujuan yang bergantung pada tujuan-tujuan sementara. Umpamanya tujuan sementara ialah anak didik harus belajar membaca dan menulis. Setelah ditentukan untuk apa anak belajar membaca dan menulis itu, kemudian menentukan berbagai macam kemungkinan untuk mencapainya yang diandang sebagai tujuan perantara, seperti metode mengajar dan metode membaca.
- e. Tujuan insidental, yaitu tujuan yang hanya sebagai kejadian-kejadian yang merupakan saat-saat terlepas pada jalan menuju pada tujuan umum.

Seperti halnya pada tujuan-tujuan pendidikan sebagaimana telah diutarakan di atas, aliran-aliran atau ideologi-ideologi liberalisasi pendidikan memiliki pandangan masing-masing dalam menentukan tujuan pendidikan. Aliran liberalisme pendidikan berpendapat bahwa tujuan pendidikan secara keseluruhan adalah untuk mempromosikan perilaku personal yang efektif.¹⁸ Bagi pemegang aliran liberasionalisme pendidikan, tujuan utama pendidikan adalah untuk mendorong pembaharuan-pembaharuan sosial yang perlu, dengan cara memaksimalkan kemerdekaan personal di dalam sekolah, serta dengan cara membela kondisi-kondisi yang lebih manusiawi dan memanusiakan di dalam masyarakat secara umum. Sementara itu, aliran anarkisme pendidikan

¹⁸ Soleh Subagja, *Gagasan*, 64.



beragumen bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membawa pembaharuan atau perombakan bersekala besar dan segar, didalam masyarakat, dengan cara menghilangkan persekolahan wajib.¹⁹

C. Peranan Sekolah dalam Ideologi Liberalisme Pendidikan.

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang menghendaki kehadiran penuh kelompok-kelompok umur tetentu dalam ruang-ruang kelas yang dipimpin oleh guru untuk mempelajari kurikulum-kurikulum yang bertingkat. Sekolah menyediakan jembatan yang diperlukan sebagai perantara dari masa kanak-kanak kepada kehidupan dewasa. Sekolah secara berangsur-angsur mengubah anak manja menjadi orang yang dewasa yang bertanggung jawab. Sekolah mengambil anak dari temanya, melalui tingkatan-tingkatan yang ditetapkan dengan sesaksama dibawa ke suatu prototipe dunia pekerjaan. Mereka menamatkan anak yang sempurna dan meluruskan orang yang sempurna.²⁰

Para penganut aliran liberalisasi pendidikan memiliki perbedaan pendapat dalam memandang arti penting sekolah. Bahkan, terdapat salah satu aliran liberalisasi pendidikan, yaitu anarkisme pendidikan yang berusaha untuk menghapus sistem sekolah formula. Hal ini sebagaimana corak yang terjadi pada corak anarkisme taknis.

Maka hal yang palinh mendidik yang bisa kita lakukan adalah *memusnahkan sekolah-sekolah itu sekalian*. Kita bisa menggunakan kekayaan besar sekarang ini kita hambur-hamburkan untuk membiayai sistem pendidikan formal,

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid., 65.

yang tidak efisien dan otoriter itu untuk kita pakai untuk membenarkan atau mengoreksi persoalan-persoalan keadilan sosial yang lebih mendesak, yang pada puncaknya menjadi titik tolak bagi kemungkinan adanya pendidikan sejati bagi anak-anak kita.

Aliran anarkisme pendidikan berpendapat bahwa sistem persekolahan formal harus dihapuskan sepenuhnya dan diganti dengan sebuah pola belajar sukarela serta mengarahkan diri sendiri, akses yang bebas dan universal ke bahan-bahan pendidikan serta kesempatan-kesempatan belajar materi didasarkan, namun tanpa sistem pengajaran wajib.²¹

Sementara itu, pendapat berbeda juga dikemukakan oleh aliran liberalisasi pendidikan lainnya yang masih menganggap arti penting peranan sekolah, aliran liberalisme pendidikan mengatakan bahwa peranan atau sasaran berdirinya sekolah adalah *pertama*, untuk menyediakan para siswa mengenali atau menanggapi kebutuhan akan pembaharuan dan perombakan sosial. *Kedua*, untuk menyediakan informasi dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan siswa supaya bisa belajar secara efektif bagi dirinya sendiri. *Ketiga*, untuk mengajar para siswa tentang bagaimana caranya memecahkan masalah-masalah praktis melalui penerapan-penerapan teknik-teknik penyelesaian masalah secara individual maupun kelompok yang didasari oleh metodologi ilmiah-rasional.²²

²¹ Ibid.,65-66.

²² Ibid., 66.



D. Anak Didik dan Pendidik

Dalam undang-undang Republik Indonesia tahun 1989 disebutkan, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembang dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.²³ Peserta didik adalah ibarat data input yang akan diproses oleh pendidik untu digodok menjadi manusia dinamis yang kelak diharapkan akan mengawal perjalanan negara. Siswa adalah manusia sedang belajar dan selalu menginginkan berubah. Sengat wajar bila seswa seringkali berbuata salah atau *khilaf* dan kadangkala melakukan hal-hal diluar kebiasaan umum. Sebagai manusia, siswa memiliki harga diri yang merupakan aset pribadi untuk dikembangkan, diolah dan dihidupkan terus. Aset pribadi ini hendaknya dapat dimanfaatkan dan menjadi salah satu dasar strategi dalam proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dalam peencanaannya sebagai fasilitator dalam belajar.²⁴

Sebagai salah satu elemen dalam pendidikan, eksistensi siswa dalam dunia pendidikan sering kali menjadi fenomena yang tidak luput dari diskusi publik. Sebagian kalangan ada yang berpendapat bahwa siswa adalah objek pendidikan. Mereka mesti menerima pendidikan yang sudah di *set up* oleh sistem pendidikan, oleh guru atau pengajaranya mengenai apa saja yang harus dipelajari, materi-materi apa saja yang akan diterima, yang akan disampaikan, metode penyampaiannya dan lain-lain. Itu semua tergantung kepada pengajaran dan tergantung pada sistem. Berasal dari konsep seperti itu

²³ [Http://www.dikti.org/uu_no2_1989html](http://www.dikti.org/uu_no2_1989html). diakses pada tanggal 4 Mei 2014 pukul 14.01 WIB.

²⁴ Soleh Subagja, *Gagasan*, 67.

kemudian munculah konsep pendidikan fundamentalis, intelektual dan konservatif.²⁵

Sementara itu aliran-aliran liberalisasi pendidikan sebagaimana aliran filsafat modern menempatkan siswa menjadi subjek dari pendidikan.²⁶ Bagi aliran liberalisme pendidikan anak umumnya cenderung untuk menjadi lebih baik (yakni untuk menginginkan atau melakukan tindakan-tindakan yang efektif dan terarah) berdasarkan konsekuensi-konsekuensi alamiah dari perilakunya sendiri yang terus berkelanjutan.

Menurut aliran liberalisme pendidikan, perbedaan-perbedaan individual lebih penting daripada persamaan-persamaannya. Perbedaan itu bersifat menentukan (determinatif) dalam menetapkan program-program pendidikan. Anak-anak secara moral setara dan mesti memiliki kesetaraan kesempatan untuk berjuang demi ganjaran-ganjaran sosial yang pada dasarnya disetarakan.

Kepribadian peserta didik tumbuh dari pengkodisian sosial. Diri yang bersifat sosial menjadi dasar bagi seluruh penemuan diri selanjutnya. Peserta didik adalah bebas hanya didalam konteks determinasi sosial dan psikologis. Mereka harus dianggap bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka sendiri dalam arti seketika.

²⁵ Ibid.

²⁶ Menurut filsafat pendidikan modern siswa dipandang sebagai subjek dan bukan objek semata, dianggap sebagai orang yang sudah tahu sesuatu meski belum sempurna. Pendidikan harus membuat mereka lebih aktif dan membantu siswa untuk menemukan pengetahuan. dengan kata lain siswa diajak untuk mencari tahu tentang hakekat pendidikan. Siswa membentuk pengetahuan lewat interaksi antar sesama dan guru tidak bisa memaksakan pengetahuannya tanpa ada kesepakatan bersama di antara anggota kelas.



Seperti halnya di atas, aliran liberasionalisme pendidikan mengemukakan, anak sebagai pelajaran condong menjadi baik (yakni kearah tindakan yang efektif dan tercerahkan) jika diasuh dalam sebuah masyarakat yang baik (yakni bersifat rasional dan berkemanusiaan). Mereka secara moral setara dan mesti mendapatkan kesempatan yang setara untuk berjuang demi ganjaran-ganjaran sosial dan intelktual yang lebih luas, lebih mudah diakses dan dibagikan secara lebih adil dan merata.²⁷

Kemudian menurut aliran anarkisme pendidikan, anak secara fundamental menentukan dirinya sendiri. Secara individual menjadi penentu metoda pengajaran mana yang paling sesuai dengan tujuan dan rancangan pendidikannya sendiri. Hakikat serta isi pengalaman-pengalaman sekolah (jika ada) harus ditentukan oleh individu-individu yang terlibat, dan tidak didiktekan oleh agen-agen dari luar. Menurut aliran ini, gagasan-gagasan bahwa anak-anak sama dengan atau bersinonim dengan murid-murid merupakan bentuk pengalaman tersirat atas anggapan tersebut.

Selain itu, elemen pendidikan lain yang tidak kalah penting untuk menunjang keberlangsungan pendidikan adalah guru atau pendidik. Pendidik adalah manusia dewasa yang diharapkan dapat mengarahkan dan membimbing peserta didik menjadi manusia yang utuh, sehingga kelak peserta didik tersebut mampu menjadi manusia yang kreatif, mandiri, menjunjung tinggi kaidah keilmuan, beriman pada penciptanya, dapat mengeksplor potensi dirinya ke dalam masyarakat, terbebas dari kebodohan, yang pada akhirnya

²⁷ Soleh Subagja, *Gagasan*, 68-69.

bermuara pada pencapaian cita-cita luhur negara.²⁸

Sebagai seseorang yang memiliki kedudukan atau derajat tinggi dalam pendidikan, guru dalam aliran filsafat tradisional seringkali dianggap sebagai subjek pendidikan.

Hal tersebut berbeda dengan penganut liberalisme pendidikan. Menurutnya, guru atau pendidik memiliki fungsi sebagai pengorganisir, penuntun kegiatan-kegiatan dan pengalaman-pengalaman belajar. guru secara umum harus bersifat demokratis dan objektif dalam menentukan tolak ukur tingkah laku, ia harus meminta nasihat atau usulan-usulan persetujuan siswa dalam memapankan aturan-aturan tentang perilaku di dalam kelas. Guru harus menyadarkan diri terutama pada tata cara-tatacara pemecahan masalah secara individual atau kelompok yang diterapkan pada persoalan para siswa sendiri. Sedangkan, wewenang guru sendiri harus didasarkan terutama pada keterampilan-keterampilan yang dimilikinya dalam bidang pendidikan.²⁹

Sementara itu, aliran liberalisme pendidikan memandang bahwa guru dapat dijadikan panutan dalam hal komitmen intelektual serta keterlibatan solusinya. Guru harus bersifat demokratis dan objektif dalam menentukan tolak ukur perilaku-prilaku. Tolak-ukur semacam itu harus ditentukan secara bersama-sama dengan para siswa sebagai cara mengembangkan rasa tanggung jawab moral mereka. Sedangkan wewenang guru mesti terutama didasari ketajaman intelektual dan serta kesadaran sosialnya yang tercerahkan.

²⁸ Ibid., 69.

²⁹ Ibid., 70



Sedangkan menurut aliran anarkisme, guru merupakan sebuah aspek yang dapat dihapus atau dibuang (atau menjadi sebuah pilikan) dari proses pendidikan. Dengan demikian dalam aliran pendidikan ini berasumsi bahwa tidak perlu ada wewenang khusus yang diberikan pada guru sebagai *guru*.³⁰

E. Metode Pengajaran dan Penilaian Hasil Belajar

Sebagai salah satu aspek pendidikan, metode pembelajaran memiliki peranan penting dalam melaksanakan dan mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum ataupun materi pelajaran yang baik bukan merupakan jaminan keberhasilan pendidikan. Bahkan, dapat saja kurikulum atau materi pelajaran yang baik akan berakibat buruk bagi anak jika dalam pelaksanaan pendidikan menggunakan metode pelajaran yang keliru.³¹

Menurut Jalaludin dan Usman Said, metode pelajaran merupakan cara untuk menyampaikan materi pelajaran kepada anak didik (peserta didik).³² Sedangkan, Muhammad Athiyah al-Abrasy mendefinisikannya sebagai jalan yang diikuti untuk memberi paham kepada murid-murid dalam segala macam pelajaran. Metode adalah rencana yang dibuat sebelum memasuki kelas, dan diterapkan di dalam kelas selama proses belajar mengajar. Adapaun Edgar Bruce Wesley mendefinisikan metode pembelajaran sebagai kegiatan yang terarah bagi guru yang menyebabkan terjadinya proses belajar mengajar, sehingga pelajaran menjadi berkesan.³³

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Jalaludin dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangannya* (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 1999), 53.

³³ Ibid.

Dari beberapa definisi tersebut Jalaludin dan Usman Said, memberikan makna pokok yang terkandung dalam metode pembelajaran. Makna pokok tersebut adalah, *pertama* metode pendidikan adalah cara yang digunakan untuk menjelaskan materi pendidikan kepada anak didik, *kedua* cara yang digunakan merupakan cara yang tepat digunakan untuk menyampaikan materi pendidikan tertentu dalam kondisi tertentu. *Ketiga*, melalui cara itu diharapkan materi yang disampaikan mampu memberikan kesan yang mendalam pada diri anak didik.

Mengacu pada kepentingan tersebut maka metode paling tidak harus disesuaikan dengan materi, kondisi dan keadaan anak didik. Oleh sebab itu metode yang digunakan dapat bervariasi. Suatu metode dapat dinilai baik untuk materi dan kondisi tertentu, tetapi sebaliknya kurang tepat digunakan pada penyampaian materi yang berbeda dan suasana yang berlainan. Atas dasar itu teori-teori liberalisasi pendidikan (pendidikan liberal) memiliki metode-metode pengajaran yang sesuai dengan sesi ajaran. Menurut teori aliran liberalisme pendidikan, metode pendidikan yang digunakan oleh guru adalah bagaimana mampu memecahkan masalah yang dihadapi baik oleh individu ataupun kelompok yang diterapkan pada persoalan-persoalan yang dikenali berdasarkan minat persoalan siswa. Penekanan harus diterapkan pada tataran tatacara di ruang kelas terbuka dan bersifat eksperimental.

Menurut aliran ini, disiplin dan hafalan tidak bernilai jika diperlukan untuk menguatkan suatu keterampilan yang pada puncaknya akan diperlukan untuk menangani problema



persoalan yang penting secara efektif. Namun, kegiatan belajar cenderung untuk menjadi sebuah dampak sampingan dari sebuah dampak sampingan dari sebuah kegiatan yang bermakna, disiplin dan hafalan harus ditekan sehingga menjadi semaksimal mungkin. Kegiatan belajar diarahkan soleh siswa, sering dengan perencanaan pendidikan yang bersifat persekutuan (koloratif) antara guru dan siswa. Guru bertugas mengorganisir, menentukan, membimbing dan memberikan penyuluhan terhadap persoalan siswa.³⁴

Sementara itu, metode pendidikan menurut aliran liberalisme pendidikan harus ada penekanan yang kurang lebih seimbang atau setara pada pemahaman problema (pengenalan dan analisis terhadap problem-problem secara tepat) serta pemecahan masalah. Disiplin dan hafalan kadang-kadang diperlukan supaya bisa menguasai sebuah keterampilan yang akan diperlukan demi menangani problema-problema personal atau sosial yang penting secara efektif. Namun, kegiatan belajar pada dasarnya adalah keluaran sampingan dari kegiatan yang bermakna, sehingga hafalan harus diminimalisir atau kalau bisa dihapus sama sekali.

Kegiatan belajar diarahkan oleh siswa dalam kerangka kerja kurikulum yang ditentukan berdasarkan relevansi sosialnya. Guru harus menjadi panutan dan memberikan bimbingan, penyuluhan personal, serta terapi kejiwaan peserta didik.

Sedangkan menurut aliran anarkisme pendidikan, metode-metode pengajaran ditentukan siswa sesuai dengan

³⁴ Soleh Subagja, *Gagasan*, 71-72.

tujuan adalah rancangan pendidikan sendiri. Nilai disiplin dan hafalan serta lain-lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut harus dibiarkan menjadi rahasia orang yang belajar itu sendiri. Siswa secara individu bebas memilih pendekatan pembelajaran baik yang bersifat pendekatan-pendekatan direktif atau otoritarian.

Gambaran ketiga metode pembelajarannya di atas merupakan bagian dari metode pembelajaran liberalisasi pendidikan dalam melaksanakan dan mencapai tujuan pendidikan yang berbasis pembebasan (liberalis), demokratis dan humanis.

Implikasi atas metode pembelajaran adalah adanya penilaian hasil belajar atau evaluasi belajar. Oleh sebab itu, aliran-aliran liberalisasi pendidikan memiliki karakteristik atau model khusus untuk mengukur penilaian hasil belajar. Bagi aliran liberalisme, untuk mengukur nilai atau hasil belajar maka bentuk ujian yang baik adalah peragaan aktif (simulasi) yang bersifat praktis di kelas dalam situasi-situasi yang mirip dengan kehidupan. Persaingan antar pribadi serta perjenjangan atau penyusunan peringkat nilai siswa harus diminimalisir atau dilenyapkan sama sekali, sebab berdampak menyuburkan sikap-sikap buruk dan melemahkan motivasi siswa.³⁵

Hal serupa juga ditegaskan oleh aliran liberasionalisme pendidikan, untuk mengetahui hasil belajar maka bentuk ujian yang dilaksanakan adalah ujian yang didasarkan kepada perilaku siswa yang tanpa dilatih atau dipersiapkan terlebih dahulu sebagai tanggapan atas persoalan-persoalan

³⁵ Ibid., 73.



sosial yang penting. Ujian seperti ini lebih baik ketimbang tes atau ujian biasa yang digelar di dalam kelas.

Persaingan antar pribadi atau penyusunan peringkat nilai siswa secara tradisional harus diminimalisir atau dihapuskan sama sekali jika memungkinkan. Hal tersebut menuntun siswa pada sikap buruk dan motivasi diri yang merosot.

Sementara itu, menurut aliran anarkisme menyatakan bahwa penilaian atau evaluasi yang terbaik adalah penilaian diri sendiri, yang harus difungsikan hampir secara eksklusif untuk tujuan persainagn diri.³⁶

³⁶ Ibid.



BAB IV

DIKOTOMI DAN DUALISME DALAM SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA

Pendidikan merupakan kunci untuk menapaki masa depan. Pendidikan menjadi penting artinya karena melalui pendidikanlah yang menentukan arah kehidupan melalui proses pembelajaran antar generasi. Melalui proses sosialisasi, enkulturasi di dalam institusi primer yaitu dalam keluarga. Dari situlah proses pewarisan unsur budaya dalam hal ini adalah pembelajaran dilakukan pertamakali. Di dalam literature ilmu sosial disebutkan bahwa kebudayaan didefinisikan sebagai suatu keseluruhan sistem ide, sistem sosial, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia melalui proses belajar. Ini berarti kunci pokok dari kehidupan manusia itu terletak dari adanya proses belajar.

Sedemikian pentingnya pendidikan ini dalam hidup, maka pendidikan selalu menjadi ranah selalu hangat untuk diperbincangkan. Hal yang menarik lagi dalam diskursus mengenai tema besar ini adalah pijakan akar budaya dan historisitas dari perkembangan pendidikan di Indonesia. Suatu kondisi yang tidak boleh tidak ada seandainya kita

mau meneliti tentang perkembangan pendidikan di negeri kita ini adalah faktor kesejarahan. Bagaimanapun juga sejarah warisan kolonial Belanda turut membentuk wajah pendidikan Indonesia.

A. Pengertian Dikotomi dan Dualisme Pendidikan

1. Dikotomi Pendidikan

Dikotomi dalam bahasa Inggris adalah *dichotomy* adalah pembagian dua bagian, pembelahan dua, bercabang dua bagian.¹ Ada juga yang mendefinisikan dikotomi sebagai pembagian di dua kelompok yang saling bertentangan.² Secara terminologis, dikotomi dipahami sebagai pemisahan antara ilmu dan agama yang kemudian berkembang menjadi fenomena dikotomik-dikotomik lainnya, seperti dikotomi ulama dan intelektual, dikotomi dalam dunia pendidikan Islam dan bahkan dikotomi dalam diri muslim itu sendiri (*split personality*).³ Bagi al-Faruqi, dikotomi adalah dualisme religius dan kultural.⁴

Meskipun dikotomi ini adalah problem kontemporer namun keberadaannya tentu tidak lepas dari proses historisitas yang panjang sehingga bisa muncul sekarang ini. Proses sejarah tersebut diawali perkembangan pertemuan Islam-Arab dengan budaya lainnya, yang kemudian dilanjutkan dengan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dalam

¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta :PT. Gramedia Utama, 1992), 180.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 205.

³ Ahmad Watik Pratiknya, *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991), 104.

⁴ Isma'il Raji al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan* terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1984), 37.



Islam serta diakhiri dengan pertentangan dua cara berpikir yang cukup berpengaruh dalam pembentukan dikotomi ilmu dalam sejarah peradaban Islam.

Dengan pemaknaan dikotomi di atas, maka dikotomi pendidikan Islam adalah dulaisme sistem pendidikan antara pendidikan agama Islam dan pendidikan umum yang memisahkan kesadaran keagamaan dan ilmu pengetahuan. Dulaisme ini, bukan hanya pada dataran pemilahan tetapi masuk pada wilayah pemisahan, dalam operasionalnya pemisahan mata pelajaran umum dengan mata pelajaran agama, sekolah umum dan madrasah, yang pengelolannya memiliki kebijakan masing-masing. Sistem pendidikan yang dikotomik pada pendidikan Islam akan menyebabkan pecahnya peradaban Islam dan akan menafikan peradaban Islam yang *kaffah* (menyeluruh).

2. Pengertian Dulaisme Pendidikan

Perkataan “dulaisme” adalah gabungan dua perkataan dalam bahasa latin yaitu “*dualis*” atau “*duo*” dan “*ismus*” atau “*isme*”. “*Duo*” memberi arti kata dua. Sedangkan “*ismus*” berfungsi membentuk kata nama bagi satu kata kerja. Dulaisme adalah dua prinsip yang saling bertentangan. Secara terminologi dulaisme dapat diartikan sebagai dua prinsip atau paham yang berbeda dan saling bertentangan. Oleh karena itu, dulaisme ialah keadaan yang menjadi dua, dan ia adalah satu sistem atau teori yang berdasarkan kepada dua prinsip yang menyatakan bahwa ada dua substansi.

Asal dualisme ini pada hakikatnya merupakan doktrin filsafat dan metafisika yang lahir dari alam pikiran para filosof Barat dalam melihat entitas jiwa dan raga manusia.

Asal usul konsep dulaisme terkandung dalam pandangan hidup tentang alam (*world view*), serta nilai-nilai yang membentuk budaya dan peradaban Barat. Gagasan tentang dulaisme sebenarnya dapat ditelusuri sejak zaman Plato dan Aristoteles yang memiliki pandangan berhubungan dengan eksistensi jiwa yang terkait dengan kecerdasan dan kebijakan. Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa “kecerdasan” seseorang merupakan bagian dari pikiran atau jiwa yang tidak bisa diidentifikasi atau dijelaskan dengan fisik. Jadi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga, fenomena mental adalah entitas non-fisik dan raga adalah fisik. Oleh karena itu, faham dulaisme ini melihat fakta secara mendua. Akal dan materi adalah dua substansi yang secara ontologis terpisah. Jiwa-raga (*mind-body*) tidak saling terkait satu sama lain.

Dualisme yang dikenal secara umum sampai hari ini diterapkan oleh René Descartes (1641), yang berpendapat bahwa pikiran adalah substansi nonfisik. Descartes adalah yang pertama kali memodifikasi dulaisme dan mengidentifikasi dengan jelas pikiran dengan kesadaran dan membedakannya dengan otak, sebagai tempat kecerdasan. Baginya yang riil itu adalah akal sebagai substansi yang berfikir (*substance that think*) dan materi sebagai substansi yang menempati ruang (*extended substance*). Dengan demikian memang secara ideologis diciptakan adanya dulaisme pendidikan, yaitu sekolah umum yang memperoleh sokongan pemerintah dan menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional dan madrasah, pondok pesantren, sekolah yang kurang mendapat perhatian dan menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.



B. Pandangan Islam mengenai dikotomi dan dualisme pendidikan

Ilmu sebagai dasar pijakan dalam terjadinya dikotomi dan dualisme dalam pendidikan dapat kita kaji dan analisa dari Al-Quran dan Al Hadits, sebagaimana diungkap Quraish Shihab bahwa kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang 854 kali dalam al-Quran dan 750 ayat al-Quran yang berbicara tentang alam materi dan fenomenanya. Hal ini mengisyaratkan agar manusia mengetahui dan memanfaatkan alam ini. Objek Ilmu dalam Islam terbagi kepada dua bagian besar yaitu objek materi dan objek non-materi. Seperti kaum sufi melalui ayat-ayat al-Quran memperkenalkan ilmu-ilmu yang merela sebut al-hadlarat al-Ilahiyah al-Khams (lima kehadiran ilahi) sebagai gambaran keseluruhan realitas wujud, yaitu alam nasut (alam materi), alam malakut (alam kejiwaan), alam jabarut (alam ruh), alam lahut (sifat-sifat ilahiyah, dan alam hahut (wujud zat ilahi).⁵

Selain itu banyak ayat al-Quran yang memerintahkan untuk berfikir tentang alam semesta, melakukan perjalanan dengan titik tolak dan tujuan akhir karena Allah, seperti dalam Surat Al-'Alaq sebagai surat yang pertama kali diturunkan diawali dengan kalimat Iqra dan diakhiri dengan kalimat "*wasjud waqtarib*" ini merupakan indikator bahwa ilmu dalam Islam tidak dikenal Ilmu hanya untuk ilmu dan tidak dibenarkan dalam Islam. Sementara sekarang ini berkembang ilmu itu bebas nilai.⁶

Ulama-ulama kita dulu, tidak pernah membedakan ilmu

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung, Mizan, 1996), 434-447.

⁶ *Ibid.*, 440.

umum dan ilmu agama, semuanya penting, hanya menurut Muhamad Abduh, misalnya, harus ada skala prioritas dimana ilmu agama perlu diajarkan pertama kali karena berkaitan dengan kebutuhan dasar sebagai orang beragama, dia harus tahu hakikat agamanya, supaya punya identitas, sistem moral yang kuat dan visi yang jelas.⁷

Bukti bahwa ulama dulu tak pernah menganaktirikan disiplin ilmu tertentu dapat dilihat dari otoritas keilmuan yang dikuasai ulama-ulama terdahulu. Ini mengindikasikan Islam sangatlah menjunjung tinggi keutamaan ilmudari aspek keutuhan ilmu para tokoh muslim, ulama terdahulu juga telah membuktikan kesatuan ilmu yang wajib dipelajari.⁸ Al-Kindi misalnya merupakan seorang filsuf sekaligus agamawan, begitu pula al-Farabi. Ibn Sina, selain ahli dalam bidang kedokteran, filsafat, psikologi, dan musik, beliau juga seorang ulama. Al-Khawarizimi adalah ulama yang ahli matematika, al-Ghazali, walaupun belakangan populer karena kehidupan dan ajaran sufistiknya, sebenarnya beliau telah melalui berbagai bidang ilmu yang diketahuinya, mulai dari ilmu fiqh, kalam, falsafah, hingga tasawuf. Begitu pula Ibn Rusyd, seorang faqih yang mampu menghasilkan karya *magnum opus*-nya *Bidayat Al-Mujtahid*, yang mampu mengsinergikan filsafat dan ilmu fiqh. Ibn Khaldun dikenal sebagai ulama peletak dasar sosiologi modern dalam *magnum opus*-nya *Al-Mukaddimah*, yang sampai sekarang banyak ahli yang mengkajinya baik dari kalangan ummat Islam maupun para orientalisme.

⁷ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta, Bulan Bintang, 2003), 58.

⁸ Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam* (Jakarta, UI Press, 1986), 52-70.



Jadi bisa dikatakan ternyata orang dulu hampir tidak mengenal istilah dikotomi ilmu. Karena bagi mereka semua aliran ilmu itu berada dalam satu atap bangunan pemikiran dan bersumber dari Allah, Dzat yang Maha Esa. Tidak ada ilmu yang berdiri sendiri. Semuanya saling terkait, saling melengkapi. Itu mungkin rahasia kenapa orang dulu bisa menghasilkan karya berbobot dan bertahan di pasaran dalam jangka waktu sangat lama, mereka punya otoritas keilmuan interdisipliner.

Konsep dikotomi ilmu masuk bersamaan dengan diterapkannya metode dulaisme keilmuan agama non agama (ilmi vs adabi). Proyek itu digalakan oleh Muhamad Ali Fasya, saat memimpin Mesir. Tepatnya pasca dijajah Perancis, niatnya baik sebetulnya. Ia ingin memajukan umat Islam melalui sains dan teknologi, tapi cara yang ditempuh tidak tepat karena menghasilkan dulaisme keilmuan yang sangat berbahaya.⁹

Menurut H.M. Arifin, Al-Quran sebagai sumber pedoman bagi umat Islam mengandung nilai-nilai yang membudayakan manusia hampir dua pertiga ayat-ayat Al-Quran mengandung motivasi kependidikan bagi umat manusia. Allah Yang Maha Kuasa secara langsung menjadikan manusia baik atau jahat, pandai atau bodoh, bahagia atau celaka, sehat atau sakit, merupakan suatu sistem berbagai proses yang pada dasarnya sebagai mekanisme sebab akibat.¹⁰

Keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat menunjukkan betapa penting antara keduanya dan saling

⁹ Ibid. 29-30.

¹⁰ HM.Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* (Jakarta, Bumi Aksara, 2009), 33.

berkaitan satu sama lain, maka dalam disiplin ilmu pun tidak harus membedakan ini ilmu duniawi dan yang lain ukhrawi. Seperti beberapa ayat berikut yang mengarahkan keseimbangan dalam pendidikan:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ
وَلَا مِنْهُمْ وَتَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka. dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui. (QS. Al Mujaadilah:11).¹¹

Dikotomi ilmu adalah konsep yang sama sekali tidak dikenal dalam tradisi keilmuan salaf. Banyaknya ulama yang punya otoritas keilmuan lebih dari satu bidang adalah bukti kuat ulama kita tidak mengenal konsep dikotomi ilmu. Apa yang diistilahkan orang-orang sekarang sebagai ilmu agama (ilmu-ilmu Islam- Teologi, Tafsir, Hadis, Fikih, dll) dan ilmu-ilmu umum (ilmu sekuler), dalam pandangan Islam, pada batas tertentu, wajib dikuasai semuanya. Hanya istilahnya dibedakan, kalau mempelajari ilmu agama (dasar-dasarnya) itu fardu 'ain. Artinya wajib bagi setiap manusia Islam mempelajarinya. Sementara mempelajari ilmu-ilmu umum adalah fardu kifayah. Artinya kalau secara fungsional sudah tercukupi kebutuhannya maka gugur kewajiban bagi yang belum mempelajarinya. Artinya terminologi dalam

¹¹ QS., 8:11.



ranah keilmuan Islam sangat luas cakupannya menyangkut hal yang bisa diverifikasi dan hal-hal yang bersifat metafisik. Maka menerjemahkan kalimat 'ilmu dalam bahasa Arab dengan *science* (Inggris) menurut saya tidak tepat. Karena istilah *science* sangat positivistik hanya mendasarkan kebenaran pada realitas empiris belaka.

Secara normative-konseptual, menurut Abdul Rahman Al Segaf mengatakan bahwa dalam Islam tidak dijumpai dikotomi ilmu. Jika kita menoleh pegangan Islam yakni Al-Quran maupun Hadits kita tidak menemukan baik secara tersirat terlebih lagi tersurat menemukan dalil mengenai dikotomi ilmu. Justru sebaliknya Islam mengajarkan untuk menuntut semua cabang ilmu.¹²

Menurut Ramayulis, dalam pendidikan Islam tidak dikenal pemisahan antara sains dan agama. Penyatuan keduanya merupakan tuntutan akidah Islam. Allah adalah pencipta alam semesta termasuk manusia, dan menurunkan hukum-hukum untuk mengelola dan melestarikannya. Hukum mengenai alam fisik merupakan sunnah Allah, sedangkan pedoman hidup dan hukum-hukum untuk kehidupan manusia dinamakan *din Allah*. Ini mengimplikasikan bahwa dalam pendidikan tidak dibenarkan adanya dikotomi pendidikan agama dengan pendidikan sains. Peserta didik harus memahami Islam sebagai *a total way of life*, minimal seorang pendidik harus dapat melakukan perubahan orientasi mengenal konsep ilmu yang secara langsung dikaitkan dengan dalil-dalil keagamaan atau sebaliknya.¹³

¹² Abd. Rahman Assegaf, *Pengantar Dalam Buku Pendidikan Islam Integratif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), vii.

¹³ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta, Kalam Mulia, 2010), 31-32.

Memandang berbagai hal dampak dan implikasi negatif dari dikotomi ilmu-ilmu agama (*al-'ulum al-diniyyah* atau *religious sciences*) dengan ilmu-ilmu umum (*general sciences*), maka sudah waktunya bagi kaum Muslimkhususnya lembaga-lembaga Islam untuk melakukan “reintegrasi ilmu-ilmu”. Sehingga yang dibutuhkan sekarang adalah cara memandang kita selama ini yang masih mengkotak-kotakkan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum haruslah direvolusi. Ilmu-ilmu dipandang sebagai satu kesatuan, yang setara hierarkinya, yang dari perspektif Islam, sama-sama mendapat pahala jika menuntut dan menekuninya.

Walau Islam mengajarkan integralisme keilmuan menurut Azyumardi Azra ia menyebutnya *tawhidic paradigm of sciences* pada tingkat konseptual, tetapi harus diakui bahwa pada tingkat praksis tidak jarang terjadi disharmonisasi, dan dikotomi di antara keduanya, seperti dikemukakan penjelasan di atas.¹⁴ Bahkan dikotomi sering menjangkau epistemologis, yakni antara wahyu dengan akal, atau antara “ilmu-ilmu agama” dengan “ilmu-ilmu umum”. Sebab itu, guna mengatasi disharmonisasi dikotomi tersebut para pemikir dan ilmuwan Muslim menawarkan klasifikasi ilmu lengkap dengan hierarki mereka masing-masing.

Sebagaimana dikemukakan oleh Nasr yang dikutip oleh Azyumardi Azra, berbagai cabang ilmu dan bentuk-bentuk ilmu pengetahuan dipandang dari persepektif Islam pada akhirnya adalah satu.¹⁵ Dalam Islam sendiri sebenarnya tidak ada pemisahan yang sangat esensial antara “ilmu-

¹⁴ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Jakarta, Kompas, 2006), 110.

¹⁵ Ibid



ilmu agama” dan “ilmu-ilmu umum”. Hal ini dapat kita lihat misalnya banyak intelektual muslim sebut saja Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn sina, sampai Al-Ghazali, Nashir Al-Din Al-Thusi, dan Mulla Shadra dalam berbagai disiplin ilmunya dan perspektif intelektualnya masing-masing yang dikembangkan dalam kemajuan Islam memang mengandung hierarki tertentu, tetapi pada akhirnya akan bermuara pada pengetahuan tentang “Hakikat Yang Maha Tunggal” yang merupakan substansi dari segenap ilmu. Hal ini pula terbukti dan menjadi alasan kenapa para pemikir dan ilmuwan muslim berusaha mengintegrasikan ilmu-ilmu yang dikembangkan peradaban-peradaban non-Muslim kedalam hierarki ilmu pengetahuan Islam. Kita lihat misalnya salah seorang murid Imam Malik, asy-Syafi’I (150-204 H), menyusun satu metodologi hukum yang selain bisa mempertemukan kedua kubu.¹⁶ Sehingga pertentangan kedua kubu, yang melahirkan ekspresi kebebasan berpikir, bisa diredam sedini mungkin. Kita akan lihat sejauh mana asy_Syafi’I merumuskan dasar-dasar berpikir tersebut, yang oleh Fakhr ad-Din ar-Razi dibandingkan dengan posisi Aristoteles dalam bidang filsafat. Kalau Aristoteles berhasil merumuskan satu sistem filsafat dengan metodologi mantiq (logika), asy-Syafi’i dianggap merumuskan cara-cara berpikir dalam agama dengan metodologi ushul fiqh seperti tertuang dalam *master piece*-nya, *ar-Risalah*.¹⁷ Artinya ini menandakan dalam pembentukan dasar-dasar hukum Islam, sangat menyentuh tradisi filsafat.

¹⁶ Hal ini dapat kita lihat misalnya pembakuan cara-cara berpikir dalam fiqh lahir dalam situasi ketegangan antara pendukung hadis (*naql*) dan ra’y (*‘aql*, rasio). Baca selengkapnya penjelasan Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal* (Jakarta: Erlangga, 2006), 135.

¹⁷ *Ibid.*, 135-136.

Selain asy-Syafi'i kita kenal nama dalam kancah pemikiran Islam Al-Kindi merupakan pemikir Muslim pertama yang berusaha memecahkan masalah klasifikasi. Klasifikasi pertama adalah *al-ulum al-aqliyyah*, yakni ilmu-ilmu yang disampaikan Tuhan melalui wahyu, tetapi melibatkan penggunaan akal dan nalar. Klasifikasi kedua adalah *al-ulum al-aqliyyah*, yakni ilmu-ilmu intelek, yang diperoleh terutama penggunaan akal dan pengalaman pengujian empiris. Dalam karyanya *Fi Aqşam Al-Ulum* (jenis-jenis Ilmu). Ia disusul oleh Al-Farabi, yang melalui karyanya *Kitab Al-Ulum* (Buku tentang Hierarki ilmu) memainkan pengaruh lebih luas.¹⁸

Tokoh-tokoh lain yang mampu dalam mengintegrasikan ilmu adalah Ibn Sina, Al-Ghazali, dan Ibn Rusyd yang semuanya mampu menjadi rujukan-rujukan keilmuannya sampai di dunia Barat.

Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan klasifikasi ilmu-ilmu yang demikian rumit? Hal ini menunjukkan kompleksitas ilmu-ilmu yang berkembang dalam tradisi keilmuan dan peradaban Islam. Ilmu-ilmu agama hanyalah satu bagian dari ilmu-ilmu Islam secara keseluruhan. Pada tingkat praksis bisa dikatakan, kemajuan peradaban kaum muslimin berkaitan dengan kemajuan seluruh aspek dan bidang-bidang keilmuan. Jadi, tatkala bidang-bidang ilmu tertentu dimakruhkan, apalagi diharamkan, maka akan terciptalah disharmoni, diskrepansi yang mengakibatkan retardasi muslim secara keseluruhan.¹⁹

¹⁸ Azyumarid Azra, *Paradigma Baru*, 111-112.

¹⁹ *Ibid.*, 112



Menurut Ahmad Tafsir, penamaan ilmu-ilmu yang berdasarkan al-Quran dan al-hadits kedalam kategori religius tidaklah dapat diterima, karena akan mengakibatkan subjek-subjek selainnya seperti psikologi, sejarah dan sebagainya menjadi tidak religius, padahal al-Qur`an tidak mengkontradiksikan cabang-cabang atau subjek-subjek pengetahuan.²⁰ Al-Attas membuat skema yang menjelaskan kedudukan manusia dan sekaligus pengetahuan. Bahwa pada dasarnya ilmu pengetahuan menurut dia, adalah pemberian Allah (*God Given*) dengan mengacu pada fakultas dan indra ruhaniyah manusia. Sedangkan ilmu capaian mengacu pada tingkatan dan indra jasmaniyah. Manusia terdiri dari dua unsur, jasmani dan ruhani, maka ilmu juga terbagi dua katagori, yaitu ilmu pemberian Allah (melalui wahyu ilahi), dan ilmu capaian (yang diperoleh melalui usaha pengamatan, pengalaman dan riset manusia). Akal merupakan mata rantai yang menghubungkan antara yang jasmani dan yang ruhani, karena akal pada hakikatnya adalah substansi ruhaniyah yang menjadikan manusia bisa memahami hakikat dan kebenaran ruhaniyah. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa ilmu-ilmu agama merupakan kewajiban individu yang menjadi pusat jantung diri manusia. Karena itu, dalam sistem pendidikan Islam tingkat (rendah, menengah, dan tinggi) ilmu fardlu ain harus diajarkan tidak hanya pada tingkat rendah, melainkan juga pada tingkat menengah dan tingkat universitas. Karena universitas menurut al-Attas merupakan cerminan sistematisasi yang paling tinggi, maka formulasi kandungannya harus di dahulukan. Ruang lingkup dan kandungan pada tingkat universitas harus lebih dahulu

²⁰ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 68.

dirumuskan sebelum bisa diproyeksikan ke dalam tahapan-tahapan yang lebih sedikit secara berurutan ketingkat yang lebih rendah mengingat tingkat universitas mencerminkan perumusan sistematisasi yang paling tinggi, maka formulasi kandungannya harus didahulukan.²¹

Ilmu dan agama bukan sesuatu yang harus dipisahkan, tetapi lebih pada saling mengisi. Einstain seorang ahli fisika mengemukakan “ilmu tanpa agama adalah buta”. Jadi semua punya titik temu yang mengarah pada dogma agama sebagai muaranya. Ilmu pegetahuan bermuara ke filsafat dan filsafat sebagai *mother of science* “induknya ilmu bermuara ke agama. Jadi ilmu bukanlah semata-mata otoritas duniawi yang berbeda dengan agama yang dipandang berorientasi akhirat. Ini pemahaman yang salah dan harus diluruskan bahwa ilmu itu adalah upaya akal untuk mengenal gejala alam yang tentunya sebagai cara mengenal keagungan Allah.

Akar masalah dikotomi ilmu dalam Islam di Indonesia persoalan pemisahan antara ilmu dan agama. Menurut Dr. Mochtar Naim dikotomi pendidikan adalah penyebab utama dari kesenjangan pendidikan di Indonesia dengan segala akibat yang ditimbulkannya. Hal ini merupakan warisan “leluhur” dari pihak koloni Belanda.²²

Menjadi hal yang klasik dan menjadi perdebatan umum dalam dikotomi ilmu dalam Islam hal ini dapat kita lihat orang masih membedakan “ilmu-ilmu agama” (*al-'ulum al-diniyyah* atau *religious sciences*) dengan “ilmu-ilmu umum”

²¹ Al-Attas, Syed Muhammadal-Naquib, 1994. *Konsep Pendidikan Dalam Islam Suatu Kerangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Mizan), 41.

²² Ibid.



(*general sciences*). Dikotomi yang mulai muncul dan mapan sejak abad pertengahan sejarah Islam ternyata masih bertahan di kalangan para pemikir dan praktisi pendidikan di banyak wilayah dunia muslim termasuk Indonesia baik pada tingkat konsepsi maupun kelembagaan pendidikan.²³

Berbicara lebih jauh tentang pengdikotomian ilmu hal ini sangatlah terkait dengan masalah dikotomi pendidikan (kelembagaan), sehingga berimbas pada terjadinya dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama dalam arti kelembagaan yang dimana hal ini merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda, karena anak-anak yang bisa masuk sekolah Belanda sebelum kemerdekaan hanya 6% dan terbatas bagi anak-anak kaum bangsawan dan saudagar, maka anak-anak orang Islam memilih madrasah atau pondok pesantren, yang memang sudah ada sebelum munculnya sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda. Karena tekanan politik pemerintah kolonial, maka sekolah-sekolah agama Islam memisah diri dan terkontak dalam kubu tersendiri. Sehingga dengan sendirinya mulailah pendidikan terkotak-kotak (dikotomi) antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Bila kita menoleh sejarah pendidikan Islam maka menurut Azyumardi Azra, hal ini bermula dari *historical accident* atau “kecelakaan sejarah”, yaitu ketika ilmu-ilmu umum (keduniaan) yang bertitik tolak pada penelitian empiris, rasio, dan logika mendapat serangan yang hebat dari kaum fuqaha.²⁴

²³ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru*, 101.

²⁴ Baca selengkapnya Jasa Ungguh Muliawan, *Pendidikan Islam Integratif: Upaya Mengintegrasikan Kembali dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 206-208.

Setelah kemerdekaan, dulaisme yang diwariskan pemerintah kolonial Belanda tetap mengakar dalam dunia pendidikan kita. Pandangan beberapa pejabat yang menangani bidang pendidikan yang kurang menghargai sekolah-sekolah Islam mendorong sebagian pemimpin dan pengelola sekolah tersebut berpegang pada sikap semula : berdiri di kutub yang berbeda dengan sekolah umum. Oleh karena itu keikutsertaan Departemen Agama secara historis dalam menangani sekolah-sekolah agama sangat diperlukan. Sebab kalau tidak sekolah-sekolah akan berjalan dengan arahnya sendiri-sendiri. Dengan tugas dan fungsinya dibidang pendidikan, Departemen agama telah mengemban konsep konvergensi yaitu satu pihak memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum sekolah agama.

Kemudian dengan dikeluarkannya surat keputusan Menteri Pendidikan, Menteri Agama dan Mendagri tentang peningkatan mutu pendidikan madrasah juga menjadi usaha untuk menghilangkan dikotomi pendidikan di Indonesia, walaupun secara kelembagaan berjalan terus.²⁵ Akan tetapi SKB tiga menteri ini tidak banyak mengatasi problem dikotomi yang hingga kini tetap menjadi-jadi.

Hubungan antara ilmu dan agama ialah suatu pemikiran manusia terhadap kebenaran hakiki Allah, melalui *fenomena qauniyah* dan *fenomena aqliyah* yang berkembang terus menerus. Inti pemahaman hubungan tersebut ialah keimanan dan

²⁵ Pada sekitar pertengahan decade tahun 1970-an, perhatian pemerintah mulai ditujukan pada pembinaan madrasah secara lebih sistematis, misalnya, dengan lahirnya kurikulum 1973 dan SKB 3 Menteri pada 24 Maret 1975 yang mengaskan bahwa kedudukan madrasah sejajar dengan sekolah formal dapat dilihat selengkapnya. Baca selengkapnya, Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif* (Yogyakarta: LKIS, 2008), 205.



ketundukan mutlak manusia kepada Allah yang tercermin dalam sikap dan perilaku:

1. Kebenaran Mutlak (*al-haq*) hanya kepada Allah semata dan kebenaran yang dicapai manusia (dengan *qauniyah* atau *naqliyah*) hanya kebenaran relatif
2. Keyakinan akan tiadanya pertentangan antara ilmu dan agama karena keduanya berasal dari sumber yang sama
3. Kesadaran bahwa ilmu bukan satu-satunya sumber kebenaran dan bukan satu-satunya jalan pemecahan bagi problema kehidupan manusia.

C. Faktor-Faktor yang menyebabkan timbulnya dikotomi dan dualisme dalam pendidikan

Lantas, mengapa terjadi dikotomi ilmu? Dikotomi dalam pendidikan Islam timbul akibat dari beberapa hal. *Pertama*, faktor perkembangan pembedaan ilmu itu sendiri, yang bergerak demikian pesat sehingga membentuk berbagai cabang disiplin ilmu, bahkan anak cabangnya. Hal ini menyebabkan jarak ilmu dengan induknya, filsafat, dan antara ilmu agama dengan ilmu umum, kian jauh. Epistemologi merupakan salah satu wilayah kajian filsafat yang disebut juga dengan filsafat ilmu (*philosophy of knowledge*). Epistemologi membahas tentang apa itu "tahu", bagaimana cara mengetahui, untuk apa mengetahui, juga tentang dasar-dasar, sumber, tujuan dan klasifikasi pengetahuan. dari epistemologi, muncullah struktur ilmu pengetahuan sampai ke anak cabang.²⁶ Sebagai contoh, ketika filsafat sebagai induk segala ilmu (*mother off all sciences*) mengalami pembedaan

²⁶ Baca selengkapnya mengenai epistemologi dalam Islam Mahmud Arif, *Pendidikan Islam*, 27-101.

dalam struktur ilmu, anggap saja ilmu pendidikan, maka disiplin ilmu pendidikan pun pecah menjadi cabang ilmu yang makin spesifik: teknologi pendidikan, psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan, dan seterusnya. Kemudian, cabang ilmu pendidikan tersebut pecah lagi menjadi anak cabang, semisal perencanaan pendidikan, perencanaan kurikulum, strategi belajar mengajar, dan seterusnya. Tak pelak lagi hal ini menyebabkan jarak antar filsafat sebagai induk menjadi kian jauh dengan anak cabang ilmu. Hal ini menyebabkan munculnya spesialisasi keilmuan, di mana pelakunya menjadi ahli atau profesional di bidangnya masing-masing.²⁷

Kedua, faktor historis perkembangan umat Islam ketika mengalami masa stagnan atau kemunduran sejak Abad Pertengahan (tahun 1250-1800 M), yang pengaruhnya bahkan masih terasa sampai kini atau meminjam istilah Azra hal ini disebabkan karena kesalahan sejarah (*historical accident*). Pada masa ini, dominasi *fuqaha* dalam pendidikan Islam sangatlah kuat, sehingga terjadi kristalisasi anggapan bahwa ilmu agama tergolong *fardlu 'ain* atau kewajiban individu, sedangkan ilmu umum termasuk *fardlu kifayah* atau kewajiban kolektif.²⁸ Akibat faktor ini, umat dan negara yang berpenduduk mayoritas Islam saat ini tertinggal jauh dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) bila dibandingkan dengan umat dan negara lain.

²⁷ Baca selengkapnya .Abd. Rahman Assegaf, *Pengantar*, vii-ix.

²⁸ *Ibid.*, ix dan hal senada disampaikan Azyumardi Azra, *Rekonstruksi Kritis Ilmu dan Pendidikan Islam*, dalam Abdul Munir Mulkhan, dkk., *Religiusitas Iptek* (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pustaka Pelajar, 1998), 87. serta Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan*, 115.



Ketiga, faktor internal kelembagaan pendidikan Islam yang kurang mampu melakukan upaya pembenahan dan pembaruan akibat kompleksnya problematika ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya yang dihadapi umat dan negara yang berpenduduk mayoritas Islam.²⁹ Sehingga, dalam lembaga pendidikan Islam tidak terjadi dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Sebenarnya, asumsi mengenai dikotomik ini, bukanlah monopoli lembaga pendidikan. Bagaikan sebuah wabah, symptom dikotomi ini menyerang ke seluruh penjuru kehidupan umat Islam, seperti terjadinya polarisasi Sunni-Syī'ah, bahkan faksi-faksi dalam Sunni sendiri, ekstremitas dan fanatisme mazhab dan aliran teologi. Adapun dalam pendidikan Islam itu sendiri, masih menghadapi pola pikir dikotomik, yakni dikotomisme antara urusan duniawi-ukhrawi, akal-wahyu, iman-ilmu, Allah-manusia-alam, dan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Sehingga mau tidak mau paradigma masyarakat kita sudah terjadi dikotomi tersebut. Bahkan hal ini diperparah lagi kondisi pendidikan kita yang dipengaruhi oleh sistem politik, budaya, hukum, dan seterusnya yang melanda umat Islam, sebagai krisis yang dialami pendidikan Islam.

Setelah kita berbicara mengenai akar masalah dikotomi ilmu di Indonesia, sekarang akan dipaparkan penyebab dan akibatnya dikotomi ini secara luas (sejarah Islam). Kemunculan dikotomi pendidikan menurut Azyumardi Azra sebagaimana dikutip oleh Jasa Ungguh Muliawan, ia bermula dari *historical accident* atau "kecelakaan sejarah", yaitu ketika ilmu-ilmu umum (keduniaan) yang bertitik tolak pada penelitian empiris, rasio, dan logika mendapat serangan

²⁹ Ibid.

yang hebat dari kaum fuqaha.³⁰ Selain itu terjadinya krisis multidimensi dalam pendidikan Islam, meminjam istilah Azyumardi Azra ia melihat pada persoalan-persoalan yang memang secara riil dihadapi oleh sistem pemikiran dan pendidikan Islam pada umumnya.

Sedangkan secara gamblang Azyumardi Azra menyebutkan bahwa permasalahan dikotomi pendidikan (ilmu) pertama berkaitan dengan situasi objektif pendidikan Islam, yaitu adanya krisis konseptual baik itu pada tataran epistemologisnya. Krisis konseptual tentang definisi atau terjadinya pembatasan ilmu-ilmu dalam sistem pendidikan Islam itu sendiri, atau melihat konteks Indonesia adalah Sistem Pendidikan Nasional.³¹

Pada prinsipnya dikotomi keilmuan (pendidikan) dan akhirnya sampai pada tingkat kelembagaan, disebabkan ketiadaan perbedaan antara pendidikan Islam sebagai ilmu dengan Pendidikan Islam sebagai Lembaga Pendidikan. Ketidak jelasan ini terlihat dengan ketidakmampuan membedakan antara pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam.³²

Krisis konseptual yang dimaksud adalah terjadinya pembagian ilmu-ilmu di dalam Islam. Kita sering mendengar adanya istilah ilmu-ilmu profane, yaitu ilmu-ilmu keduniaan (*general sciences*), yang kemudian dihadapkan

³⁰ Azyumardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), 94., Hal senada disebutkan pula Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan*, 115. dan lihat pula Jasa Ungguh Muliawan, *Pendidikan Islam*, 206.

³¹ Azyumarid Azra, *Paradigma Baru*, 114.

³² *Ibid.*, 217-221



dengan ilmu-ilmu agama (*al-'ulum al-diniyyah/religious sciences*) atau menurut pendapat Azyumardi Azra yaitu ilmu-ilmu sacral (transenden).³³ Sehingga hal ini berimplikasi bukan hanya pada tataran bidang keilmuan itu sendiri, tapi juga hal ini menyebabkan terjadinya pengkotakan (adanya gap) pada bidang kelembagaan, yang selanjutnya juga akan menimbulkan krisis kelembagaan.

Krisis kelembagaan ini adalah adanya dikotomisasi antara lembaga-lembaga pendidikan yang menekankan pada salah satu aspek dari ilmu-ilmu yang ada, apakah ilmu-ilmu agama ataukah ilmu-ilmu umum. Ini jelas sekali terefleksi di Indonesia; misalnya dengan adanya dualisme sistem pendidikan, pendidikan agama yang diwakili madrasah dan pesantren dengan pendidikan umum; di tingkat pendidikan tinggi terdapat IAIN (sekarang UIN) dan perguruan tinggi umum.³⁴

Hal ini dapat pula berimplikasi mulai dari segi pendanaan pendidikan yang dibawah naungan Diknas dan Depag sangat jauh berbeda, sehingga hal ini pula dapat berimplikasi pada penunjang sarana dan prasarana. Akan tetapi seiring waktu UIN dengan segala perkembangannya membuka Fakultas Tadris yang membuka jurusan-jurusan ilmu-ilmu umum. Hal ini menjadi babak baru buat memecahkan masalah dikotomi pendidikan di Indonesia.

Sedangkan menurut al-Faruqi, setidaknya terdapat dua (2) penyebab pokok terjadinya dikotomi pendidikan dan dunia Islam, sebagai berikut.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid., 116-117.

1. Imperialisme dan kolonialisme Barat atas dunia Islam

Sebagai akibat dari kerusakan mengerikan yang ditimbulkan orang-orang non-Muslim kepada umat di abad ke-6 dan ke-7 H. Pada abad ke-12 dan ke-13M., yakni serbuan tentara Tartar dari Timur dan pasukan Salib dari Barat, para pemimpin Muslim kehilangan akal dan tidak mempunyai keyakinan kepada diri sendiri. Mereka berfikir bahwa dunia mereka mengalami bencana, mereka mengambil sikap yang sangat konservatif dan berusaha untuk menjaga identitas dan milik mereka yang paling berharga (Islam) dengan melarang segala bentuk inovasi dan mengemukakan ketaatan fanatik secara harfiah kepada *syari'ah*. Saat itu mereka meninggalkan sumber utama kreativitas, yakni "ijtihad".

Mereka mencanangkan pintu ijtihad tertutup, mereka memperlakukan *syari'ah* sebagai hasil karya yang sempurna dari para leluhur. Mereka menyatakan bahwa setiap penyimpangan dari *syari'ah* adalah inovasi, dan setiap inovasi tidak disukai dan terkutuk. Sebagaimana yang dijelaskan di sekolah-sekolah, *syari'ah* harus menjadi beku dan karenanya menjaga keselamatan Islam. Kebangkitan Islam, terlebih kemenangan dan ekspansi kaum Muslimin ke Rusia, Balkan, Eropa Tengah, dan Barat Daya di sekitar abad ke-8 dan ke-12 tidak dapat meniadakan tindakan-tindakan konservatif tersebut.³⁵

Pada zaman modern, Barat membebaskan daerah-daerah yang ditaklukkan Ottoman di Eropa. Barat menduduki, menjajah, dan memecah belah dunia Islam, kecuali Turki karena di sini kekuatan Barat berhasil diusir. Sementara

³⁵ Isma'il Raji al-Faruqi, *Islamisasi*, 40-41.



Yaman dan Arab Tengah dan Barat tidak menarik untuk dijadikan daerah jajahan. Kekuatan Barat mengeksploitir kelemahan kaum Muslimin sebesar mungkin, dan merekalah yang menyebabkan *malaise* yang dialami dunia Islam. Sebagai respon terhadap kekalahan, tragedi, dan krisis yang ditimbulkan Barat di dunia Islam dalam dua abad terakhir ini, para pemimpin muslim di Turki, Mesir, dan India mencoba melakukan westernisasi terhadap umat dengan harapan membuatnya dapat bertahan secara politik, ekonomi, dan militer.³⁶

2. Pemisahan antara Pemikiran dan Aksi di Kalangan Umat Islam

Di awal sejarah Islam, pemimpin adalah pemikir dan pemikir adalah pemimpin. Wawasan Islam pada waktu itu dominan, dan hasrat untuk mewujudkan wawasan Islam di dalam sejarah menentukan semua tingkah laku. Itulah keasyikan dari seluruh masyarakat Islam. Setiap Muslim yang sadar berusaha menyelidiki realitas tentang materi-materi dan kesempatan-kesempatan untuk kemudian dibentuk kembali ke dalam pola-pola Islam.

Pada waktu yang bersamaan, seorang *faqih* (ahli fiqih) adalah *imam*, *mujtahid*, *qari*, *muhaddits*, *guru*, *mutakallimun*, pemimpin politik, jenderal, petani atau pengusaha, dan kaum profesional. Jika ada yang merasa lemah, maka orang-orang di sekelilingnya dengan senang hati akan membantunya dalam mengatasi kekurangan itu. Semua orang memberikan semuanya demi cita-cita Islam.³⁷ Di

³⁶ Ibid., 41-42.

³⁷ 48-49.

kemudian hari, kesatupaduan antara pemikiran dan aksi ini pecah. Saat keduanya terpisah, masing-masing kondisinya memburuk. Para pemimpin politik dan pemilik kebijakan mengalami krisis tanpa memperoleh manfaat pemikiran, tanpa berkonsultasi kepada para cerdik-pandai, dan tidak memperoleh kearifan mereka. Akibatnya adalah kemandegan (stagnasi) yang membuat warga cerdik merasa asing dan semakin terisolasi para pemimpin. Untuk mempertahankan posisi mereka, para pemimpin politik melakukan kesalahan yang semakin banyak dan besar. Di pihak lain, para pemikir menjadi asing dan semakin jauh dari keterlibatan aktif di dalam urusan umat, mengambil hal ideal sebagai balasan mereka dalam mengutuk otoritas politik.³⁸

Di saat itulah stagnasi pemikiran di kalangan umat Islam tampak nyata, karena tidak padunya berbagai pemikiran dan aksi di dalamnya. Stagnasi pemikiran di dunia Islam itu terjadi juga karena umat Islam terlena dalam kelesuan politik dan budaya.³⁹ Mereka cenderung menengok ke belakang ke romantisme kejayaan Islam masa silam. Para sarjana Barat seolah mengatakan bahwa rasa kebanggaan dan keunggulan budaya masa lampau telah membuat para sarjana Muslim tidak menanggapi tantangan yang dilemparkan oleh para sarjana Barat. Padahal bila tantangan itu ditanggapi secara positif dan arif, dunia Muslim akan dapat mengasimilasikan ilmu pengetahuan baru dan bisa memberinya arah.

Menurut al-Faruqi, sebagai prasyarat untuk menghilangkan dualisme sistem pendidikan, yang

³⁸ Ibid., 50-51

³⁹ M. Shofan, *Pendidikan Berparadigma Profetik*. (Yogyakarta: Ircisod-UMG Press. 2004), 10-13



selanjutnya juga menghilangkan dulaisme kehidupan, demi mencari solusi dari *malise* yang dihadapi umat, pengetahuan harus diIslamisasikan, sambil menghindari perangkap dan kekurangan metodologi tradisional. Islamisasi pengetahuan itu harus mengamati sejumlah prinsip yang merupakan esensi Islam.⁴⁰ Untuk menuang kembali disiplin-disipilin di bawah kerangka Islam berarti membuat teori, metode, prinsip, dan tujuan untuk tunduk kepada: keesaan Allah, kesatuan alam semesta, kesatuan pengetahuan dan kebenaran, kesatuan hidup, dan kesatuan umat manusia.⁴¹

D. Sejarah timbulnya dikotomi dan dulaisme pendidikan di Indonesia

Sejarah di Indonesia, membuktikan terwujudnya komunitas haji, ulama, santri dan pedagang membuat anti terhadap imperialisme Belanda, seperti yang dilansir Clifford, pertumbuhan pesantren yang anti imperialism Belanda membangkitkan Santri Insurrection atau pemberontakan santri seperti yang terjadi pada tahun 1820-1880 terjadi paling tidak lima kali pemberontakan santri seperti perang Paderi (1821-1828), Perang Dipenogoro, Perang Banjarmasin, Perang Aceh dan perang Banten dan masih banyak perang lainnya dimotori oleh gerakan santri, kiayai, ulama yang berbasis Islam. Hal ini menimbulkan kecurigaan Pemerintah Belanda terhadap Islam.⁴²

⁴⁰ Isma'il Raji al-Faruqi, *Islamisasi*, 55-96.

⁴¹ Jalaludin dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999), 160.

⁴² Baca buku Abdulah Hamid, *Pemikiran Modern dalam Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2010), 289-305. yang menjelaskan tentang kronologis terjadinya kecurigaan Belanda terhadap pesantren di Indonesia, karena dalam ajaran Islam pemerintahan Belanda merupakan pemerintahan kafir yang harus dilawan dengan jihad, sehingga Belanda mempelajari

Sekolah pendidikan dasar telah diperkenalkan oleh Belanda di Indonesia. Sekolah yang tadinya hanya untuk kalangan keturunan Belanda, di negara jajahan Belanda (1870) mulai membuka sekolah bagi kaum bumi putera (SR). Hal tersebut nampaknya juga akibat pengaruh paham humanisme dan kelahiran baru yang melanda negeri Belanda.

Program utamanya saat itu mungkin hanya untuk kepentingan Belanda juga (untuk meningkatkan produktivitas di tanah jajahannya). Untuk Perguruan tinggi dimulai dengan berdirinya sekolah-sekolah kejuruan. Misal STOVIA(1902)

dengan serius seluk beluk Islam di Indonesia yang melahirkan *Dutch Islamic Policy* yang lebih dikenal Politik Islam Hindia Belanda dengan Tokoh Utamanya Snouck Hurgronje. Hasil analisis Snouck Hurgronje Islam di Indonesia terbagi kepada dua bagian besar yaitu Islam sebagai religius yang menyarankan kepada pemerintah agar berlaku toleran agar tercipta ketenangan dan stabilitas, dan Islam sebagai politik yang harus dicurigai dan diawasi secara teliti darimana datangnya, terutama yang dipengaruhi pan Islami. Beberapa taktik Pemerintah Belanda dalam memadamkan pergerakan dan perlawanan santri muslim Indonesia antara lain: depolitasi ulama dan santri, merusak teologi dan ideology masyarakat petani dengan tanam paksa, mencegah asimilasi pribumi-china, mencegah Islam priyayi, memperalut komunisme, dan ordonasi guru. Penerbitan Ordonansi Guru. Kebijakan ini mewajibkan guru-guru agama untuk memiliki surat izin dari pemerintah. Tidak setiap orang, meskipun ahli ilmu agama, dapat mengajar di Lembaga-lembaga pendidikan. Dalam perkembangannya, Ordonansi Guru itu sendiri mengalami perubahan dari keharusan guru agama mendapatkan surat izin menjadi keharusan guru agama itu cukup melapor dan memberitahu saja. Peraturan ini mungkin disebabkan oleh adanya gerakan organisasi pendidikan Islam yang sudah tampak tumbuh seperti Muhammadiyah, Partai Syarikat Islam, *Al-Irsyad*, *Nahdatul Watan* dan lain-lain. Pada tahun-tahun itu memang sudah terasa adanya ketakutan dari pemerintah Belanda terhadap kebangkitan pribumi. Lembaga-lembaga pendidikan Islam pada saat itu sudah banyak berkembang, pemerintah Belanda mengadakan control secara ketat dan segera mendirikan lembaga pendidikan bagi Indonesia terutama kalangan bangsawan/ ningrat yang dikenal sekolah bumi putera dengan tujuan utama mendambakan kesatuan Indonesia dan Belanda dalam satu ikatan Pax Neerlandica yang mengajarkan pendidikan modern dengan tujuan mengurangi dan mengalahkan pengaruh Islam di Indonesia.



yang kemudia berubah jadi NIAS(1913) dan GHS adalah cikal bakal dari fakultas kedokterannya UI. Lalu juga Rechts School (1922) dan Rechthoogen School (1924) kemudian melebur jadi fakultas hukumnya UI. Juga disusul beberapa fakultas lainnya.

Zakiah Darajat mengungkapkan pada masa pemerintahan Belanda, pendidikan agama tidak diberikan di sekolah-sekolah negeri dengan alasan pemerintah bersikap netral untuk tidak mencampuri masalah pendidikan agama, karena pendidikan agama merupakan tanggung jawab keluarga, sehingga setiap usulan wakil-wakil rakyat pribumi di Volksraad agar memasukan pelajaran agama Islam di di Perguruan Umum selalu ditolaknya, yang dibolehkan hanya di sekolah-sekolah partikulir (swasta) yang berdasarkan keagamaan.⁴³

Pemerintah Belanda menerapkan pengawasan dan kontrol yang sangat ketat dan kaku, kontrol yang ketat ini dijadikan alat politik untuk menghambat dan bahkan menghalang-halangi pelaksanaan pendidikan Islam, dengan membentuk suatu badan yang khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut *Priesnterraden*.

Ordonansi guru dikenal pada masa pemerintah Belanda dengan mengeluarkan peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah yang disebut Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*). Selain itu untuk lingkungan kehidupan

⁴³ Zakiah Darajat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta, Bumi Aksara, 1992), 90-91.

agama Kristen di Indonesia yang selalu menghadapi reaksi dari rakyat, dan untuk menjaga sekolah umum yang kebanyakan muridnya beragama Islam, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang disebut netral agama. Seperti yang dinyatakan pada *Indische Staatsregeling* bahwa pendidikan umum adalah netral, yang berarti pengajaran diberikan dengan menghormati keyakinan masing-masing. Namun disekolah umum untuk kalangan pribumi, pada HIS dan MULO diberikan pelajaran agama Islam, secara sukarela sekali dalam seminggu bagi murid-murid yang berminat atas persetujuan orang tuanya.

Pemerintah Belanda sendiri yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi pribumi, membentuk dua lembaga, yaitu Departemen *van Onderwijst en Eerendinst* untuk mengawasi pengajaran agama di sekolah umum dan Departemen *van Binnenlandsche Zaken* untuk pendidikan Islam dilembaga pendidikan Islam. Kebijakan pemerintah kolonial yang memarjinalkan aspirasi dan kepentingan kalangan muslim menjadi cikal bakal terciptanya dualitas pengaturan negara terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan kepentingan kalangan muslim.

Dalam konteks Indonesia, dikotomi dimulai semenjak Indonesia mengenal sistem pendidikan modern. Ilmu-ilmu Islam, misalnya, ia berada di bawah Depag (Departemen Agama). Sementara ilmu-ilmu umum (sekuler) berada di bawah Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional). Repotnya hal ini sangat berpengaruh pada fasilitas dan anggaran dana. Kalau kita perhatikan APBN 2006, misalnya,



ternyata yang terakhir ini anggarannya relatif lebih subur (Rp. 36.755,9 milyar) daripada yang pertama (hanyasebesar Rp. 9.720,9 milyar: berbanding 79,1% : 21,9%.

Ketika undang-undang pendidikan nasional pertama yaitu, UU No. 4 Tahun 1950 (tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah) diundangkan, madrasah dan pesantren sebagai pendidikan Islam tidak dimasukan sama sekali ke dalam sistem pendidikan nasional, yang ada hanya masalah pendidikan agama yang diajarkan di sekolah (umum), pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem dari sistem pendidikan nasional, tetapi merupakan lembaga pendidikan di bawah Menteri Agama.⁴⁴ Menurut pemerintah hal ini disebabkan karena sistem pendidikan Islam lebih didominasi oleh muatan-muatan agama, yang menggunakan kurikulum belum terstandarkan, memiliki struktur yang tidak seragam, dan memberlakukan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah.

Pada tahun 1974, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tentang kewenangan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di bawah satu pintu, yaitu oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pendidikan agama. Keputusan itu diikuti oleh Inpres No. 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden tersebut. Ternyata keputusan ini mendapat tantangan keras dari kalangan Islam. Alasannya bahwa dengan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional memang madrasah akan mendapat

⁴⁴ Lihat undang-undang No.4 tahun 1954 yang diberlakukan dengan Undang-undang No.12 tahun 1954 untuk menjalankan undang-undang pendidikan dasar dan pengajaran. .

status yang sama dengan sekolah, tetapi dengan status ini terdapat kongkurensi bahwa madrasah harus dikelola oleh Depdikbud sebagai satu-satunya departemen yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional. Mereka lebih menghendaki madrasah tetap berada di bawah Departemen Agama.

Bahkan sebagian umat Islam memandang Kepres dan Inpres tersebut sebagai manuver untuk mengabaikan peranan dan manfaat madrasah, juga dipandang sebagai langkah untuk mengebiri tugas dan peranan Departemen Agama dan bagian dari upaya sekulerisasi yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Hal ini cukup beralasan dikaitkan dengan setting sosial politik yang berlangsung pada awal pemerintah Orde Baru yang menerapkan kebijakan politik yang memarjinalkan politik Islam melalui pengebirian partai politik Islam.

Setelah Indonesia merdeka, para pemimpin dan perintis kemerdekaan menyadari betapa pentingnya pendidikan agama. Kihajar Dewantoro selaku Menteri pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan pada kabinet pertama menyatakan pendidikan agama perlu diajarkan di sekolah-sekolah negeri. Kemudian pada 3 Januari 1946 didirikanlah Kementerian Agama yang bertugas beberapa diantaranya melaksanakan kewajiban-kewajibannya antara lain urusan pelajaran dan pendidikan agama Islam dan Kristen, mengangkat guru agama dan mengadakan pengawasan pelajaran agama.⁴⁵

Ilmu-ilmu pengetahuan modern yang banyak berdasar kepada hukum alam (*natural laws sunnatullah*) tidak

⁴⁵ Zakiah Darajat, dkk, *Ilmu Pendidikan*, 91.



bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Hukum alam dan wahyu berasal dari Tuhan, maka antara keduanya tidak mungkin bertentangan dan ilmu pengetahuan mesti sesuai dengan Islam. Islam di masa lampau mengalami kemajuan yang disebabkan oleh salah satunya yaitu kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu, maka untuk mencapai kemajuan yang hilang umat Islam harus kembali mempelajari dan mementingkan ilmu pengetahuan.⁴⁶

Untuk merealisasikan hasil di bidang pendidikan agama, maka diterbitkan peraturan Bersama Menteri PP&K dan Menteri Agama No. 1142/Bhg A (Pengajaran)/No.1285/KJ Agama tanggal 2-12-1946 yang menentukan pelajaran agama di Sekolah Rakyat sejak kelas IV dan mulai berlaku 1-1-1947. Kemudian lahir UU.No. 4 /1950 Jo.No.12/1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Salah satunya pasal 20 Bab 12 yang menyatakan bahwa dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.⁴⁷

Pelajaran agama kemudian ditetapkan dengan TAP MPRS No.II/MPRS/1960 dengan menjadikan pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah sejak Sekolah Dasar (SD) sampai Universitas Negeri hingga saat ini.⁴⁸

Abuddin Nata membagi kebijakan pemerintahan Indonesia secara umum dalam bidang pendidikan ke dalam empat periode sebagai berikut.

⁴⁶ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, 56.

⁴⁷ Zakiah Darajat, dkk. *Ilmu Pendidikan*, 91

⁴⁸ *Ibid.*, 93

1. Masa pra kemerdekaan, yaitu masa penjajah Belanda yang menerapkan diskriminatif terhadap rakyat jajahannya dan termasuk pelit dalam memberikan pendidikan bagi rakyatnya. Belanda membiarkan kebodohan agar mudah ditindas, dijajah dan diadudomba. Kemudian sedikit ada perubahan setelah ada tekanan internasional yang dikenal dengan politik etis, salah satunya menyediakan pendidikan kepada rakyat secara terbatas dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang dipekerjakan di beberapa perusahaan milik Belanda.⁴⁹ Belanda tidak suka terhadap keberadaan pendidikan Islam yang diselenggarakan di Pesantren, madrasah dan sebagainya karena dianggap sebagai sarang pemberontak, dan pembangkang yang dikenal sebagai konsep jihad dan menganggap Belanda sebagai orang kafir yang harus diperangi, sehingga umat Islam bersikap non-kooperatif, tidak mau bekerjasama dengan pemerintah Belanda.⁵⁰
2. Masa pasca kemerdekaan yang dikenal masa orde lama. Pada masa ini terjadi upaya pembaharuan dan memperbanyak lembaga pendidikan Islam yang lebih bermutu sejalan dengan tuntutan zaman, namun suhu politik pada saat itu sedang mengalami pancaroba dan mencari bentuknya.⁵¹
3. Masa Orde Baru, pendidikan pada masa ini bersifat sentralistik, refresif dan depolitisasi masyarakat yang harus berorientasi kepada loyalitas terhadap pemerintahan.

⁴⁹ Abudin Nata, *Manajemen Pendidikan, Mengatasi kelemahan pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prebada Media Group, 2008), 9.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid. 10.



Anggaran alokasi untuk pendidikan sangat minim bila dibandingkan dengan Negara-negara berkembang lainnya yang tidak pernah mencapai 10% dari APBN.⁵²

4. Masa orde reformasi, dimana semakin berkembangnya wacana demokrasi, sehingga menghasilkan Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional.⁵³

Kondisi demikian pada akhirnya pemerintah terlibat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan mengembangkan beberapa madrasah menjadi madrasah negeri. Alasannya ialah karena situasi dan kondisi sosio-kultural-politik sudah berubah. Kalau kekuatan sosio politik pada awal kemerdekaan terbelah tajam secara ideologis menjadi nasionalis sekuler dan nasionalis Islam yang keduanya terlibat dalam pergumulan politik ideologis sedemikian keras, maka sekarang sudah berubah. Kalau para tokoh nasionalis Islam di awal kemerdekaan memperjuangkan masuknya pendidikan Islam (keagamaan) dalam pengelolaan Departemen Agama merupakan keharusan sejarah, maka tidak demikian halnya di waktu sekarang.

Ada dua ancaman dari dulaisme pendidikan yang harus diwaspadai menurut Ahmad Tafsir, *pertama*, subjek-subjek baru yang diambil dari sekolah modern akan mengambil waktu yang lebih lama dalam kurikulum yang akan mengurangi subjek-subjek esensial mengakibatkan semangat keislaman semakin melemah, *kedua* kekurangwaspadaan menyebabkan masuknya sekularisme ke dalam pemikiran Islam. Agama dibatasi dalam beberapa jam pelajaran agama

⁵² Ibid. 16.

⁵³ Ibid.

yang pada akhirnya akan mengeluarkan agama dari aspek-aspek tertentu kehidupan manusia terutama sains.⁵⁴

E. Dampak akibat dari dikotomi dan dualisme pendidikan di Indonesia

Zakiah Darajat menuliskan dengan gamblang tentang tragedy dunia modern yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pola pikir manusia modern antara lain kebutuhan hidup yang meningkat, rasa individualistis dan egois, persaingan dalam hidup, keadaan yang tidak stabil yang disebabkan akibat perkembangan ilmu pengetahuan yang berjalan cepat tetapi tidak disertai oleh agama yang pada akhirnya membawa lengahnya orang kepada kepercayaan agama yang dahulu dijadikan sebagai pengendali tingkah laku dan sikap dalam hidup, logika dan cara-cara ilmiah menonjol, sedangkan segi-segi perasaan dan emosi kurang mendapat perhatian bahkan tidak dihiraukan sama sekali.⁵⁵

Gambaran sejarah pendidikan di Indonesia saat ini bisa dialami bersama. Dari gambaran di atas ternyata masalah pendidikan bukan sekedar tergantung pada teory dan ilmu pendidikan itu saja, tapi juga iklim sosial budaya dan politik ikut berperan. Namun bukan alasan untuk tidak memperbaharui kehidupan melalui pembaharuan konsep

⁵⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung Remaja Rosda Karya, 2007), 68.

⁵⁵ Lihat penjelasan Zakiah Darajat, *Peran Agama dalam Kesehatan Mental* (Jakarta, Gunung Agung, 1996), 8. lebih rinci dijelaskan bahwa pengetahuan tanpa agama membahayakan, harta tanpa agama menyengsarakan, kedudukan tanpa agama menggelisahkan dan jiwa manusia membutuhkan agama. Kemudian ia menjelaskan fungsi agama dalam kehidupan sebagai bimbingan dalam hidup, penolong dalam kesukaran, dapat menenteramkan batin, pengendali moral, sebagai terapi terhadap gangguan kejiwaan dan sebagai psikoterapi dalam pembinaan mental.



pendidikan itu sendiri. Jadi reformasi pendidikan adalah mutlak perlu dilakukan terus menerus sesuai perubahan pemahaman umat akan kehidupan itu sendiri.

Dengan munculnya dikotomi (dualisme) pendidikan merupakan pukulan besar yang sudah lama menghinggapi pendidikan di Indonesia, sehingga hal ini mempunyai dampak negatif yaitu:

1. Anti agama telah dipersempit yaitu sejauh yang berkaitan dengan aspek teologi Islam yang diajarkan disekolah-sekolah agama selama ini.
2. Sekolah agama telah terkotak dalam kubu tersendiri
3. Sumber masukan sekolah agama dan perguruan tinggi Agama Islam rata-rata ber IQ rendah, maka mutu tamatannya adalah tergolong kelas dua.
4. Kegiatan keagamaan dan api keislaman di IAIN dan perguruan Agama Islam kurang menonjol dan kurang dirasakan dibandingkan perguruan tinggi umum.

Adanya dikotomi dalam pendidikan yakni ilmu umum dan ilmu agama dengan memotong hubungan kedua ilmu tersebut, itulah yang diakomodir undang-undang Pendidikan, melihat UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 Bab VI, pasal 15 yang berbunyi: "Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan". Dari pasal tersebut tampak jelas terjadinya dikotomi dalam pendidikan agama dan pendidikan umum, di tingkat kelembagaan pun dipisahkan antara perguruan tinggi agama seperti UIN Syarif Hidayatullah dan perguruan tinggi umum seperti ITB, UI dan lain-lain.

Pendidikan agama melalui madrasah, institut agama, dan pesantren dikelola oleh Departemen Agama, sedangkan pendidikan umum melalui sekolah dasar, sekolah menengah, dan kejuruan serta perguruan tinggi umum dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional. Pendidikan Islam tidak semata-mata mengajarkan pengetahuan Islam secara teoritik sehingga hanya menghasilkan seorang Islamolog, tetapi pendidikan Islam juga menekankan pada pembentukan sikap dan perilaku yang Islami dengan kata lain membentuk manusia *Islamist*.

F. Solusi dalam menangani dikotomi dan dualisme pendidikan di Indonesia

Mengenai persoalan dikotomi, tawaran Fazlur Rahman, salah satu pendekatannya adalah dengan menerima pendidikan sekuler modern sebagaimana telah berkembang secara umumnya di dunia Barat dan mencoba untuk “mengislamkan”nya yakni mengisinya dengan konsep-konsep kunci tertentu dari Islam. Lebih lanjut persoalannya adalah bagaimana melakukan modernisasi pendidikan Islam, yakni membuatnya mampu untuk produktivitas intelektual Islam yang kreatif dalam semua bidang usaha intelektual bersama-sama dengan keterkaiatan yang serius kepada Islam.⁵⁶ Syafi’i Ma’arif mengatakan bila konsep dualisme dikotomik berhasil ditumbangkan, dalam jangka panjang sistem pendidikan Islam akan berubah secara keseluruhan, mulai dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi.⁵⁷

⁵⁶ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, The terj. Ahsin Mohammad. (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985). 160.

⁵⁷ Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Pemikiran tentang Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, dalam *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta* (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1991), 150.



Menurut Ramayulis, solusi mengurangi atau mementiadakan dikotomi dalam pendidikan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip keseimbangan yang mendasari pendidikan Islam yaitu keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, keseimbangan antara jasmani dan rohani serta keseimbangan antara individu dan masyarakat.⁵⁸

Menurut Kamal Muhammad Isa, kesalahan utama manusia yang selama ini berlangsung terus menerus adalah adanya pemisahan antara ilmu dan agama, bahkan agama dianggap sebagai musuh ilmu, penghalang ilmu, atau paling banter hanya dianggap sebagai pengganti ilmu. Padahal agama merupakan kerangka dasar dari setiap ilmu pengetahuan dan kebudayaan, yang menjadi sumber bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu sendiri. Agama merupakan satu-satu dasar dan sumber yang mengatur seluruh permasalahan kehidupan manusia. Orang yang belajar al-Quran dengan cermat dan teliti akan menemukan sebagian ayatnya yang disebut berbagai fakta dan peristiwa sebagai muqaddimah yang kemudian sampai kepada Allah sebagai suatu keputusan yang disebut ilmu teory, sementara ayat-ayat yang menyatakan kehidupan merupakan topik dari ilmu pengetahuan dinamakan ilmu praktis.⁵⁹

Solusi berikutnya adalah peintegrasian ilmu, sebelumnya marila kita melihat dalam Al-quran kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang 854 kali. Kata ini digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. *'Ilm* dari segi bahasa berarti kejelasan, karena

⁵⁸ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan*, 32-34

⁵⁹ Kamal Muhammad Isa, *Manajemen Pendidikan Islam* terj dari Khashaish Madrasatin Nubuwwah (Jakarta, Fikahati Aneska, 1994), 30-31.

itu segala yang berbentuk dari akar katanya mempunyai arti kejelasan. Perhatikan misalnya kata *'alam* (bendera), *'ulmat* (bibir sumbing), *'a'lam* (gunung-gunung), *'alamat* (alamat), dan sebagainya. Ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang sesuatu. Sekalipun demikian, kata ini berbeda dengan *'arafa* (mengetahui), *a'rif* (yang maha mengetahui), dan *ma'rifah* (pengetahuan).⁶⁰ Sehingga wajarlah Islam sebagai agama yang rahmat untuk seluruh alam tidak pernah membedakan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum.

Persoalan, pengategorian kelompok ilmu umum, dan ilmu dalam Islam umumnya muncul lebih didorong atas kepentingan politik. Hal ini terlihat menonjol dengan kemunculan alasan akumulasi kuantitatif wilayah; dan filsafat lebih banyak dipelajari di Negara-negara barat dan agama dipelajari di Negara-negara timur, maka pertentangan ini menjadi pertentangan dua kelompok ilmu dengan istilah "Barat" dan "Timur". Dalam pandangan Islam, bukan berarti "Barat" kedudukannya lebih tinggi dari "Timur" atau sebaliknya.⁶¹

Al-Faruqi menawarkan Islamisasi ilmu dalam pendidikan Islam, yakni dengan melebur dua sistem pendidikan; tradisional dan modern, menjadi sistem pendidikan yang berwawasan Islam. Ini dimaksudkan untuk menghilangkan problem dikotomi sistem pendidikan yang selama ini terjadi di kalangan umat. Ide "Islamisasi Ilmu" dalam pendidikan Islam berisikan suatu prinsip; bahwa keilmuan Barat tidak

⁶⁰ Baca selengkapnya M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 2007), 434-435.

⁶¹ Jasa Ungguh Muliawan, *Pendidikan Islam*, 211. Baca pula penjelasan yang baik mengenai dikotomi ilmu hanya disebabkan persoalan (kepentingan) politik dalam Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan*, 104.



harus ditolak, artinya perlu diterima, tetapi harus melalui proses filterisasi yang disejalankan dengan nafas Islami agar tidak bertentangan dengan pesan al-Quran dan al-Hadits.⁶²

Peran islamisasi ilmu dalam pemecahan problem dikotomi pendidikan islam adalah spirit yang ditawarkan al-Faruqi dalam rangka memecahkan problem dikotomi pendidikan Islam adalah Islamisasi Ilmu dalam pendidikan Islam. Menurut al-Faruqi, para akademikus muslim harus menguasai semua disiplin ilmu modern, memahami disiplin tersebut dengan sempurna, dan merasakan itu sebagai perintah agama. Setelah itu mereka harus mengintegrasikan pengetahuan baru tersebut ke dalam keutuhan warisan Islam dengan melakukan eliminasi, perubahan, penafsiran kembali, dan penyesuaian terhadap komponen-komponennya sebagai *world view* Islam dan menetapkan nilai-nilainya.⁶³

Harus diakui bahwa di era sekarang keilmuan Islam tertinggal jauh dari Barat. Menolak keilmuan yang datang dari Barat jelas mengalienasi diri dari perkembangan zaman dan tidak realistis, dan itu akan semakin membuat umat Islam tertinggal. Sementara menerima keilmuan Barat yang cenderung sekular secara penuh dikhawatirkan akan menggerogoti ajaran keislaman yang penuh dengan normativitas. Dengan begitu, tiba saatnya bagi para cendekiawan Muslim meninggalkan metode-metode asal tiru yang berbahaya dalam reformasi pendidikan. Menurut al-Faruqi, reformasi ke arah modernisasi pendidikan Islam

⁶² Bandingkan dengan Muhammad Fahmi. "Konsep Pendidikan Isma'il Raji Al-Faruqi: Relevansinya bagi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia", *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM. 2006, 14.

⁶³ Isma'il Raji al-Faruqi *Islamisasi Ilmu*, 34-35.

hendaklah Islamisasi pengetahuan modern itu sendiri.⁶⁴ Jadi tugas umat Islam adalah sama, meski dengan jangkauan yang luas, dibanding yang dilakukan para leluhur umat yang mencernakan pengetahuan pada zaman mereka dan menghasilkan warisan Islam berupa kultur dan peradaban. Setiap disiplin sains sastra, sosial, dan ilmu alam, harus disusun dan dibangun ulang, diberikan dasar Islam, dan diberikan tujuan baru yang konsisten dengan Islam.

Setiap disiplin ilmu harus dituang kembali sehingga mewujudkan prinsip-prinsip Islam di dalam metodologi, strategi, data, problem, tujuan dan aspirasinya. Setiap disiplin ilmu harus ditempa ulang sehingga mengungkapkan relevansi Islam dengan *tiga sumbu Tauhid*. Sumbu pertama adalah *kesatuan pengetahuan*. Berdasarkan kesatuan pengetahuan ini segala disiplin harus mencari nilai objektif yang rasional, yakni pengetahuan kritis mengenai kebenaran. Dengan demikian tidak ada lagi dikotomi keilmuan; *aqli* dan *naqli* atau ilmiah dan dogma.

Sumbu kedua adalah *kesatuan hidup*. Berdasarkan kesatuan hidup ini segala disiplin harus menyadari dan mengabdikan kepada tujuan penciptaan. Dengan demikian tidak ada lagi pernyataan bahwa beberapa disiplin sarat nilai sedang disiplin lain bebas nilai atau netral. Sumbu ketiga adalah *kesatuan sejarah*. Berdasarkan kesatuan sejarah ini segala disiplin akan menerima sifat *ummatis* atau kemasyarakatan dari seluruh aktivitas manusia, dan mengambil tujuan umat di dalam sejarah. Dengan demikian tidak ada lagi pembagian pengetahuan dalam sains yang bersifat individual dan sains

⁶⁴ Ibid., xi.



yang bersifat sosial, sehingga setiap disiplin tersebut bersifat humanistik dan ummatis.⁶⁵

Usaha pendidikan Islam menurut Dr. Kamal Muhammad Isa seyogyannya menargetkan hasil pendidikan yang akan didapat oleh para siswanya sebagai berikut.

1. Siswa meyakini konsep ilahi sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak terpilah-pilah atau terkotak-kotak yang merupakan sebuah sistem rabbabi yang sempurna.
2. Siswa harus mampu meyakini bahwa syariat Islam itu selalu berkaitan dengan naluri manusia.
3. Siswa harus memiliki basis iman dalam alam pemikiran dan perasaannya, dengan persepsi dasar yang benar dalam menafsirkan hakikat alam, hubungan dengan penciptanya, serta posisi manusia di dalamnya.
4. Siswa harus memiliki rasa bangga kepada agamanya.
5. Hati dan jiwa para siswa harus saling bertaut dan terikat dengan Khaliqnya.
6. Para siswa memiliki disiplin yang tinggi dalam menjalani etika riset ilmiah dalam Islam.
7. Mengaitkan jiwa dan hati para siswa dengan kitabullah.⁶⁶

Solusi dari masalah manajemen pendidikan menurut Hujair AH Sanaky dengan menawarkan perubahan manajemen pendidikan ke arah, *pertama* desentralisasi pengelolaan pendidikan Islam adanya perubahan paradigma dari orientasimanajemen pemerintahan yang sarwa negara

⁶⁵ Ibid., xi-xii.

⁶⁶ Muhammad Kamal Isa, *Manajemen*, 155-162

(state driven) menjadi berorientasi ke pasar, perubahan paradigma dari orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian menjadi berorientasi pada demokrasi, perubahan paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi kewenangan, manajemen pemerintahan yang cenderung dipengaruhi oleh tata aturan global menjadi kebijakan dan aturan pemerintah harus mengakomodasi tata aturan global.

Kedua, manajemen berbasis sekolah, apakah pendidikan Islam dapat menerapkan manajemen berbasis sekolah? Menurut Hujair AH Sanaky karena pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional maka harus menerapkan sistem ini meski ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penerapannya yaitu kewajiban sekolah, kebijakan dan prioritas pemerintah, partisipasi masyarakat dan orang tua, peranan profesionalisme dan manajerial serta pengembangan profesi. Ketiga manajemen pendidikan tinggi adalah menekankan kemandirian lebih besar dalam pengelolaan atau otonomi, untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan manajemen perguruan tinggi Islam yang baik perlu memperhatikan kualitas, otonomi, akuntabilitas (pertanggungjawaban), evaluasi dan akreditasi.⁶⁷

Problematika juga ada pada sumber daya pendidikan Islam, dengan rendahnya kualitas tenaga kependidikan padahal dituntut memiliki sumber daya yang berkualitas dan profesional maka yang harus dilakukan oleh pendidikan Islam adalah adanya program peningkatan kemampuan sumber daya pendidikan berupa *training for trainers*.⁶⁸

⁶⁷ Sanaky, Hujair AH, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2003). 207-225

⁶⁸ Ibid. H.226-227



BAB V

WACANA ISLAMISASI PENGETAHUAN

Salah satu topik yang menjadi perbincangan kalangan pemikir pendidikan Islam sejak dekade 70-an adalah tentang islamisasi pengetahuan. wacana ini masih memnjadi diskusi dan perdebatan panjang dan belum tuntas atau bahkan tidak akan pernah tuntas hingga saat ini. Lahirnya gagasan ini telah memberikan spektrum yang signifikan pada ilmu pengetahuan khususnya pendidikan Islam. Gagasan ini telah menjadi fenomena modernitas, menjadi suatu yang menarik untuk dikaji dan dicermati secara kritis dan tajam, sehingga kita bertanya lagi, ada apa dengan fenomena ini?

Persoalan yang muncul adalah usaha islamisasi pengetahuan bagi kalangan muslim yang telah lama tertinggal jauh dalam perdebatan dunia modern, memiliki polemik tersendiri. Terdapat kalangan yang mempertanyakan, apakah islamisasi ilmu pengetahuan hanya membungkus sains Barat dengan label “islami” atau “islam”? ataukah upaya keras untuk mentransformasikan normativitas agama, melalui rujukan utamanya al-Qur’an dan hadis, kedalam realitas kesejarahanya secara empiris?

Di sekian banyak tokoh atau cendikiawan muslim yang pernah memperdebatkan tentang islamisasi ilmu adalah Ismail Raji al-Faruqi, Syekh Muhammad Naquib al-Attas, Abdul Hamid Abu Sulaiman, Syed Husein Nasr, Fazlur Rahman dan Ziaudin Sardar. Lalu ide “islamisasi ilmu” tidak lepas dari ketimpangan-ketimpangan yang merupakan akibat langsung keterpisahan antara sains dan agama. Pemikiran kalangan yang mengusung ide islamisasi ilmu masih terkesan sporadis dan belum terintegrasi menjadi sebuah pemikiran yang utuh. Akan tetapi tema ini sejak kurun abad XV H telah menjadi tema sentral dikalangan cendikiawan muslim.¹

A. Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Tinjauan Historis

Islamisasi ilmu pengetahuan pertama kali dilontarkan oleh Ismail Raji al-Faruqi, seorang ilmuwan kelahiran Palestina yang bermukim di Amerika. Ia melontarkan ide Islamisasi ilmu pengetahuan yang dibarengi dengan pendirian sebuah lembaga penelitian *International Institute of Islamic Thought* yang terkenal dengan singkatan III-T. Lembaga ini berkedudukan di Philadelphia yang kemudian pindah ke Hemdon, Virginia. Namun, di Malaysia terdapat versi lain, yaitu pencetus pertama ide Islamisasi Ilmu pengetahuan adalah Syed Naquib al-Attas yang dengan dukungan Perdana Menteri ketika itu Anwar Ibrahim mendirikan *International Institute of Islamic Thought and Civilization* (ISTAC) yang berkedudukan di Kuala Lumpur.²

¹ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 254

² M. Dawam Rahardjo, “Strategi Islamisasi Pengetahuan”, dalam *Gagasan dan Perdebatan Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, Moeflih Hasbullah, ed. (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2002), xii-xiii



Meskipun ide islamisasi ilmu pengetahuan muncul dan dihubungkan dengan kedua tokoh di atas, tapi secara substantif ide tersebut telah muncul abad ke-19, yaitu ketika Syah Waliyallah dan Sir Sayyid Ahmad Khan yang mendirikan Universitas Aligarth. Kedua tokoh ini memelopori kebangkitan pemikiran dan pengetahuan yang berorientasi kepada Islam dan sekaligus bercorak modern.

Dalam gerakan pemikirannya mereka menolak untuk kembali kepada tradisi lama dan juga menentang penetrasi dan dominasi Barat yang menghegemoni masyarakat muslim. Kebangkitan pemikiran yang dipelopori oleh Ahmad Khan diilhami oleh kekalahan umat Islam India dalam menentang kekuasaan kolonial Inggris pada tahun 1857-1858, yang menimbulkan sikap antipati dan isolasi umat Islam. Dalam pandangannya, sikap ini tidaklah memberikan manfaat bagi umat Islam. Untuk itu ia berinisiatif untuk mengadakan pembaharuan pemikiran dengan berpikiran ilmiah untuk menghadapi dominasi Barat.

Gerakan pemikiran di atas dilanjutkan oleh Mohammad Abduh dan Rasyid Ridlo dari Mesir. Mereka secara tegas menolak kembali kepada tradisi-tradisi pada masa lalu yang dibarengi kesediaan mereka untuk mengadopsi ilmu pengetahuan Barat.

Awalnya pemikiran al-Faruqi terletak pada dua hal yaitu Arabisme dan Islam. Dalam studinya tentang Arab, ia menyusun tulisan terdiri dari 4 jilid: *"On Arabism: Urubah and Religion"*. Pada perjalanan berikutnya ia lebih fokus pada studi tentang Islam melalui diskursus ilmiah dan akademis serta gerakan advokasi politik dalam melihat pentingnya Islam.

Pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an ia lebih gencar mempresentasikan Islam sebagai agama nalar dan ilmiah, maju dan *par excellent*. Ia menjadi seorang aktivis Islam yang menempatkan Islam sebagai acuan utama, yaitu sebagai ideologi yang lengkap dan menyeluruh. Dalam pandangan al-Faruqi, salah satu kesalahan fatal umat Islam adalah menganggap ilmu itu terbelah dua, yaitu ilmu-ilmu sekuler (*profane*) dan ilmu-ilmu agama Islam. Ide islamisasi ilmu pengetahuan yang dicetuskan al-Faruqi dituangkan dalam risalah berjudul *The Islamization of Knowledge* yang diterbitkan oleh IIIT. Ide tersebut menjadi terkenal ketika seminar pertama mengenai islamisasi ilmu pengetahuan dilaksanakan di Islamabad, Pakistan pada Januari 1982.

Pada program pendahuluan dari risalah di atas, al-Faruqi menulis bahwa IIIT menawarkan kepada cendekiawan muslim seluruh dunia hadiah yang abadi dan unik yang telah dipersembahkan dalam dekade pertama abad ke 15 Hijriyah. Al-Faruqi menegaskan bahwa tidak seorang umat Islam yang memikirkan pentingnya islamisasi ilmu pengetahuan, memahami syarat-syaratnya dan mendiskusikan langkah-langkah yang diperlukan. Dengan kondisi di atas Al-Faruqi berusaha mengingatkan dunia Islam akan suatu konflik antara ilmu pengetahuan dalam pandangan Barat dan Islam, yaitu dengan merencanakan suatu yang dapat menghindari terjadinya konflik tersebut, serta menggalakkan kembali pendidikan Islam sebagaimana yang diharapkan.³

Tokoh lainnya yang menggagas islamisasi ilmu pengetahuan adalah Syed Naquib al-Attas. Ia lahir pada

³ Wan Mohammad Nor Wan Daud, *Filsafat Pendidikan Islam, Syed M. Naquib Al-Attas*, terj. Hamid Fahmi, (Bandung: Mizan, 2003), 394.



tanggal 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat. Bila dilacak silsilahnya, ia termasuk keluarga Ba'Alawi di Hadramaut dengan silsilah yang sampai kepada Imam Husein, cucu Rasulullah SAW. Ibunya adalah Syarifah Raquan al 'Aidrus, berasal dari Bogor, Jawa Barat yang merupakan ningrat Sunda di Singapura.

Pendidikannya dijalani dari Sekolah Dasar di Johor Malaysia, setelah itu pada masa pendudukan Jepang ia kembali ke Jawa dan meneruskan pendidikannya di Madrasah *Al Urwat al Wusta* Sukabumi. Setelah Perang Dunia II pada tahun 1946, ia kembali ke Johor untuk merampungkan pendidikannya di English College di Bukit Zahrah School. Setelah menamatkan sekolah menengah tahun 1951, al-Attas mendaftar di resimen Melayu sebagai sebagai kader dengan nomor 6676. Al-Attas dipilih oleh Jenderal Sir Gerald Templer, yang ketika itu menjabat British High Commissioner di Malaya untuk menjalani pendidikan militer, pertama di Eton Hall, Chater, Wales, kemudian di Royal Military Academy, Sadhrust, Inggris (1952-1955). Selama di Inggris, dia berusaha memahami aspek-aspek yang mempengaruhi semangat dan gaya hidup masyarakat Inggris. Selain mengikuti pendidikan militer, Al-Attas juga sering pergi ke negara-negara Eropa lainnya (terutama Spanyol) dan Afrika Utara untuk mengunjungi tempat-tempat yang terkenal dengan tradisi intelektual, seni dan gaya bangunan keislaman lainnya.

Kegiatan intelektual Al-Attas dimulai di Universitas Malaya pada pertengahan 1960-an dan telah dapat membangkitkan kesadaran baru akan pentingnya peranan Islam dalam sejarah, nasionalisme dan kebudayaan Melayu. Ia

telah berhasil menumbuhkan kesadaran baru tentang peranan Islam kepada para mahasiswa dan masyarakat umum. Di samping itu ia mengkritisi metodologi berbagai disiplin ilmu, filsafat, kebudayaan dan politik yang telah terbaratkan. Ide-ide tersebut terlukiskan dalam karya-karyanya yang antara lain *The Origin of the Malaya Syair* (1968), *Preliminary Statement on the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago* (1969).

Dalam hal ini, al-Attas bukan berarti antipati terhadap pemikiran Barat. Dalam pengembangan disiplin-disiplin keilmuan tidak hanya didasarkan kepada ajaran-ajaran Islam, tetapi harus dianalisis dengan filsafat Yunani dan Yahudi-Kristen serta tradisi-tradisi klasik, abad pertengahan.

Persahabatan antara al-Faruqi dengan Al-Attas dapat ditelusuri dari awal tahun 1960-an. Sebagai Pendiri-Direktur IBKKM (Institut Bahasa, Kesusasteraan, dan Kebudayaan Melayu) pada Universitas Kebangsaan Malaysia, pada tahun 1974 Al-Attas mengundang Al-Faruqi ke Malaysia untuk memberikan kuliah dan memperkenalkan al-Faruqi kepada para ilmuwan di Malaysia. Pada saat itu al-Faruqi mendengarkan langsung proyek Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer yang ketika itu Al-Faruqi belum menyadari elemen-elemen dari proyek tersebut serta implikasi dari proyek tersebut. Kegiatan itu dilaksanakan ketika diadakan makan malam di rumah kediaman Anwar Ibrahim yang dihadiri oleh tokoh-tokoh senior ABIM. Dalam berbagai kesempatan berdiskusi antara Al-Attas dengan Al-Faruqi di Malaysia dan Philadelphia telah mempengaruhi aktivitas intelektual Al-Faruqi secara positif dan mendasar, khususnya dalam AMMS (*Association of Muslim Social Scientists*). Al-



Faruqi sebagai Presiden AMMS mengundang Al-Attas untuk menjadi salah satu pembicara pada simposium tentang “Islam dan Pembangunan” yang diadakan di Philadelphia pada tanggal 22-24 April 1976. Seminggu setelah simposium itu Al-Faruqi berkirim surat kepada Al-Attas untuk berterima kasih atas sumbangan pemikiran dalam simposium tersebut.⁴

B. Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan

Al-Faruqi memulai pokok pikirannya tentang islamisasi ilmu pengetahuan dengan mengaitkan pertama kali dengan kekalahan dan keterbelakangan umat Islam dalam menghadapi dominasi dan kemajuan dunia Barat. Kekalahan-kekalahan itu mengakibatkan kaum muslimin dibantai, dirampas kekayaannya, dirampas hak-hak dan kehidupannya. Mereka disekulerkan, diwesternisasikan, dijauhkan dari agamanya oleh agen-agen musuh mereka. Sebagai kelanjutan dari kemalangan itu, umat Islam dijelek-jelekan, difitnah, dalam pandangan bangsa-bangsa di dunia, sehingga pada masa itu umat Islam menjadi umat yang mempunyai citra terjelek.

Sementara dalam kehidupan politik umat Islam terjadi perpecahan dan pertikaian yang memang sengaja diciptakan oleh negara-negara Barat, sehingga umat Islam terpecah menjadi lebih dari lima puluh negara yang berdiri sendiri. Untuk lebih menciptakan ketidakstabilan di negara-negara Islam mereka memasukkan orang-orang asing ke negara-negara Islam. Dengan demikian di seluruh dunia Islam terjadi ketidakstabilan, perpecahan dan pertikaian antara umat Islam. Kondisi ini disebabkan oleh usaha kaum kolonial dan

⁴ Wan Daud, *Filsafat*, 394

menghancurkan seluruh institusi politik di negara-negara Islam.⁵

Kekalahan di bidang politik berimbas pada kekalahan dan ketebelakangan di bidang ekonomi. Kehidupan ekonomi umat Islam mengalami kehancuran dengan banyaknya kelaparan dan ketidakberdayaan ekonomi umat. Kebutuhan-kebutuhan ekonomis umat Islam dikesampingkan hanya untuk kepentingan-kepentingan kaum kolonial. Keadaan ini menimbulkan ketergantungan yang luar biasa kaum muslim kepada pihak-pihak asing. Industri-industri yang diselenggarakan di negara-negara muslim tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, tapi untuk kepentingan *advertising* kaum kolonial.

Dalam bidang keagamaan dan budaya, umat Islam semakin terseret dengan propaganda asing yang mengarah kepada westernisasi, tanpa disadari bahwa itu akan membawa kepada kehancuran budaya bangsanya dan ajaran Islam.

⁵ Kekalahan-kekalahan umat Islam dimulai dengan ekspansi dan penetrasi Negara-negara Eropa ke wilayah-wilayah umat Islam pada abad kedelapan belas. Pada saat itu kekuatan Eropa mulai bangkit dan menembus kekeuatan-kekuatan rezim-rezim umat Islam. Kekuatan Negara-negara Atlantik dan Eropa telah menampakkan ambisi untuk menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan mereka di wilayah perbatasan bagian Utara dan Selatan masyarakat Muslim. Eropa Barat dan Rusia pada abad ini telah memulai ekspansinya melalui Asia Tengah dan Siberia menuju Pasifik. Pada wilayah-wilayah masyarakat Muslim di selatan, ekspansi bangsa Eropa dimulai dengan perlawatan perdagangan para saudagar Portugis, Belanda dan Inggris. Portugis mendirikan beberapa pusat kekuasaan kolonial di Hindia dan Malaka. Pada abad 16 yang kemudian dilanjutkan dengan kekuasaan kolonial Belanda yang menguasai Asia Tenggara pada abad ke 17. Sedangkan Inggris memulai ekspansi mereka dengan menguasai sebuah imperium di India dengan melalui persaingan yang ketat dengan Prancis. Pada abad akhir abad ke18 Inggris telah berhasil menaklukkan Bengal dan terus menjajah wilayah India. Lihat Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Gufron A. Mas'adi, Vol.1 (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2000), 424.



Berbarengan dengan itu dibangunlah berbagai sekolah-sekolah yang menggunakan sistem dan kurikulum Barat, yang selanjutnya melahirkan kesenjangan diantara umat Islam, yaitu mereka yang terlalu terbaratkan dan sekuler dan mereka yang tetap menentang sekularisme. Pemerintah kolonial selalu berusaha agar golongan umat Islam yang pertama unggul dan menjadi penentu dalam pengambilan kebijakan umat Islam.⁶

Sebagai jawaban atas persoalan-persoalan umat Islam sebagaimana di atas, penting adanya langkah-langkah perbaikan. Sehingga Al-Faruqi memulai memikirkan dan merekomendasikan pentingnya pemaduan pendidikan yang bersifat sekuler/profan dengan pendidikan Islam. Dualisme pendidikan yang terjadi di kalangan umat Islam pada saat ini harus ditiadakan setuntasnya. Kedua sistem pendidikan tersebut harus dipadukan dan diintegrasikan, sehingga dapat melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Integrasi pendidikan sekuler dan pendidikan Islam harus menghasilkan sebuah sistem pendidikan yang sesuai dengan visi agama Islam.

⁶ Ismail Raji al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan*, terj. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1984), 2-8. Gambaran tentang munculnya pertentangan antara umat Islam yang telah terbaratkan dengan mereka yang masih kokoh memegang ajaran Islam terjadi di Negara Turki dengan terbaginya umat Islam dalam pembaharuan di Turki, yaitu kaum sekuler, kaum nasionalis dan kaum agamawan (Islam). Golongan Barat menghendaki agar pembaharuan di Turki didasarkan pada pembaharuan Barat, golongan Islam menghendaki pembaharuan tetap didasarkan kepada ajaran-ajaran Islam dan golongan nasionalis menghendaki pembaharuan didasarkan pada nilai-nilai nasionalisme bangsa Turki. Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 126

Secara terinci al Faruqi memberikan langkah-langkah teknis dalam upaya Islamisasi pengetahuan, yaitu:

1. Penguasaan disiplin ilmu modern: penguraian kategoris.
2. Survei disiplin ilmu
3. Penguasaan khazanah Islam: sebuah antologi.
4. Penguasaan khazanah ilmiah Islam : tahap analisa.
5. Penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin ilmu
6. Penilaian kritis terhadap ilmu pengetahuan modern; Tingkat perkembangannya di masa kini.
7. Penilaian kritis terhadap khazanah Islam: Tingkat perkembangannya dewasa ini.
8. Survei permasalahan yang dihadapi umat Islam.
9. Survei permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia.
10. Analisa kreatif dan sintesa.
11. Penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam: Buku-buku dasar tingkat universitas.
12. Penyebarluasan ilmu yang telah di-Islamisasikan⁷

Selain al-Faruqi, tokoh yang mengemukakan pentingnya islamisasi pengetahuan adalah Syed Naquib Al-Attas. Al-Attas memberikan pengertian islamisasi pengetahuan sebagai pembebasan manusia dari *magic*, mitos, animisme, dan tradisi kebudayaan kebangsaan dan selanjutnya dominannya sekularisme atas pikiran dan bahasanya.⁸

⁷ al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan*, 98

⁸ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam sekularisme* (Bandung: Pustaka 1981), 174.



Al-Attas memandang bahwa umat Islam menghadapi tantangan terbesar saat ini, yaitu dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang telah salah dalam memahami ilmu dan keluar dari maksud dan tujuan ilmu itu sendiri. Meskipun ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh peradaban Barat telah memberikan manfaat dan kemakmuran kepada manusia, namun ilmu pengetahuan itu juga telah menimbulkan kerusakan dan kehancuran di muka bumi.

Ilmu pengetahuan modern yang dikembangkan di atas pandangan hidup, budaya dan peradaban Barat, menurut Al-Attas dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: 1) mengandalkan akal untuk membimbing kehidupan manusia, 2) bersikap dualistik terhadap realitas dan kebenaran, 3) menegaskan aspek eksistensi yang memproyeksikan kehidupan sekular, 4) membela doktrin humanisme, dan 5) menjadikan drama dan tragedi sebagai unsur-unsur yang dominan dalam fitrah dan eksistensi manusia.⁹

Dengan sifat ilmu pengetahuan--berdasar budaya dan peradaban Barat--yang memberikan ketidakpastian dan krisis yang berkepanjangan, maka itu tidak dapat diterapkan dalam kehidupan umat Islam. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan dapat dijadikan alat untuk menyebarkan ideologi dan peradaban. Dengan demikian maka ilmu tidaklah bebas nilai (*value-free*) tapi taat nilai (*value laden*).

Islam memandang bahwa visi mengenai realitas dan kebenaran bukan semata-mata berkaitan dengan alam fisik dan keterlibatan manusia dalam sejarah, sosial, politik

⁹ Adnin Armas, "Westernisasi dan Islamisasi Ilmu," dalam *Islamia* Tahun I, No 6, (Juli September, 2005),12.

dan budaya sebagaimana dalam pandangan sekuler Barat terhadap dunia yang dapat dilihat. Realitas dan kebenaran dimaknai berdasarkan kajian secara metafisis terhadap dunia yang tampak maupun yang tidak nampak. Dengan demikian Islam memandang realitas sebagai sesuatu yang kelihatan dan gaib (dunia-akhirat). Dalam hal ini dunia tidak dapat dilepaskan dengan akhirat dan akhirat juga dapat dikesampingkan untuk kepentingan duniawi.¹⁰

Dengan kekurangan-kekurangan ilmu pengetahuan di atas, Al-Attas meyakini pentingnya digagas suatu gerakan Islamisasi pengetahuan, karena ilmu pengetahuan modern tidak netral dan masuk budaya dan filosofis yang sebenarnya berasal dari refleksi kesadaran dan pengalaman manusia Barat. Islamisasi ilmu pengetahuan modern bukan memberikan label Islam pada ilmu pengetahuan dan menolak semua yang berasal dari Barat, karena adad beberapa persamaan antara Islam dan falsafah Barat. Dengan demikian Islamisasi ilmu pengetahuan membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi pandangan hidup Islam dan sekaligus dapat memahami budaya dan peradaban Barat.¹¹

¹⁰ Konsep ini dapat dikaitkan dengan pandangan bahwa Islam terdiri dari ajaran dan peradaban. Sebagai sebuah ajaran, Islam memasuki ranah kehidupan manusia secara totalitas, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, material dan spiritual. Dalam hal ini Islam memandang kedua aspek kehidupan manusia itu harus saling bersinergi, yang tidak dibenarkan salah satu aspeknya mengalahkan apalagi menegasikan aspek lainnya. Sedangkan sebagai sebuah peradaban, Islam mencakup kehidupan dalam interaksi dan adaptasinya terhadap lingkungannya. Dan ini terkait dengan tugas manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Al Attas memandang bahwa Islam adalah agama yang mengatasi dan melintasi waktu karena sistem nilai yang dikandungnya itu adalah mutlak. Kebenaran Islam tidak hanya berlaku untuk masa lampau, tapi sekarang dan masa depan. Nilai-nilai dalam Islam berlaku sepanjang masa. Lihat Al-Attas, *Islam dan Sekularisme*, 30-32.

¹¹ Wan Mohammad Nor Wan Daud, *Filsafat Pendidikan*. 291.



Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Attas dapat dilakukan dengan melalui dua proses yang saling berkaitan yaitu:

1. Mengisolir unsur-unsur dan konsep-konsep kunci yang membentuk peradaban Barat yang dimiliki oleh pengetahuan modern saat ini terutama ilmu pengetahuan humaniora. Dengan demikian, ilmu-ilmu alam, Fisika dan aplikasinya harus ditundukkan dengan ajaran-ajaran Islam, khususnya dalam fakta-fakta dan formulasi teori-teori lainnya. Fakta dianggap tidak benar jika itu bertentangan dengan pandangan hidup Islam. Di samping itu, ilmu pengetahuan modern harus diteliti dan diperiksa, yang meliputi konsep, metode, praduga, simbol dan sistem yang dianut termasuk di dalamnya aspek-aspek empiris dan rasional, nilai-nilai etika, penafsiran dan historisitas, bangunan teori ilmu, praduga yang berkaitan dengan dunia, dan rasionalitas proses-proses ilmiah, teori ilmu tersebut tentang alam semesta, klasifikasinya, batasannya, hubungan dan kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya serta hubungan sosialnya. Unsur-unsur dan konsep-konsep asing yang merusak ajaran Islam tersebut adalah: konsep dualisme yang meliputi hakikat dan kebenaran, doktrin humanisme, ideologi sekuler, konsep tragedi khususnya dalam kesusasteraan.

Keempat unsur asing tersebut telah menjangkiti ilmu khususnya dalam bidang sains kemanusiaan dan kemasyarakatan, sains fisik dan terapan yang melibatkan perumusan fakta dan teori. Konsep-konsep inilah yang

membentuk pemikiran dan peradaban Barat dan telah menular di kalangan umat Islam.

2. Memasukkan unsur-unsur, konsep-konsep Islam dalam setiap bidang dari ilmu pengetahuan modern yang relevan. Konsep-konsep Islam yang harus menggantikan konsep-konsep Barat tersebut adalah: manusia, *dîn*, 'ilm dan *ma'rifah*, *hikmah*, *al 'adl*, *amal-adab*, dan konsep *kulliyât-jâmiyah* (universitas).

Jika kedua proses islamisasi tersebut dilakukan, maka manusia akan terbebas dari *magic*, mitologi, animisme dan tradisi budaya yang bertentangan dengan Islam. Islamisasi ilmu pengetahuan akan membebaskan manusia dari keraguan (*syakk*), dugaan (*dzann*), dan argumentasi kosong menuju keyakinan akan kebenaran mengenai realitas spiritual dan materi. Islamisasi akan membebaskan ilmu pengetahuan modern dari ideologi, makna dan pernyataan-pernyataan sekuler.¹²

¹² Menurut Al-Attas, istilah sekuler, berasal dari kata *saeculum* yang mempunyai pengertian waktu (time) dan tempat (*location*) . Dengan demikian *saeculum* itu berarti masa kini dan di sini. Masa kini berarti masa sekarang dan di sini berarti dunia ini. Jadi paham sekuler menurut Al-Attas adalah merujuk pada makna kesaatinian dan kedunian. Kalau kata sekuler itu di terjemahkan kedalam bahasa Arab, maka kata yang paling mendekati kesesuaian adalah kedisinian (*hunâlanîyah*), berdasarkan perkataan dalam bahasa Arab *hunâ* yang berarti di sini dan *al'ân* yang berarti sekarang. Berdasarkan analisis di atas, Al-Attas menerjemahkan sekuler ke dalam bahasa Arab dengan *almânîyah* sebenarnya tidak menjelaskan pengertian konsep aliran itu. Dalam kesempatan lain Al-Attas menyarankan agar sekularisme diterjemahkan dengan *syikularîyah* dalam bahasa Arab, sehingga dapat memberikan pemahaman yang benar di kalangan umat Islam dengan tidak mereduksi makna dari konsep itu. Lihat Ugi Suharto, "Islam dan Sekularisme" dalam *Islamia* Tahun I, No. 6 (Juli- September 2006), 20.



Al-Attas menolak bahwa islamisasi ilmu pengetahuan sekedar memberikan labelisasi ilmu dengan prinsip-prinsip Islam. Upaya ini tidak akan memberikan manfaat karena penyakit yang menempel pada ilmu pengetahuan berupa konsep dan unsur-unsur Barat tidak akan hilang. Hal ini hanya akan menghasilkan ilmu pengetahuan yang tidak Islami dan juga tidak sekuler.

Islamisasi ilmu pengetahuan bertujuan agar umat Islam terlindungi dari pengaruh ilmu pengetahuan yang telah terjangkit kuman unsur-unsur dan konsep Barat yang akan menimbulkan kesesatan dan kekeliruan, serta bertujuan mengembangkan ilmu yang hakiki yang dapat membangunkan pemikiran dan kepribadian umat Islam dan dapat menambah keimanan kepada Allah SWT. Dengan demikian Islamisasi ilmu pengetahuan akan melahirkan keamanan, kebaikan, keadilan, keselamatan dan keimanan kepada Allah SWT.¹³

C. Islamisasi Pengetahuan antara Pro dan Kontra

Dikalangan cendekiawan muslim terdapat sikap pro dan kontra dalam menyikapi isu Islamisasi pengetahuan. masing-masing pihak memiliki berbagai alasan yang cukup mendasar. Pihak yang pro berargumentasi bahwa *pertama*, umat islam membutuhkan suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik material maupun spiritual sedangkan sistem sains yang ada kini belum mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, karena ia banyak mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. *Kedua*, kenyataan

¹³ Rosnaini Hasyim, "Gagasan Ilmu Pengetahuan Kontemporer" dalam *Islamia* Tahun I, No. 6 (Juli- September 2006), 35.

bahwa sains modern telah menimbulkan ancaman-ancaman bagi kelangsungan dan kehidupan umat manusia dan lingkungannya. *Ketiga* umat Islam pernah memiliki suatu peradaban Islami, yaitu sains berkembang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan umat, sehingga untuk menciptakan kembali sains Islam dalam peradaban yang islami maka perlu dilakukan Islamisasi sains.¹⁴

Sedangkan pihak yang kontra berargumentasi bahwa dilihat dari segi historis, perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Barat saat ini banyak diilhami oleh para ulama Islam yang ditransformasikan terutama pada masa 'keemasan Islam' sehingga mereka banyak berhutang budi terhadap ilmuwan muslim. Karena itu jika hendak meraih kemajuan di bidang IPTEK, maka kita perlu melakukan transformasi besar-besaran dari Barat tanpa ada rasa curiga, walaupun harus waspada. IPTEK adalah netral, ia tergantung pada pembawa dan pengembangnya. Karna itulah Islamisasi ilmu pengetahuan adalah tidak begitu penting, tetapi yang penting adalah islamisasi subjek atau pembawa dan pengembangan IPTEK itu sendiri.¹⁵

Jika dicermati dari argumentasinya, kedua pihak tersebut baik yang pro maupun yang kontra sebenarnya mempunyai pretensi yang sama, yaitu sama-sama menginginkan terwujudnya kemajuan peradaban yang Islami, dan masing-masing juga tidak menghendaki terpuruknya kondisi umat Islam ditengah-tengah akselerasi perkembangan dan kemajuan IPTEK. Hanya saja pihak yang pro lebih melihat

¹⁴ Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 43.

¹⁵ Ibid



dimensi ilmu pengetahuan sebagai objek kajian yang perlu dicarikan filosofisnya yang Islami, sedangkan pihak yang kontra lebih memilik subjeknya atau pembawanya dan pengembang IPTEK itu sendiri yang harus Islami.

Kedua pandangan tersebut perlu dicarikan jalan pemecahannya dan didudukan permasalahannya, agar tidak melahirkan saling curiga antar satu dengan yang lainnya, terutama jika dimasuki interest tertentu untuk mengkambing hitamkan yang satu dan mengunggulkan lainnya.

Di pihak lain, ada yang berpendapat bahwa islamisasi ilmu baru mungkin dan bermakna jika menunjukkan adanya perbedaan teoritis yang fundamental atau teori ilmu (epistemologi) modern dan Islam. Persamaanya adalah apakah ada perbedaan yang mendasar anata keduanya tersebut? Dikalangan kaum Intelektual muslim sendiri ada yang menafikan perbedaan tersebut, namun ada juga yang membenarkannya.¹⁶

Kelompok yang menafikan berpendapat bahwa ilmu pengetahuan bersifat objektif, sehingga perbedaan antara ilmu pengetahuan modern dan Islam adalah semu. Bagi mereka ilmu juga bersifat universal, sehingga bisa berlaku dimana saja baik di Barat maupun di Timur. Hoodhoy seorang fisikawan di Universitas Quad-iazam di Pakistan, mengatakan “tidak ada yang disebut ilmu Islami dan semua upaya untuk megislamkan ilmu akan mengalami kegagalan, alasanya tentu saja karena universitas dan objektivitas Ilmu”. Sedangkan bagi kelompok yang membenarkan adanya

¹⁶ Ibid., 44.

perbedaan fundamental antara epistemologi modern dan islami, berpendapat bahwa ilmu pengetahuan tidak biasa sama sekali terlepas dari subjektifitas sang ilmuan, dan oleh karena itu ilmu dikatakan objektif bebas nilai dan universal. Rolston, seorang profesor di Colorado State University menyatakan bahwa 'seorang peneliti akan terwarnai oleh apa yang mereka teliti atau paling tidak menyumbang sekema konseptual yang menyaring apa yang mereka ketau'.¹⁷

Memang diakui bahwa dalam pengetahuan seseorang tentang dunia material (alam) subjektivitas dapat terus ditekan. Namun bahkan si disini pun, dengan berkembangnya kecanggihan ilmiah, seorang jauh dalam paradoks. Semakin jauh seseorang mencoba memasuki komponen akhir dari materi, akan tidak bisa melepaskan diri dari subjektifitas. Namun seorang bergeser dari lingkungannya yang sehari-hari dan mencoba menelaah partikel-pertikel subatomik yang sangat kecil atau black holes yang sangat luas, atau akibat-akibat realitivistik konter-intuitif, observasi seseorang menjadi semakin sarat dengan teori. Akhirnya Rolston menyimpulkan bahwa fisika, kimia, dan astronomi adalah tiga bidang ilmu yang paling objektif dan tidak bisa lari dari subjektivitas sebagaimana mereka bahkan semakin subjektif.¹⁸

D. Pengembangan Islamisasi Pengetahuan

Semangat umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kebebasan penalaran intelktual dan kajian rasional-empirik atau semangat pengembangan ilmiah

¹⁷ Ibid., 45.

¹⁸ Ibid.



(scientific inquiry) dan filosofis disamping dimotivasi oleh ajaran Islam sendiri, juga tidak lepas dari proses akulturasi.¹⁹

Ketika umat Islam berkembang ke sebelah utara yaitu negeri Syams, yang dahulu berada dibawah pemerintahan Romawi, disana telah berkembang sebuah kebudayaan Yunani dan Kristen dan begitu juga ke sebelah Timur yaitu negara Persia yang didalamnya berkembang kebudayaan Persi. Orang Islam kebanyakan menerima kebudayaan Yunani dan Persia, walaupun dalam penerimaanya ada yang bersifat adopsi ini terdapat dua kecendrungan yaitu *assimilasi* (teutama dikalangan ahli-ahli fiqih dan mutakalimin) dan *akomodasi* (terutama di kalangan filosof muslim).²⁰

Anshari mengemukakan bahwa sikap yang proporsional terhadap kebudayaan yang sudah ada adalah sebagai berikut. *Pertama*, memelihara unsur nilai dan norma kebudayaan yang sudah ada, yang bersifat positif. *Kedua*, menghilangkan unsur nilai dan norma kebudayaan yang walaupun sudah ada namun nilainya negatif. *Ketiga*, menumbuhkan unsur nilai dan norma kebudayaan yang belum ada yang bersifat positif. *Keempat*, bersifat *receptive* (menerima), *selective*, *digestive* (mencernakan), *assimilitavie* (penggabungan dalam suatu sistem) dan *transmissive* terhadap kebudayaan pada umumnya dan kelima, menyelenggarakan pengkudusan

¹⁹ Proses akulturasi ini dalam Psikologi Sosial disebut dengan proses belajar antara budaya atau peradaban. Akulturasi ini terjadi bila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu berhadapan dengan unsur-unsur kebudayaan asing yang bedada sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri.

²⁰ Hasan Langgulung, "Pendidikan Islam Indonesia Mencari Kepastian Historis" dalam M. Dawam Rahardja, *Islam Indonesia Menatap Masa Depan* (Jakarta: P3M, 1989), 167.

atau penyucian atas kebudayaan agar ia sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam.²¹

Gagasan Islamisasi pengetahuan sebagaimana yang digagas oleh al-Faruqi dan al-Attas dapat dikategorikan ke dalam *model purifikasi*. Hal ini dapat dicermati dari pendekatan-pendekatan yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut. Al-Faruqi memberikan rencana kerja terhadap gagasan islamisasi pengetahuan yaitu (1) penguasaan terhadap khazanah ilmu pengetahuan muslim, (2) penguasaan terhadap khazanah ilmu pengetahuan masa kini, (3) mengidentifikasi kekurangan-kekurangan ilmu pengetahuan itu dalam kaitannya dengan ideal Islam, dan (4) rekonstruksi ilmu-ilmu itu sehingga menjadi satu paduan yang selaras dengan wawasan dan ideal Islam.²²

Model modernisasi Islam berangkat dari kepedulian atas keterbelakangan umat Islam di dunia sekarang, yang disebabkan oleh kepicikan berfikir, bodoh dan tertutup dalam memahami ajaran agamanya sendiri, sehingga sistem pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan tertinggal terhadap kemajuan yang dicapai Barat. Karena itu, ia cenderung mengembangkan pesan Islam dalam konteks itu, ia cenderung mengembangkan pesan Islam dalam konteks perubahan sosial dan perkembangan IPTEK, serta melakukan liberalisasi pandangan yang adaptif terhadap kemajuan zaman, tanpa harus meninggalkan sikap kritis terhadap unsur negatif dari proses modernisasi, sehingga ia lebih menampilkan

²¹ M. Amin Rais, *Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri* (Jakarta: Rajawali, 1986), 94.

²² Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan* (Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2003), 339.



kelenturan dan keterbukaan dalam menghadapi dunia yang plural dan terus berubah.

Modernisasi berarti berfikir dan bekerja menurut fitrah atau Sunnatullah yang haq. Sunnatullah ini mengejawentahkan dirinya dalam hukum alam, sehingga untuk dapat menjadi modern umat Islam dituntut untuk memahami lebih dahulu hukum yang berlaku dalam perintah Tuhan dan pada gilirannya akan melahirkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, modern berarti sikap *ilmiah* dan juga *rasional*. Untuk memahami seluruh hukum alam ternyata manusia ternyata memiliki keterbatasan kemampuan, sehingga perlu ditempuh secara bertahap, sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Karena itu, menjadi modern berarti *progresif* dan *dinamis*. Hanya saja kemoderenan itu bersifat relatif, terikat oleh ruang dan waktu yang modern secara mutlak hanya Tuhan Pencipta seluruh alam (Rabbul 'alamin). Kemoderenan dengan demikian berada dalam satu proses penemuan kebenaran yang relatif menuju kepada Kebenaran Yang Mutlak, yaitu Allah semata. Dengan kesadaran kreatifitas manusia, maka seorang akan bersedia dengan lapang dada menerima dan mendengarkan sesuatu kebenaran dari orang lain, sehingga terjadi proses kemajuan yang terus menerus dari kehidupan manusia. Sehingga kebenaran itu harus dicari di mana saja adanya, sekalipun harus ke negeri Cina.²³

Dengan demikian, maka islamisasi pengetahuan yang ditawarkan oleh model modernisasi Islam adalah membangun semangat umat Islam untuk selalu modern, maju, progresif, terus menerus mengusahakan perbaikan-perbaikan bagi diri

²³ Nurcholis Majid, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1987), 173-175.

dan masyarakatnya agar terhindar dari keterbelakangan dan ketertinggalan di bidang IPTEK.

Sehingga implikasinya, seorang modernis sering kali memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dengan hanya semata-mata mempertimbangkan kondisi dan tantangan sosio historis dan kultural yang dihadapi oleh masyarakat muslim kontemporer, tanpa mempertimbangkan muatan-muatan khazanah intelektual muslim era klasik. Ia tidak sabar dalam menekuni dan mencermati pemikiran Islam klasik, malahan lebih bersikap potong kompas, yakni ingin langsung memasuki teknologi modern tanpa mempertimbangkan khazanah intelektual muslim dan bangunan budaya masyarakat muslim yang terbentuk selama berabad-abad. Obsesi pemikirannya adalah pemahaman langsung terhadap nash-nash dan langsung loncat ke peradaban modern.²⁴

Model Neo-Modernis berupaya memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-sunnah dengan megikutsertakan dan mempertimbangkan khazanah intelektual muslim klasik serta mencermati kesulitan-kesulitan dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh dunia ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Jadi model ini selalu mempertimbangkan al-Qur'an dan sunnah, khazanah pemikiran klasik serta pendekatan-pendekatan keilmuan yang muncul pada abad ke 19 dan 20.²⁵

Islamisasi dalam arti Neo-Modernisme ini bertolak dari landasan metodologis sebagai berikut. Pertama, persoalan-

²⁴ Muhaimin, *Arah Baru*, 340

²⁵ Ibid.



persoalan kontemporer umat harus dicari penjelasannya dari tradisi, dari ijihad para ulama terdahulu hingga sunnah, yang merupakan hasil penafsiran terhadap al-Qur'an. Kedua, bila dalam tradisi tidak ditemukan jawabannya yang sesuai dengan tuntunan masyarakat kontemporer, maka selanjutnya menelaah konteks ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan sasaran ijihad ulama tersebut. Ketiga, melalui telaah historis akan terungkap pesan moral al-Qur'an yang sebenarnya merupakan etika sosial etika al-Qur'an. Keempat, dari etika sosial al-Qur'an itu kemudian diturunkan dalam konteks umat sekarang dengan bantuan hasil-hasil studi yang cermat dari ilmu pengetahuan atas persoalan yang dihadapi umat tersebut. Kelima, fungsi al-Qur'an disini lebih bersifat evaluatif, legitimatif hingga memberi pendasaran dan arahan moral terhadap persoalan yang akan ditanggulangi.²⁶

Islamisasi pengetahuan dengan demikian mengandung makna mengkaji dan mengkritisi ulang terhadap produk ijihad dari para ulama dan juga produk-produk ilmuan non muslim terdahulu di bidang ilmu pengetahuan, dengan cara melakukan verifikasi atau falsifikasi gar ditemukan relevan atau tidaknya pandangan, terutama teori dan sebagainya, dengan konteks ruang dan zamanya, serta berusaha menggali dan mencari alternatif baru terhadap produk kajian sebelumnya yang dipandang tidak relevan lagi dalam konteks sekarang.

²⁶ Saiful Muzani, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1933), 13.

E. Implikasi terhadap pengembangan ilmu pendidikan Islam

Islamisasi merupakan sebuah upaya membangun kembali semangat umat Islam dalam berilmu pengetahuan, mengembangkannya melalui kebebasan penalaran intelektual dan kajian rasional-empirik atau semangat pengembangan ilmiah (*scientific inquiry*) dan filosofis, yang merupakan perwujudan dari sikap concern, loyal dan komitmen terhadap doktrin-doktrin dan nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-sunnah.

Lebih lanjut menurut Zainudin islamisasi adalah upaya membangkitkan kembali semangat umat Islam terhadap ilmu-ilmu pengetahuan melalui penalaran intelektual dan pengembangan ilmiah dan filosofis yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis seperti yang telah diraih oleh zaman klasik.²⁷ Islamisasi pengetahuan berimplikasi pada lahirnya konsep pendidikan yang terpadu (*integral*).²⁸ Sintesa dari sistem pendidikan modern dan tradisional yang melebur pada landasan filosofis al-Qur'an dan al-Hadist, sehingga dualisme sistem pendidikan yang melanda dunia Islam bisa ditumbangkan.

Model-model yang bisa dikembangkan dapat berbentuk *Model Purifikasi*, *Model Modernisasi Islam* dan *Model Neo-Modernis* sebagaimana penulis jelaskan di atas. Untuk itu Muhaimin mencoba mengembangkan pendidikan Islam dengan beberapa model di antaranya adalah.

²⁷ M. Zainudin, *Paradigma Pendidikan Terpadu Menyiapkan Generasi Ulul Albab* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 75.

²⁸ Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Peranda Media, 2003), 108.



1. *Model Pragmatis* yakni model yang lebih melihat pada aspek praktisnya, dalam arti bentuk pengembaraan untuk mencari jawaban terhadap masalah pendidikan, psikologi, sosiologi dan sebagainya, kemudian ditemukan jawabannya dan selanjutnya dicarikan pembenarannya kedalam *nash* (al-Qur'an dan Hasist) sehingga *nash* berfungsi sebagai alat untuk justifikasi dan legitimasi.
2. *Model Idealistik*, yakni dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni dengan membangun premis mayor terlebih dahulu melalui kajian terhadap *nash-nash* yang terkait dengan persoalan pendidikan yang dikaji. Bangunan premis mayor dipandang sebagai kebenaran universal itu dipakai untuk meneropong permasalahan pendidikan yang muncul di dunia empiris dan untuk selanjutnya ditampilkan konsekuensinya. Model ini lebih menempatkan postulat (premis mayor), yang dibangun terhadap kajian *nash-nash* yang terkait secara apriori atau spekulatif, sebagai payung untuk menetapkan cocok atau tidaknya persoalan pendidikan yang muncul di dunia empiris dengan bangunan pokoknya.
3. *Ketiga*, Model yang dikembangkan dengan cara *pertama*, Menggali persoalan-persoalan pendidikan yang muncul di dunia empiris, kemudian mencari dan menelaah jawaban atau pemecahan terhadap persoalan-persoalan tersebut, melalui aliran-aliran atau teori-teori pendidikan yang ada sedang berkembang atau dari tinjauan psikologis dan sosiologisnya. Dalam proses tersebut belum ditampilkan konklusinya, melainkan ditampilkan inkonklusif, problematis dan tentatif (belum pasti dan masih bisa berubah), atau hipotesis, sehingga

terbuka peluang adanya jawaban atau pemecahan alternatif. Selanjutnya pemecahan alternatif tersebut dicari kebenarannya pada nash-nash agar diperoleh jawaban yang bijak. *Kedua*, menghimpun, menyusun, menelaah nash-nash yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji, sebagai acuan dan hudan (petunjuk) untuk memecahkan persoalan yang inkonklusif tersebut. *Ketiga*, mengkonstruksi (membangun) jawaban atau pemecahan masalah pendidikan yang sedang dikaji, sehingga ditemukan konsep yang bersifat Islami.

Dari ketiga model pengembangan pendidikan Islam yang dikembangkan di atas merupakan upaya pencarian atau penggalian ilmu pendidikan dalam perspektif Islam, atau upaya islamisasi ilmu pendidikan itu sendiri, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dan corak atau warna sistem pendidikan yang berkembang selama ini.

Adapun cara kerjanya dapat dilakukan dengan cara-cara yang sederhana hingga pada yang kompleks sekalipun. Dalam konteks pengembangan konsep pendidikan Islam misalnya, dapat dikembangkan dengan cara-cara sebagai berikut *pertama*, *Pragmatisme* yakni mengembangkan pemikiran rasional dan pengalaman empirik kemudian untuk selanjutnya pada titik tertentu berusaha menjadikan *nash-nash* sebagai justifikasi konsep-konsep pemikiran dan pengalaman empirik tersebut. *Kedua*, *vertikal-lateral independent*, yakni konsep pemikiran atau pendapat para ahli kependidikan (muslim atau non muslim) didudukan dalam posisinya tersendiri tanpa adanya *sharing ideas* diantara mereka dalam menjawab persoalan pendidikan Islam, sedangkan nash berfungsi sebagai alat justifikasi.



Ketiga, vertikal-horizontal lateral, yakni menjadikan pemikiran atau pendapat ulama atau ahli kependidikan (muslim) sebagai produk pemahaman *nash*, yang didudukan dalam posisi yang sederajat dan saling terjadi *sharing ideas* atau tidak diantara mereka dalam menjawab persoalan-persoalan pendidikan Islam. *Keempat, vertikal-herizontal trans-lateral*, yakni menjadikan pemikiran para ulama sebagai produk pemahaman *nash* dan mendudukannya dalam posisi sederajat, serta mempertimbangkan pemikiran dari para ahli pendidikan non-muslim, yang terjadi *sharing ideas* atau tidak diantara mereka, dalam menjawab persoalan pendidikan Islam. *Kelima, vertikal-linier*, yakni menjadikan pemikiran ulama dan ahli non-muslim dalam posisi yang sederajat dan saling *sharing ideas* diantara mereka, untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada *nash/wahyu ilahi (vertikal)* sebagai *hudan* dalam menjawab persoalan-persoalan pendidikan Islam.²⁹

Lebih lanjut menurut Syamsul Nizar implikasi islamisasi ilmu pengetahuan dalam pendidikan islam dapat disederhanakan sebagai berikut.

1. Aspek kelembagaan

Persoalan mendasar pada aspek kelembagaan ini menyangkut bentuk lembaga yang diinginkan atau diharapkan pascailamisasi. Dalam deskripsi yang lebih tegas islamisasi dalam aspek kelembagaan dimaksud adalah penyatuan dua sistem pendidikan, yakni pendidikan Islam (agama) dan sekuler (umum). Artinya melakukan modernisasi bagi lembaga pendidikan agama dan islamisasi pendidikan

²⁹ Zainudin, *Paradigma Pendidikan*, 76.

sekuler. Adanya lembaga pendidikan sekuler modern (Barat sekuler), dipandang sebagai kamuflase yang mengatas namakan Islam dan menjadikan Islam sebagai simbol. Mengantisipasi keadaan ini perlu didirikannya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang baru sebagai tandingan.³⁰

Seperti implikasi dari islamisasi ilmu pengetahuan pada aspek kelembagaan adalah terbentuknya lembaga independen yang mengintegrasikan pengembangan keilmuan agama dan umum, artinya apapun nama lembaganya yang terpenting adalah terintegrasikan secara komprehensif antara sistem umum dan agama.³¹ Meskipun dalam tatanan sistematika keorganisasian lembaga mengadopsi Barat namun secara substansi menerapkan sistem Islam

Mengintegrasikan lembaga tidak hanya terkait dengan masalah keilmuan, namun secara administratif pengelolaan lembaga pendidikan tersebut mengacu pada sistem manajemen sistem pendidikan Islam. Suatu bentuk manajemen yang bermoral yang sesuai dan sejalan dengan visi keislaman itu sendiri. Dalam hal ini berbagai konsep manajemen bisnis seperti total quality management, brand management dan management based school perlu dipertimbangkan untuk diterapkan.³²

Mengamati implikasi islamisasi ilmu pengetahuan pada aspek kelembagaan, agaknya terlihat kejelasan bahwa al-

³⁰ Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Gama Insani Press, 1955), 112.

³¹ Iskandar Tsani, "Mencari Alternatif Konsep Pendidikan Islam" dalam *Jurnal Ilmu dan Peradaban Islam*, Vol 1. No. 3 (Kediri: UP STAIN Kediri, 1999), 2.

³² Abudin Nata, *Paradigma Pendidikan Islam de Era Pasar Bebas*. Makalah disampaikan pada seminar Internasional Reformasi Pendidikan Islam Menghadapi Pasar Bebas. Padang pada tanggal 12 Februari 2005, 8.



Faqufi masih belum menuntaskan gagasan ini. Hal ini terlihat belum adanya lembaga pendidikan yang mereka dirikan sebagai ejawentahan dari islamisasi ilmu pengetahuan dalam lembaga pendidikan. Al-Faruqi hanya menerapkan proyek ini pada lembaga penelitian IIIT dan lembaga pendidikan yang dimiliki pihak lain di Amerika Serikat. Kendati demikian setidaknya ia telah memberikan kontribusi dalam usaha pendirian lembaga kajian keislaman di berbagai negara muslim dunia.

2. Aspek Kurikulum

Universitas harus memiliki kurikulum inti, karena kurikulum inilah yang menentukan esensi dari universitas. Pengkajian kurikulum ini tidak dapat diserahkan pada satu tim saja, namun membutuhkan ahli-ahli dibidangnya, perbincangan ini harus dimulai sejak islamisasi. Dalam hal ini kurikulum yang telah dikembangkan di Barat tidak boleh diabaikan. Pengembangan kurikulum dalam Islam dilihat dari kebenaran fundamental dan tidak dapat diubah dari prinsip tauhid yaitu al-Qur'an dan sunnah. Meskipun dalam prosesnya kurikulum membolehkan adanya pengadopsian dari buku-buku Barat, namun juga memberikan prioritas utama sebagai sumber yakni al-Qur'an dan sunnah.³³

Rumusan kurikulum dalam islamisasi pengetahuan dengan memasukkan segala keilmuan dalam kurikulum. Dengan demikian, lembaga pendidikan memiliki kurikulum yang aktual, responsif terhadap tuntunan permasalahan kontemporer.³⁴ Artinya lembaga akan melahirkan lulusan

³³ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan*, 273.

³⁴ Jalaludin Rahmad, "Kurikulum PTAI, Latar Belakang, Sejarah, Jati Diri dan Tantangan Masa Depan" dalam *Jurnal Inovasi Pendidikan Tinggi Agama*

yang visioner, berpandangan integratif, proaktif dan tanggap terhadap masa depan serta tidak dikotomistik dalam keilmuan.

3. Aspek Pendidik

Dalam hal ini para pendidik ditempatkan pada posisi yang selayaknya, artinya kompetensi dan profesionalitas yang mereka miliki dihargai sebagaimana mestinya. Bagi al-Faruqi tidak selayaknya para pendidik mengajar dengan prinsip keikhlasan, pendidik harus diberikan hononarium sesuai dengan keahliannya. Disamping itu tidak selayaknya pendidik tamu (dari luar) dihargai lebih tinggi dibandingkan pendidik milik sendiri.

Terkait dengan pengajar yang memberikan pengajaran pada tingkat dasar dan lanjutan tidak dibenarkan islamologi atau misionaris. Artinya harus benar-benar pendidik yang benar-benar Islam dan memiliki basic keislaman yang mantap. Disamping itu, staf-staf pengajar yang diinginkan dalam universitas Islam adalah staf pengajar yang shaleh serta memiliki visi keislaman. Memiliki kemampuan dalam mendefinisikan berbagai teori berdasarkan pendekatan islami secara meyakinkan serta mampu membimbing mahasiswa secara tepat untuk menemukan pemecahan dan jawaban yang benar.

Dengan demikian, harus ada rumusan yang tepat tentang kriteria calon pendidik, selain indeks prestasi (IP) sebagai parameter kualitas intelektual, penting dilakukan wawancara menyangkut kaidah, keimanan dan keagamaan,



jiwa dan sikap terhadap jabatan. Kriteria ini harus ditopang oleh kode etik islami tentang profesi pendidik. Seorang pendidik dituntut memiliki kemampuan substansial, yakni berupa penguasaan dua segi keilmuan yakni ilmu agama dan ilmu modern sekaligus. Disamping itu seorang pendidik juga dituntut untuk mampu menentukan relevansi antara ilmu pengetahuan tersebut dengan ilmu-ilmu agama. Sehingga dalam konteks inilah dituntut kejelian seorang pendidik mengingat beraneka ragamnya substansi keilmuan yang ada.

Selain kemampuan substantif pendidik juga dituntut untuk memiliki kemampuan nonsubstantif, yakni berupa multiskill didaktis. Kemampuan ini mencakup keterampilan dalam menggunakan metode dan strategi pembelajarn, pengelolaan atau manajemen pendidikan, pengevaluasian dan lain sebagainya. Yang secara keseluruhan bertumpu pada unsur tauhid.³⁵

Pada aspek rekrutmen dengan syarat-syarat seperti telah dikemukakan (aspek intelektual dan kapabilitas keagamaan). Artinya bahwa hanya calon yang memiliki kelayakan akademis dan kapabilitas keagamaan yang direkrut menjadi guru. Selanjutnya pembinaan dimaksudkan untuk meningkatkan kualifikasi profesional-profesional guru secara terus-menerus sesuai dengan tuntunan perubahan. Termasuk dalam hal ini adalah persoalan kesejahteraan. Kesemuanya dilakukan dan dibenahi secara terpadu dan sistematis.³⁶ Ini merupakan tanggung jawab dari para cendikiawan muslim terutama para

³⁵ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisis dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos, 1999), 53-61.

³⁶ Imam Suprayoga, "Keluar dari Kemelut Dualisme Sistem Pendidikan" dalam *Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam*. Vol III, No 2 (Jakrta: Ditbinperta Depag RI dan LP2AF, 2000), 48.

ahli pendidikan, sehingga dari sistem pendidikan terpadu yang berangkat dari konsep Islami tersebut, diharapkan mampu melahirkan manusia utuh atau *insan kamil*.

Jika pendidikan Islam bersedia mengikuti pemikiran pendidikan al-Faruqi dan al-Attas, secara berangsur-angsur motivasi umat Islam terhadap pengembangan ilmu akan semakin kuat, dikotomi ilmu dikalangan umat Islam akan semakin terkikis, yang diikuti akan pudarnya dualisme dalam sistem pendidikan umat Islam. Akibatnya, suatu ketika nanti pendidikan Islam dapat melahirkan kembali ilmuwan-ilmuan muslim yang kritis dan kreatif yang tidak mustahil dapat menghasilkan temuan-temuan yang berharga yang dapat menyelesaikan problem-problem kehidupan umat kontemporer.



DAFTAR PUSTAKA

- A Partanto, Pius dan M. Dahlan Al-Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arkola.
- Abdul Hakim, Atang dan Jaih Mubarak. 1999. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Al-Attas, Syed Muhammad al-Naqib. 1994. *Konsep Pendidikan Dalam Islam Suatu Kerangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Mizan
- Al-Fandi, Haryanto. 2011. *Desain Pembelajaran yang Demokratis dan Humanis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ali, Muhammad. 2003. *Teologi-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Amin Rais, M. 1986. *Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*. Jakarta: Rajawali.
- Amir Feisal, Jusuf. 1955. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gama Insani Press.

- Arif, Mahmud. 2008. *Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta: LKIS.
- Arifin, M. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Armas, Adnin. "Westernisasi dan Islamisasi Ilmu," dalam *Islamia* Tahun I, No 6, (Juli September, 2005).
- Azra, Azyumardi. 1998. *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- _____. 1999. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos.
- _____. 2003. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Ciputau: PT Logos Wacana Ilmu.
- _____. 2006. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas.
- Baqir, Haidar. "Gagalnya Pendidikan Agama" dalam *Kompas*, 28 Februari 2003.
- Baso, Ahmad. 2006. *NU Studies: Pergolakan pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*. Jakarta: Erlangga.
- Darajat, Zakiah. 1996. *Peran Agama dalam Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung.
- Darajat, Zakiah. Dkk. 1992. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.



- Dawam Rahardja, M. 1989. *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*. Jakarta: P3M.
- Dawam, Ainurrafiq. 2003. *Emoh Sekolah: Menolak Komersialisme Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual Menuju Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Inspeal Ahimasakarya Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Freire, Paulo. 1984. *Pendidikan sebagai Praktik Pembebasan*. terj Alois A. Nugroho. Jakarta: LP3ES.
- _____. 2003. *Pendidikan Masyarakat Kota*, Terj Agung Prihantono Yogyakarta: LkiS.
- _____. 2003. *Pendidikan yang Membebaskan, Pendidikan yang Memanusiakan dalam Menggugat Pendidikan Fundamental, Konservatif, Liberal*. Anarki. terj Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H.A.R, Tilaar. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim Soebahar, Abdul. 2009. *Matriks Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Hamid, Abdulah. 2010. *Pemikiran Modern dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasyim, Rosnaini. "Gagasan Ilmu Pengetahuan Kontemporer" dalam *Islamia* Tahun I, No. 6 (Juli- September 2006).
- [Http://www.dikti.org/uu_no2_1989html](http://www.dikti.org/uu_no2_1989html). diakses pada tanggal 4 Mei 2014 pukul 14.01 WIB.

Huda, Nurul. 2002. *Cakrawala Pembebasan: Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

Iskandar Tsani, "Mencari Alternatif Konsep Pendidikan Islam" dalam *Jurnal Ilmu dan Peradaban Islam*, Vol 1. No. 3 (Kediri: UP STAIN Kediri, 1999).

J. Stein, Steven dan Hqward E, Book. 2004. *Ledakan EQ 15 Prinsip dasar Kecerdasan Emosi Meraih Sukses*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.

Jalal, Fasli. 2001. *Revormasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita..

Jalaludin dan Usman Said. 1999. *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangannya*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.

Khalik Ridwan, Nur. 2003. *Detik-Detik Pembongkaran Agama*. Yogyakarta: CV. Aruuz Book.

Khozin. 2001. *Jejak-Jejak Pendidikan Islam*. Malang: UMM.

Khudhori Sholeh, A. "Mencari Gagasan Islamisasi Ilmu al-Faruqi" dalam *el-Harakah* Vol 57 tahun XXIII (Desember 2001-Februari 2002)

Learning to Live, Together in Peace and Harmony dapat ditelusiri di <http://www.unesco.org>. Pada tanggal 6 Mei 2014 pukul 14.04 WIB.

M. Echols, John dan Hassan Shadily. 1992. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Utama.



- M. Lapidus, Ira. 2000. *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Gufron A. Mas'adi. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Ma'arif, Syamsul. 2007. *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Majid, Nurcholis. 1987. *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Maksum, Ali dan Luluk Yunan. 2004. *Paradigma Pendidikan Universitas di Era Modern dan Post-Modern: Mencari "Visi Baru" atas "Realitas Baru" Pendidikan Kita*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Malik Fadjar, A. 1999. *Reformasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Fajar Dunia.
- Moh. Al-Toumy al-Syaibany, Omar. 1979. *Falsafah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mohammad al-Toumy al-Syaibany, Omar. 1979. *Falsafah Pendidikan Islam*, Terj. Hasan Lnggulung. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mohammad Nor Wan Daud, Wan. 2003. *Filsafat Pendidikan Islam*, Syed M. Naquib Al-Attas, terj. Hamid Fahmi. Bandung: Mizan.
- Muhaimin. 2002. *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2003. *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum hingga Redefinisi*

Islamisasi Pengetahuan. Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia.

_____. 2006. *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad Fahmi. "Konsep Pendidikan Isma'il Raji Al-Faruqi: Relevansinya bagi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia", *Tesis*. (Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM. 2006).

Muhammad Isa, Kamal. 1994. *Manajemen Pendidikan Islam* terj dari Khashaish Madrasatin Nubuwwah. Jakarta: Fikahati Aneska.

Munir Mulkan, Abdul. "Humanisasi Pendidikan Islam" dalam *Hamami Zada.*, dkk jurnal Tashwirul Afkar Edisi No. 11(Bandung: LP3ES, 2001)

Mustafied., dkk. 2001. *Pendidikan Kritis Transformatif*. Jakarta: PB PMII

Muzani, Saiful. 1933. *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.

Nasution, Harun. 1975. *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.

_____. 1986. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: UI Press.

_____. 2003. *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran san Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.



- Nata, Abuddin. 2003. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Peranda Media
- Nata, Abudin. 2008. *Manajemen Pendidikan, Mengatasi kelemahan pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prebada Media Group.
- Nizar, Samsul. 2008. *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Qomar, Mujamil. 2005. *Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik*. Jakarta: Erlangga.
- Quraish Shihab, M. 1996. *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Berbagai*
- Rahim, Husni. 2001. *Arah Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.
- _____. 2004. *Horizon Baru Pengembangan Pendidikan Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Rahmad, Jalaludin. "Kurikulum PTAI, Latar Belakang, Sejarah, Jati Diri dan Tantangan Masa Depan" dalam *Jurnal Inovasi Pendidikan Tinggi Agama Islam*, Vol. VI, No. 1 (Jakarta: Depertais, 2003).
- Rahman Assegaf, Abd. 2005. *Pengantar Dalam Buku Pendidikan Islam Integratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, Fazlur. 1985. *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, The terj. Ahsin Mohammad. Bandung: Penerbit Pustaka.

- Raji al-Faruqi, Isma'il. 1984. *Islamisasi Pengetahuan*, terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka.
- Ramayulis. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Sahrodi dkk, Jamadi. 2005. *Membedah Nalar Pendidikan Islam Pengantar ke arah Ilmu Pendidikan Islam*. Cirebon: STAIN Cirebon Press dan Pustaka Rihlah Group.
- Sahroni, Jamil. 2011. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: CV Afrino Raya.
- Sanaky, Hujair AH. 2003. *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta: Safiria Insani Press.
- Sayari'ati, Ali. 1984. *Sosiologi Islam*. Yogyakarta: Ananda
- Shofan, M. 2004. *Pendidikan Berparadigma Profetik*. Yogyakarta: IRCiSoD dan UMG Press.
- Soetopo, Hendayat. 2005. *Pendidikan dan Pembelajaran: Teori, Permasalahan dan Praktek*. Malang: UMM Press.
- Subagja, Soleh. 2010. *Gagasan Liberalisasi Pendidikan Islam*. Malang: Madani.
- Suharto, Ugi. "Islam dan Sekularisme" dalam *Islamia* Tahun I, No. 6 (Juli- September 2006)
- Sukudi, M.. 2005. *Pendidikan dalam Prespektif al-Qur'an*. Yogyakarta: Mikraj.
- Suprayoga, Imam. 2000. "Keluar dari Kemelut Dualisme Sistem Pendidikan" dalam *Jurnal Komunikasi Perguruan*



Tinggi Islam. Vol III, No 2 (Jakrta: Ditbinperta Depag RI dan LP2AF.

Syafi'I Ma'arif, Ahmad. 1991. *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

_____. 1997. *Pendidikan Islam dan Proses Pemberdayaan Industrialisasi*. Yogyakarta: Aditya Media dan Fakultas Tarbiyah UII.

Tafsir, Ahmad. 2007. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Tim Penyusun. 1990. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka.

Umiharso dan Haris Fathoni Makmur. 2010. *Pendidikan Islam dan Krisis Moralisme Masyarakat Modern*. Jogjakarta: IRCiSoD.

Ungguh Muliawan, Jasa. 2005. *Pendidikan Islam Integratif: Upaya Mengintegrasikan Kembali dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Watik Pratiknya, Ahmad. 1991. *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Zainudin, M. 2008. *Paradigma Pendidikan Terpadu Menyiapkan Generasi Ulul Albab*. Malang: UIN-Malang Press.



BIODATA PENULIS



Abd Rahim Razaq, lahir di Massepe Sidenreng Rappang (Sidrap) Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Agustus 1959 pasangan Haji Abd Razaq dan Hj. Imalu. Tamat SDN No.2 Massepe Sidrap 1972, PGAN 4 thn di Ujungpandang (Makassar) 1976 dan PGAN 6 tahun 1978. melanjutkan pendidikan di Fakultas Adab IAIN Alauddin Ujungpandang (sekarang UIN Makassar) Jurusan Sejarah dan kebudayaan Islam (SKI). Sarjana Muda (BA 1982), S1 fakultas yang sama (Drs.1986) Melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Negeri Makassar Pendidikan Bahasa Konsentrasi bahasa Arab (M.Pd. 2003). Gelar Dr. diperoleh pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2013. Selain sekolah formal, belajar pada sekolah Non formal, antara lain: Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Punnia Pinrang (1972-975), Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Aqram Gombara Ujungpandang 1975-1978 (Makassar), Ma'had LIPIA Jakarta 1986 (Takmily) dan mengundurkan diri, Senwich

untuk penyelesaian Dr. di Universitas Islam Internasional Qom Iran 2011. Short Cours Spritual Paedagogik di Qairo Mesir 2017.

Beberapa karya ilmiah yang pernah ditulis, antara lain: Khadijah bangsawan Quraisy dan Islam, (1982), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) di Makassar suatu Tinjauan Historis (1986), Proses fonoli Bahasa Arab suatu tiunjauan fonologi Generatif (2003). Serta jurnal Pilatr (ISSN: 2009 -2019), editor buku Almuhadharah Al asiyah fi durusi allughah Alarabiyah ala Thoriqi al haditsah (2014).

Narasumber dalam seminar Internasional bekerja sama dengan Universitas Sains Penang Malaysia 2010. Seminar Internasional Institut of Islamic Thought and Civilization UIIM (2010), Speaker of international Conference on University Role for Palestinion Independence proses, Held Association of Western Asian Student, Faculty of Cultural Science, Hasanuddin University, Collaboration with Iranian Corner (UNHAS, 2011), peserta Muktamar ke-2 Perguruan Tinggi Islam se dunia di Khartum Sudan (2014), Dosen SAME BIPA Dikti Diknas di Warsawa Polandia 2015. Narasumber pada Internasional Cinferece of Islamic Education Reform Prospects and Chelenger di Univeristas Negeri Malang 2015, dan Pemakalah dalam seminar Internasional (APPPTAM) Universitas Muhammadiyah Malang 2019.



MASYARAKAT global saat ini secara serius dihadapkan pada pengaruh sistem nilai yang sekuler dan matrealistik. Semua lapisan masyarakat, baik orang tua, pendidik, agamawan kini tengah menghadapi dilema besar dalam pendidikan, yaitu *bagaimana cara terbaik untuk mendidik generasi muda dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan global di masa mendatang?*

Dalam konteks Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sejak awal abad ke-20 M, sistem pendidikan di Indonesia telah dikotomis, yaitu pendidikan pada kedok pesantren dan madrasah yang hanya mengajarkan ilmu agama saja yang diselenggarakan oleh masyarakat pribumi, dan pendidikan sekolah-sekolah umum yang sekuler yang tak mengenal ajaran agama, yang didirikan oleh kolonial Belanda. Sehingga hal ini berdampak luas dalam kehidupan, baik gaya hidup, pola pikir dan aktivitas sosial yang membahayakan dan merugikan umat Islam sendiri. Di sinilah perlunya integrasi antara ilmu agama dengan ilmu umum.

Atas dasar itu, penulis mengkaji berbagai persoalan pendidikan dan upaya penyelesaiannya dalam buku ini. Wacana tentang kajian ini merupakan suatu lahan garapan yang menarik untuk dibicarakan sesuai situasi dan kondisi umat. Karena pada hakikatnya persoalan pendidikan merupakan persoalan yang berhubungan langsung dengan kehidupan manusia. Mengalami perubahan serta perkembangan sesuai dengan kehidupan manusia baik secara teori maupun konsep operasionalnya.



PANDORA

